

EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF TEORETIS DAN STUDI EMPIRIS

Editor: Dr. Madris, SE., DPS., MSI., CWM®



**EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DALAM PERSPEKTIF TEORETIS DAN STUDI EMPIRIS**

EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF TEORETIS DAN STUDI EMPIRIS

Editor

Dr. Madris, SE., DPS., MSI., CWM®

Penerbit:



EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF TEORETIS DAN STUDI EMPIRIS

Penulis

Madris. Abdul Rahman. Nurhuda. Fatmawati. Ayu Latifah Alfisyarin Yunus. Nurul Rabbiyeni. Nur Dwiana Sari Saudi. Diky Aditia Rangga. Sanusi Fattah. Elsy Sonda Rindu Dian. Intan Nur Asih. Munawarah. Imran. Sabir. Sri Marsanda. Amanus Khalifah Fil'ardiy Yunus. Wafiqah Ulya. Hamrullah. Reski Fitri Paradise.

Editor

Dr. Madris, SE., DPS., MSI., CWM®

Tata Letak

Muhammad Al Fayed

ISBN 978-979-530-299-5

Cetakan I 2021

Penerbit

UPT Unhas Press

Keanggotaan

IKAPI No.002/SSL/01 dan APPTI

Alamat Penerbit

Gedung UPT Unhas Press, Kampus Unhas Tamalanrea
Jalan Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar, Sulawesi Selatan
HP/WA: +62 8229 9555 591 — Email: unhaspress@gmail.com
Laman: unhaspress.com

Hak Cipta ©Madris, dkk. *All rights reserved.* Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis/penerbit.

Kata Pengantar

Penduduk suatu wilayah hukum, adalah orang atau warga suatu wilayah yang secara hukum berhak atau pernah tinggal di wilayah tersebut paling singkat enam bulan terakhir, dan atau berniat tinggal dan menetap di wilayah tersebut. Penduduk secara demografi adalah orang yang pernah lahir hidup dan belum meninggal sampai pencacahan (sensus atau survei) dilakukan, meskipun pernah melakukan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah sangat tergantung pada aspek fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Secara teoretis fertilitas dipengaruhi oleh pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan suatu wilayah.

Penduduk yang besar akan membutuhkan banyak pengeluaran konsumsi. Konsumsi yang besar akan menghabiskan pendapatan, dan berdampak pada tidak adanya tabungan, sehingga tidak adanya sumber investasi untuk pembangunan (Teori Klasik). Namun oleh Keynes (1936) berpendapat lain, bahwa penduduk yang besar akan cenderung menghabiskan pendapatan untuk pengeluaran konsumsi, dan akan mendorong tingginya efek multiplier pendapatan menuju semakin tingginya permintaan agregat. Tingginya permintaan agregat akan berpengaruh terhadap peningkatan permintaan tenaga kerja (*derived demand for labor*).

Jadi permintaan tenaga kerja, termasuk sumber daya produktif lainnya, adalah permintaan turunan. Ini berarti bahwa permintaan tenaga kerja bergantung pada, atau berasal dari permintaan akan produk barang atau layanan jasa yang diproduksi atau disediakan. Di bidang manufaktur misalnya, tenaga kerja dituntut kontribusinya bagi produksi produk seperti mobil, pesawat televisi, atau roti. Dengan demikian, penurunan permintaan mobil akan mengurangi permintaan pekerja otomotif. Demikian pula permintaan pekerja di pabrik roti sangat ditentukan oleh permintaan konsumen roti di pasar roti. Jika permintaan roti meningkat, maka pengusaha roti berusaha melakukan ekspansi usaha untuk memenuhi permintaan roti yang semakin meningkat. Oleh sebab itu, pengusaha roti akan menambah jasa tenaga kerja (karyawan), sehingga penyerapan tenaga kerja di perusahaan roti tersebut semakin meningkat.

Di sektor jasa, tenaga kerja dibutuhkan oleh perusahaan karena secara langsung memberikan keuntungan kepada konsumen. Peningkatan permintaan akan layanan penitipan anak misalnya, akan meningkatkan permintaan akan pekerja penitipan anak. Demikian pula jasa pelayanan yang lain, seperti jasa pelayanan di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor hiburan, dan lainnya.

Buku ini di dua bab pertama menguraikan tentang aspek kependudukan, seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi dan dampaknya terhadap jumlah, pertumbuhan, dan komposisi penduduk menurut kelompok umur tertentu. Di sisi lain, buku ini membahas tentang ketenagakerjaan dari aspek permintaan atau penyerapan tenaga kerja. Semua aspek dikaji dalam perspektif teoretis dan studi empiris.

Harapan penulis, paling tidak buku ini dapat dibaca dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi, paling tidak bagi mahasiswa Strata 1, baik pada saat mengambil mata kuliah Ekonomi Kependudukan, dan atau Ekonomi Sumberdaya Manusia, maupun pada saat mahasiswa menulis karya ilmiah sebagai tugas akhir.

Tamalanrea, 20 April 2021

Madris,

Kata Pengantar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Penduduk dalam pandangan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yakni penduduk sebagai konsumen (*demand side*), dan penduduk sebagai produsen (*supply side*), yakni sebagai faktor produksi (*labor*), seperti halnya faktor produksi modal (*capital*), dan sumberdaya alam. Penduduk sebagai konsumen dimulai sejak lahir sampai dia meninggal, sementara penduduk sebagai produsen dimulai sejak usia produktif (15-64) tahun, meskipun di Indonesia oleh BPS menggunakan usia produktif 15 tahun ke atas, sebab secara faktual di Indonesia penduduk dalam rentang umur tersebut masih bisa bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, penduduk usia kurang 15 tahun dan 65 ke atas (*aging*), masing-masing merupa-

kan kelompok penduduk yang belum produktif dan purna produktif (*aging*).

Permintaan suatu komoditas, merupakan hubungan fungsional antara tingkat harga dengan komoditas yang para pembeli bersedia untuk membelinya. Dalam perspektif tenaga kerja, permintaan adalah hubungan fungsional antara tingkat upah dengan jumlah jasa tenaga kerja yang digunakan oleh pengguna jasa sebagai salah satu faktor produksi, baik sebagai faktor produksi pengganti maupun sebagai pelengkap.

Permintaan tenaga kerja merupakan turunan (derivasi) dari permintaan barang dan jasa, baik pada pasar persaingan sempurna, maupun pada pasar persaingan tidak sempurna, baik dalam jangka pendek (*in the short run*), maupun dalam jangka panjang (*in the long run production function*). Oleh sebab itu karakteristik permintaan pasar barang dan jasa (di pasar *output*) akan sangat mewarnai karakteristik permintaan jasa tenaga kerja (di pasar *input*).

Buku dengan judul *Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Teoretis dan Studi Empiris* ini, di dalamnya terdapat beberapa tulisan hasil suntingan beberapa penulis. Buku ini membahas dua aspek, yakni ekonomi kependudukan dari aspek potensi penawaran tenaga kerja; dan ketenagakerjaan dari aspek permintaan atau penyerapan tenaga kerja. Kedua aspek ini dipaparkan dalam kajian teoretis dan studi empiris dari beberapa hasil karya riset yang ada. Tentu saja buku ini layak menjadi buku referensi bagi penulisan karya ilmiah yang relevan di masa datang.

Dekan,

Abd. Rahman Kadir

Daftar Isi

Kata Pengantar — v

**Kata Pengantar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin** — ix

Daftar Isi — xi

Bab I

**Integrasi Faktor Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan
dengan Pertumbuhan Penduduk** — 3

Keterkaitan Fertilitas, Mortalitas, dengan Pertumbuhan
Penduduk — 6

Keterkaitan Migrasi dengan Pertumbuhan

Penduduk	—	12
Daftar Pustaka	—	22

Bab II

Dampak dan Implikasi Perkembangan Kependudukan di Indonesia Bagian Tengah — 25

Dampak Perkembangan Kependudukan	—	25
Implikasi Proyeksi Angka Kematian Bayi	—	43
implikasi perkembangan penduduk	—	47
Daftar Pustaka	—	57

Bab III

Migrasi Internasional dalam Tinjauan Teoretis dan Empiris — 59

Beberapa Pandangan Tentang Migrasi Internasional	—	59
Beberapa Faktor Penentu Migrasi dalam Pandangan Teoretis	—	64
Berapa Hasil Studi Terdahulu	—	77
Referensi	—	80

Bab IV

Kajian Teoretis Penyerapan Tenaga Kerja, Upah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi — 83

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Penyerapan Tenaga Kerja	—	83
Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi	—	87

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Mutu Sumberdaya Manusia	—	88
Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Investasi	—	91
Kaitan Teoretis Upah Terhadap Investasi, Mutu Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja	—	93
Kaitan Teoretis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Mutu SDM dan Penyerapan Tenaga Kerja	—	97
Beberapa Hasil Kajian Empiris Sebelumnya	—	100
Referensi	—	102

Bab V

Keterkaitan antara Faktor Sosial Ekonomi dengan Penyerapan Tenaga Kerja — 111

Pengantar	—	111
Angkatan Kerja (<i>Labor Force</i>)	—	113
Penyerapan Tenaga Kerja	—	114
Teori Pertumbuhan Ekonomi	—	116
Mutu Sumber Daya Manusia	—	119
Upah Minimum	—	121
Hubungan Antar Variabel :	—	124
Referensi	—	132

Bab VI

Faktor Penentu Permintaan Tenaga Kerja dalam Perspektif Teoretis — 137

Investasi	—	137
Referensi	—	151

Bab VII

Beberapa Faktor Penentu Penyerapan Tenaga Kerja dalam Perspektif Teoretis — 155

Mutu Sumber Daya Manusia	—	161
Investasi Swasta	—	164
Pengeluaran Pemerintah	—	166
Hasil Produksi	—	169
Perubahan Struktur Ekonomi	—	171
Referensi	—	174

Bab VIII

Determinan Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi: Sisi Permintaan — 177

Tinjauan Teoretis	—	177
Teori Pertumbuhan Keynes	—	179
Hukum Okun	—	180
Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	—	182
Hubungan Investasi dengan Pengangguran	—	185
Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi	—	186
Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pengangguran	—	188
Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi	—	188
Hubungan Inflasi dengan Pengangguran	—	189
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran	—	191
Tinjauan Studi Empiris	—	192

Referensi — 194

Bab IX

Hubungan Teoritis antara Mutu Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dengan Kemiskinan — 199

Pengantar	—	199
Ukuran Kemiskinan	—	202
Penyebab Kemiskinan	—	203
Pengangguran	—	205
Mutu Sumber Daya Manusia	—	208
Pertumbuhan Ekonomi	—	212
Hubungan Antar Variabel	—	215
Referensi	—	220

Bab X

Determinan Lama Mencari Kerja Di Sektor Informal dalam Kajian Teoritis dan Studi Empiris — 225

Pasar Tenaga Kerja	—	227
Sektor Formal	—	227
Teori Pengangguran	—	228
Teori Mencari Kerja	—	232
Hubungan antara Umur dengan Lama Mencari Kerja	—	233
Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Lama Mencari Kerja	—	234
Hubungan antara Upah yang diinginkan dengan Lama Mencari Kerja	—	235

Hubungan antara <i>Non Labor Income</i> dengan Lama Mencari Kerja	—	236
Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Lama Mencari Kerja	—	237
Hubungan antara Status Kawin dengan Lama Mencari Kerja	—	238
Hubungan antara Status Pekerjaan Orang Tua dengan Lama Mencari Kerja	—	239
Penelitian Terdahulu	—	239
Referensi	—	242

Bab XI

Kajian Teoritis Faktor Penentu Pengangguran: Analisis Sisi Permintaan — 249

Kajian Teoritis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran	—	249
Kaitan Teoritis Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran	—	252
Kaitan Teoritis Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran	—	255
Landasan Teoritis Kurva Philips serta Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi	—	257
Kaitan Teoritis Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran	—	258
Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris Sebelumnya	—	260
Referensi	—	262

Bab XII

Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja: Kajian Teoretis dan Studi Empiris — 269

Penyerapan Tenaga Kerja	—	269
Pertumbuhan Ekonomi	—	274
Investasi	—	279
Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja	—	283
Hubungan Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi	—	285
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penyerapan Tenaga Kerja	—	287
Beberapa Hasil Kajian Empiris	—	288
Referensi	—	290

Bab XIII

Sektor Basis dan Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral — 293

Teori Basis Ekonomi	—	296
Tenaga Kerja	—	300
Kesempatan Kerja	—	301
Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja	—	303
Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesempatan Kerja	—	304
Hubungan Kesempatan Kerja dengan Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja	—	305
Hasil Penelitian dan Studi Empiris	—	306
Referensi	—	311

Bab I

Integrasi Faktor Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan dengan Pertumbuhan Penduduk

Madris

Sejak dua ratus tahun yang lalu, Malthus sudah mempersoalkan *trade-off* antara jumlah anak dengan kualitas anak. Dikatakan-nya, bahwa bila masyarakat (Eropa) ingin keluar dari masalah pendapatan yang tidak kunjung maju, maka masyarakat harus mampu mengendalikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang terlalu besar menyebabkan kekurangan pangan, kerusakan lingkungan, disusul dengan peperangan, dan wabah penyakit. Ketika jumlah penduduk terlalu dipaksa (oleh alam) untuk menurun, haruslah kesejahteraan masyarakat meningkat lagi. Oleh karena itu, Malthus sarankan, sebaiknya masyarakat dapat mencegah membesarnya jumlah penduduk sebelum alam memaksa terjadinya penurunan jumlah penduduk. Malthus me-

nyarankan sebagian anggota masyarakat hidup melajang atau, kalau pun melakukan perkawinan, menikahlah di usia yang lebih tua.

Kecemasan Malthus tidak lagi menjadi bahan diskusi dalam ilmu ekonomi setelah revolusi industri pertama di Eropa, hingga tahun 1950-an. Tetapi, Coale dan Hoover (1958) mulai mengungkit lagi kecemasan Malthus. Di negara-negara miskin abad ke-20-21, menurut mereka, *trade-off* yang membuat kegalauan Malthus perlu diperhatikan lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Kondisi negara miskin abad ke-20-21 jauh berbeda dengan kondisi kemiskinan di Eropa pada abad ke-18. Jumlah penduduk di negara miskin abad ke-20-21 sudah amat besar dan dengan mutu yang relatif rendah. Mereka sulit melakukan inovasi (dan juga teknologi) kerana tidak mempunyai tabungan yang cukup untuk membiayai investasi. Mereka tidak mempunyai tabungan karena pengeluaran konsumsi banyak. Pengeluaran konsumsi banyak karena anak mereka banyak yang belum produktif secara ekonomi (Ananta, 1995).

Penduduk dalam pandangan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yakni penduduk sebagai konsumen (*demand side*), dan penduduk sebagai produsen (*supply side*), yakni sebagai faktor produksi (*labor*), seperti halnya faktor produksi modal (*capital*), dan sumberdaya alam (*land*). Penduduk sebagai konsumen dimulai sejak lahir sampai dia meninggal, sementara penduduk sebagai produsen dimulai sejak usia produktif (15-64) tahun, meskipun di Indonesia oleh BPS menggunakan usia produktif 15 tahun ke atas, di Indonesia secara faktual penduduk dalam rentang umur tersebut masih bisa bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian, penduduk usia kurang 15 tahun dan 65 ke atas (lansia), masing-masing merupakan kelompok penduduk yang belum produktif dan purna produktif (*aging*).

Di sisi lain, penduduk dapat dibagi dalam tiga aspek, yakni aspek jumlah (*size*), aspek pertumbuhan (*growth*), dan aspek komposisi

usia (*structure*). Pertama, dari aspek jumlah, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin tinggi tingkat permintaan kebutuhan dasar (primer), sekunder, dan tersier. Penduduk yang besar dan beraktivitas akan membutuhkan banyak suplai air bersih, energi listrik, sarana dan prasarana transportasi, pemukiman/perumahan, pelayanan pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lain, terutama kebutuhan pangan. Kedua, dari aspek pertumbuhan, semakin tinggi pertumbuhan penduduk terutama disebabkan pertumbuhan penduduk alami (*fertilitas*), maka disamping akan menambah penduduk usia muda, juga akan merubah komposisi penduduk menurut struktur umur. Penduduk yang lahir hari ini, 5-6 tahun kemudian akan masuk usia pra-sekolah, 7-12 tahun kemudian akan masuk usia sekolah dasar, dan seterusnya sampai masuk kuliah yang tentu saja akan membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.

Penduduk yang besar akan membutuhkan banyak pengeluaran konsumsi. Konsumsi yang besar akan menghabiskan pendapatan, dan berdampak pada tidak adanya tabungan, sehingga tidak adanya sumber investasi untuk pembangunan (Teori Klasik). Meskipun Keynes (1936) berpendapat lain, bahwa kecenderungan menghabiskan pendapatan untuk pengeluaran konsumsi akan mendorong tingginya efek multiplier pendapatan menuju semakin tingginya permintaan agregat.

Seiring dengan bertambahnya umur, anak yang lahir 15 tahun yang lalu kini memasuki usia produktif, dimana sudah mulai masuk ke pasar kerja, sehingga terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja. Jika dari sisi permintaan tenaga kerja tidak dapat merespon dengan baik, akan terjadi kelebihan penawaran di atas permintaan tenaga kerja sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja, yang kita sebut penganggur (*unemployed*).

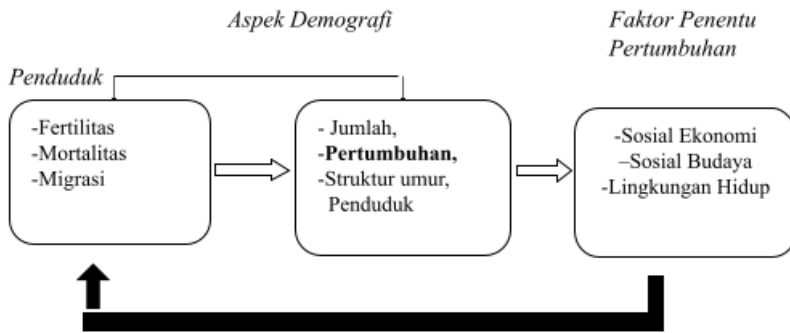
Penduduk sebagai faktor produksi, seperti modal dan lahan dalam teori produksi Cobb Doulass, dimulai dari umur 15 sampai 64

tahun yang biasa disebut usia produktif. Penduduk yang besar pada usia produktif (15-64) tahun akan menjadi aset modal pembangunan ekonomi suatu daerah, jika memiliki mutu manusia yang cukup baik. Oleh Djajanegara dan Ananta (1986) menemukan bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan variabel utama investasi dalam modal manusia, dan menambahkan bahwa “keamanan” sebagai variabel utama lainnya. Seorang yang pandai, sehat, dan merasa aman akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang yang kurang memiliki di antara ketiga hal tersebut. Misalnya seorang yang cerdas, sehat, tetapi selalu hidupnya tidak aman, maka dia tidak bisa bekerja dengan tingkat produktivitas yang optimal.

Penduduk yang besar dan memiliki mutu yang tinggi akan berdampak pada peningkatan produktivitas individu dan berlanjut pada produktivitas regional dan nasional. Sebaliknya, penduduk yang besar tetapi tidak berkualitas maka berdampak pada produktivitas individu yang rendah dan pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin dan tidak berkualitas.

Keterkaitan Fertilitas, Mortalitas, dengan Pertumbuhan Penduduk

Fertilitas adalah dampak pendapatan yang rendah sehingga penduduk yang tidak mampu membeli derajat kesehatan yang tinggi, mengakibatkan gizi ibu hamil, gizi bayi, dan balita rendah, sehingga angka kematian bayi dan anak masih relatif tinggi. Tingginya angka kematian bayi dapat berdampak pada tingginya angka fertilitas. Semakin tinggi tingkat fertilitas, maka semakin banyak jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan perubahan komposisi penduduk menurut kelompok umur (Gambar 1).



Gambar 1. Integrasi Aspek Demografi dengan Faktor Penentu Pertumbuhan Penduduk

Ukuran fertilitas yang banyak digunakan adalah *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka fertilitas menurut umur (ASFR_x). TFR merupakan penjumlahan ASFR_x, yakni jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita pada akhir masa reproduksinya, dengan asumsi dia mengikuti pola fertilitas yang berlaku dari umur 15 sampai 49 tahun.

Pandangan bahwa faktor-faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap fertilitas bukanlah suatu hal yang baru. Dasar pemikiran utama dari teori ‘transisi demografis’ yang sudah terkenal luas adalah bahwa sejalan dengan diadakannya pembangunan sosial-ekonomi, maka fertilitas lebih merupakan suatu proses ekonomis dari pada proses biologis.

Berbagai metode pengendalian fertilitas seperti penundaan perkawinan, senggama terputus, dan kontrasepsi dapat digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak menginginkan mempunyai keluarga besar, dengan anggapan bahwa mempunyai banyak anak berarti memikul beban ekonomis dan menghambat peningkatan kesejahteraan sosial dan material. Bahkan sejak awal pertengahan abad ini, sudah diterima secara umum bahwa hal inilah yang menyebabkan penurunan fertilitas di Eropa Barat dan Utara dalam abad 19.

Leibenstein dapat dikatakan sebagai peletak dasar “Teori ekonomi tentang fertilitas”. Leibenstein memandang anak dalam dua aspek yakni aspek kegunaannya (*utility*) dan aspek biaya (*cost*). Aspek kegunaan yang dimaksud adalah memberikan kepuasan, dapat memberikan balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan berproduksi serta merupakan sumber yang dapat menghidupi orang tua di masa depan.

Selanjutnya Leibenstein menguraikan, bahwa ada tiga macam tipe kegunaan anak yaitu (a) anak sebagai suatu ‘barang konsumsi’ misalnya sebagai sumber hiburan bagi orang tua; (b) anak sebagai suatu sarana produksi, yakni dalam beberapa hal tertentu anak diharapkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan menambah pendapatan keluarga; dan (c) anak sebagai sumber ketentraman, baik pada hari tua maupun sebaliknya”.

Kemudian dari aspek biaya (*cost*), yakni pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya dari mempunyai anak tersebut. Biaya memiliki tambahan seorang anak dapat dibedakan atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan dalam memelihara anak seperti memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak sampai ia dapat berdiri sendiri. Sedangkan, biaya tidak langsung adalah kesempatan yang hilang karena adanya tambahan seorang anak. Misalnya, seorang ibu tidak dapat bekerja lagi karena harus merawat anak, kehilangan penghasilan selama masa hamil, melahirkan, atau berkurangnya mobilitas orang tua yang mempunyai tanggungan keluarga besar (Kanitkar, 1990).

Kemudian Leibenstein, mengemukakan bahwa apabila ada kenaikan pendapatan, maka aspirasi orang tua akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang baik. Ini berarti biayanya naik atau lebih mahal. Pengembangan lebih lanjut tentang ekonomi fertiitas dilakukan oleh Gary S. Becker dengan artikelnya yang cukup terkenal yaitu “*An Economic Analysis of Fertility*”. Menurut Becker anak

dari sisi ekonomi pada dasarnya dapat dianggap sebagai barang konsumsi (*a consumption goods, consumer's durable*) yang memberikan suatu kepuasan (*utility*) tertentu bagi orang tua.

Bagi banyak orang tua, anak merupakan sumber pendapatan dan kepuasan (*satisfaction*). Secara ekonomi fertilitas dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, biaya memiliki anak dan selera. Meningkatnya pendapatan (*income*) dapat meningkatkan permintaan terhadap anak, karena memelihara anak membutuhkan *leisure time* sebagai barang normal.

Dalam analisis ekonomi fertilitas selanjutnya juga mempertanyakan, mengapa permintaan akan anak berkurang bila pendapatan meningkat; yakni apa yang menyebabkan harga pelayanan anak berkaitan dengan pelayanan komoditi lainnya meningkat, jika pendapatan meningkat, maka teori *household economics* membahas bahwa (a) orang tua mulai lebih menyukai anak-anak yang berkualitas lebih tinggi dalam jumlah yang hanya sedikit sehingga “harga beli” meningkat; (b) bila pendapatan dan pendidikan meningkat, maka semakin banyak waktu (khususnya waktu ibu) yang digunakan untuk merawat anak. Jadi anak menjadi lebih mahal, karena biaya langsung dan biaya tidak langsung anak semakin meningkat.

Di dalam setiap kasus, semua pendekatan ekonomi melihat fertilitas sebagai hasil dari suatu keputusan rasional yang didasarkan atas usaha untuk memaksimalkan fungsi *utility* ekonomis yang cukup rumit yang tergantung pada biaya langsung dan tidak langsung, keterbatasan sumber daya, dan selera.

Topik-topik yang dibahas dalam ekonomi fertilitas antara berkaitan dengan pilihan-pilihan ekonomi seseorang dalam menentukan fertilitas (jumlah dan kualitas anak). Pertimbangan ekonomi dalam menentukan fertilitas terkait dengan *income*, biaya (langsung maupun tidak langsung), selera, modernisasi dan sebagainya.

Kemudian, Bulato menulis tentang konsep *demand for children* dan *supply of children*. Konsep *demand for children* dan *supply of children* dikemukakan dalam kaitan menganalisis economic determinan factors dari fertilitas. Bulatao mengartikan konsep demand for children sebagai jumlah anak yang diinginkan. Termasuk dalam pengertian jumlah adalah jenis kelamin anak, kualitas, waktu memiliki anak dan sebagainya.

Menurut Bulatao, demand for children dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya anak, pendapatan keluarga dan selera. Dalam artikel tersebut Bulato membahas masing-masing faktor tersebut (biaya anak, pendapatan, selera) secara lebih detail. Sedang *supply of children* diartikan sebagai banyaknya anak yang bertahan hidup dari suatu pasangan jika mereka tidak berpisah/cerai pada suatu batas tertentu. Supply tergantung pada banyaknya kelahiran dan kesempatan untuk bertahan hidup. *Supply of children* berkaitan dengan konsep kelahiran alami (*natural fertility*).

Menurut Bongart dan Menken fertilitas alami dapat diidentifikasi melalui lima hal utama, yaitu (a) ketidak-suburan setelah melahirkan (*postpartum infecundibility*); (b) waktu menunggu untuk konsepsi (*waiting time to conception*); (c) kematian dalam kandungan (*intraurine mortality*); (d) sterilisasi permanen (*permanent sterility*); dan (e) memasuki masa reproduksi (*entry into reproductive span*).

Pandangan lain dari Richard A. Easterlin, bahwa permintaan akan anak sebagian ditentukan oleh karakteristik latar belakang individu seperti agama, pendidikan, tempat tinggal, jenis/tipe keluarga dan sebagainya. Setiap keluarga mempunyai norma-norma dan sikap fertilitas yang dilatarbelakangi oleh karakteristik di atas. Easterlin juga mengemukakan perlunya menambah seperangkat determinan ketiga (disamping dua determinan lainnya: permintaan anak dan biaya regulasi fertilitas) yaitu mengenai pembentukan kemampuan potensial dari

anak. Hal ini pada gilirannya tergantung pada fertilitas alami (natural fertility) dan kemungkinan seorang bayi dapat tetap hidup hingga dewasa.

Fertilitas alami sebagian tergantung pada faktor-faktor fisiologis atau biologis, dan sebagian lainnya tergantung pada praktek-praktek budaya. Apabila pendapatan meningkat maka terjadilah perubahan “suplai” anak karena perbaikan gizi, kesehatan dan faktor-faktor biologis lainnya. Demikian pula perubahan permintaan disebabkan oleh perubahan pendapatan, harga dan “selera”.

Pada suatu saat tertentu, kemampuan suplai anak dalam suatu masyarakat bisa melebihi permintaan atau sebaliknya. Easterlin berpendapat bahwa bagi negara-negara berpendapatan rendah permintaan mungkin bisa sangat tinggi tetapi suplainya rendah, karena terdapat pengekangan biologis terhadap kesuburan. Hal ini menimbulkan suatu permintaan “berlebihan” (*excess demand*) dan juga menimbulkan sejumlah besar orang yang benar-benar tidak menjalankan praktek-praktek pembatasan keluarga.

Di pihak lain, pada tingkat pendapatan yang tinggi, permintaan adalah rendah sedangkan kemampuan suplainya tinggi, maka akan menimbulkan suplai “berlebihan” (*over supply*) dan meluasnya praktek keluarga berencana.

John C. Caldwell juga melakukan analisis fertilitas dengan pendekatan ekonomi sosiologis. Tesis fundamental Caldwell adalah tingkah laku fertilitas dalam masyarakat pra-tradisional dan pasca-transisional itu dilihat dari segi ekonomi bersifat rasional dalam kaitannya dengan tujuan ekonomi yang telah ditetapkan dalam masyarakat, dan dalam arti luas dipengaruhi juga oleh faktor-faktor biologis dan psikologis.

Teori Caldwell menekankan pada pentingnya peranan keluarga dalam arus kekayaan netto (*net wealth flows*) antar generasi dan juga

perbedaan yang tajam pada regim demografis pra-transisi dan pasca-transisi. Caldwell mengatakan bahwa “sifat hubungan ekonomi dalam keluarga” menentukan kestabilan atau ketidak-stabilan penduduk. Jadi pendekatannya lebih menekankan pada dikenakannya tingkah laku fertilitas terhadap individu (atau keluarga inti) oleh suatu kelompok keluarga yang lebih besar (bahkan yang tidak sederhana) dari pada oleh “norma-norma” yang sudah diterima masyarakat.

Keterkaitan Migrasi dengan Pertumbuhan Penduduk

Selain aspek fertilitas, migrasi juga memiliki andil yang cukup besar dalam perubahan jumlah, pertumbuhan dan perubahan komposisi umur penduduk di suatu wilayah. Jika jumlah migrasi masuk lebih besar daripada jumlah migrasi keluar, maka akan terjadi pertumbuhan penduduk yang semakin besar, dan boleh saja menciptakan surplus tenaga kerja di daerah tujuan.

Becker (1993) menjelaskan bahwa bermigrasi itu sebuah pilihan dimana seorang individu akan mengambil keputusan yang rasional dalam menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia dalam memberikan manfaat maksimum (*Utility maximum*) bagi dirinya dalam proses migrasi. Informasi yang dimiliki seseorang mengenai keuntungan bermigrasi juga berperan penting dalam pengambilan keputusan migrasi. Jika keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bermigrasi, maka kemungkinan seseorang akan memutuskan untuk bermigrasi (Nashrul, 2010).

Susilowati (2008) mengutip Speare, bahwa selain motif ekonomi, migrasi tenaga kerja juga dipengaruhi oleh faktor non ekonomi, misalnya karakteristik struktural, karakteristik sosio-demografis, karakteristik daerah asal dan daerah tujuan, kondisi geografis, dan ka-

rakteristik komunitas sosial yang mempengaruhi keputusan terhadap tempat tinggal dan berpengaruh terhadap niat bermigrasi.

Wolpert (Elda dan Racmanina, 2013) menganalisis migrasi menggunakan model *place utility (stress-threshold model)*. Dalam model ini menjelaskan bahwa perpindahan tenaga kerja didasarkan pada keputusan individu yang dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dan tekanan (*stress-threshold*) di daerah asal. Penilaian individu yang rasional mengenai kondisi tempat tinggal dan tempat bekerja dipengaruhi oleh karakteristik individu, rumah tangga dan lingkungan tempat tinggal.

Hal ini sejalan dengan pendapat Susilowati (2008) yang mengemukakan bahwa kondisi daerah asal yang menyebabkan individu mengalami ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhannya, memberikan tekanan stress yang mempengaruhi keputusan individu untuk bermigrasi.

Lewis (Todaro, 2006) yang menjelaskan perpindahan tenaga kerja antara dua sektor, yakni sektor tradisional yang ada di perdesaan menuju sektor industri modern yang ada di kawasan perkotaan. Dengan demikian, pekerja akan melakukan migrasi dari sektor yang berproduktivitas rendah menuju ke sektor yang berproduktivitas tinggi.

Pembangunan ekonomi akan mendorong transformasi struktural ekonomi, perubahan struktur perekonomian yang bergeser dari sektor tradisional pertanian ke sektor industri modern. Todaro (2006) berasumsi, bahwa terjadi transfer tenaga kerja dari sektor tradisional (pertanian) yang memiliki surplus tenaga kerja akan diserap ke sektor industri modern di kota yang memerlukan tenaga kerja disebabkan oleh ekspansi produksi di sektor modern.

Lebih lanjut dikemukakan, bahwa proses pertumbuhan dan perluasan *output* di sektor industri akan terus berlangsung untuk pening-

katan penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor industri. Dengan demikian, akan menyebabkan migrasi pekerja yang terkonsentrasi ke wilayah perkotaan.

Saefullah (1996) menjelaskan jenis pekerjaan modern di perkotaan menjadi daya tarik bagi pekerja migran sebagai tenaga profesional untuk bekerja di sektor formal dan menetap di daerah perkotaan. Jenis pekerjaan di perkotaan membutuhkan tenaga kerja profesional dengan keahlian tertentu. Sedangkan, pekerja migran yang bekerja di sektor informal akan memilih untuk tidak menetap di daerah tujuan, karena jenis pekerjaannya memudahkan untuk berpindah.

Pengendalian pertumbuhannya dan pemerataan penduduk, untuk mengontrol jumlah penduduk di suatu wilayah. Kuantitas jumlah penduduk yang terkendali diharapkan akan mengurangi masalah kependudukan terutama mengenai pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya laju pertumbuhan penduduk akan menghambat penduduk untuk dapat memperbaiki kualitas kehidupannya karena banyaknya penduduk akan menimbulkan banyak tekanan-tekanan dalam bidang pemenuhan kebutuhan hidup penduduk. Dampaknya adalah permasalahan sosial, ekonomi dan bahkan permasalahan lingkungan hidup yang efeknya dapat dirasakan bagi generasi yang akan datang. Pemerataan penduduk ini dapat diatasi dengan melakukan migrasi ke daerah-daerah yang kepadatan penduduknya rendah. Hal ini juga untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang ada di tiap daerah.

Peningkatan kualitas penduduk, terutama dalam bidang pendidikan, dan kesehatan, sebagai hal dasar yang diperlukan untuk membangun penduduk ke arah yang lebih baik. Kualitas SDM yang baik akan mengubah paradigma berpikir terhadap suatu masalah.

Secara umum kebijakan kependudukan harus ditujukan untuk; (1) melindungi kepentingan dan mengembangkan kesejahteraan pen-

duduk, terutama generasi yang akan datang, karena apa yang terjadi saat ini pada lingkungan hidup manusia akan dirasakan dampaknya pada generasi berikutnya; (2) memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh kebebasan lebih besar untuk menentukan yang terbaik bagi kesejahteraan diri dan keluarganya; (3) kebijaksanaan harus diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup penduduk.

Oleh karena itu, kebijakan kependudukan memiliki sasaran pokok jangka panjang sebagai berikut: (1) menurunkan tingkat kelahiran, melalui usaha langsung dan tak langsung. Secara langsung melalui kegiatan penyebarluasan dan penyediaan sarana Keluarga Berencana (KB) serta usaha meningkatkan pengetahuan dan praktek KB. Usaha tidak langsung melalui usaha mendorong keluarga melaksanakan NK-KBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera); (2) menurunkan tingkat kematian, terutama anak-anak melalui bidang kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan, perumahan, penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan; (3) meningkatkan taraf hidup, yaitu meningkatkan umur rata-rata penduduk Indonesia; (4) penyebaran penduduk dan tenaga kerja yang serasi dan seimbang, melalui transmigrasi, pembangunan daerah, kota dan desa, pembangunan sarana perhubungan, dan pemerataan pembangunan.

Usaha pengurangan kelahiran ditempuh melalui usaha secara tak langsung berupa (1) persebaran penduduk, migrasi dan urbanisasi; (2) kegiatan penelitian, pengkajian serta pengembangan dalam upaya pembangunan kualitas penduduk; (3) pendidikan kependudukan; (4) peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksana.

Untuk mengatasi masalah penyebaran penduduk yang tidak merata, pemerintah membuat kebijakan dengan mencanangkan program transmigrasi. Fungsi dari transmigrasi ini adalah (1) transmigrasi merupakan cara untuk menyebarkan dan pemeratakan penduduk; (2) fungsi ekonomis, pemanfaatan sumber-sumber ekonomi di luar dae-

rah; (3) fungsi pengatur keseimbangan antara kependudukan dan lingkungan hidup; (4) fungsi pembinaan bangsa, pembauran masyarakat antar suku; (5) fungsi pertahanan dan keamanan nasional.

Sosial Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk

Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Dalam pembahasannya sosial dan ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang berbeda. Dalam konsep sosiologi manusia sering disebut dengan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan.

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat, yakni (1) tingkat Pendidikan; (2) jenis pekerjaan; (3) tingkat pendapatan; (4) keadaan rumah tangga; (5) tempat tinggal; (6) kepemilikan kekayaan; (7) jabatan dalam organisasi; dan (8) aktivitas ekonomi.

Tingginya pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingginya tingkat fertilitas, sementara tingkat fertilitas dipengaruhi oleh rendahnya usia kawin pertama. Oleh karena itu fertilitas dapat dikendalikan dengan cara memperhatikan faktor usia ibu saat pertama kali menikah. Sementara itu, faktor penyebab rendahnya usia kawin pertama dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status pekerjaan, daerah tempat tinggal, dorongan orang tua, kemauan sendiri, terpaksa kawin (*marriage by accident*), teknologi, dan lingkungan pergaulan.

Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa, faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering ditemui di lingkungan masyarakat yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Pernikahan usia muda dapat terjadi pada keluarga yang hidup digaris kemiskinan, sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki dari keluarga yang dianggap mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting sebagai penentu kualitas sumberdaya manusia. Hal ini berkaitan dengan penggunaan indikator pendidikan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penyebab dari adanya kecenderungan menikahkan anak yang masih dibawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan orang tua, anak serta masyarakat.

3. Faktor Pekerjaan

Status pekerjaan seseorang sebelum memutuskan untuk menikah adalah salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. Apabila seseorang tidak memiliki pendapatan atau pekerjaan maka kecenderungan mengambil keputusan untuk segera menikah, agar tidak menjadi beban dalam keluarga.

4. Faktor Daerah Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan lokasi dimana seseorang bernaung. Daerah tempat tinggal ini juga dapat mempengaruhi keputusan perempuan menikah muda. Daerah tempat tinggal dibagi menjadi dua yaitu daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan cenderung memiliki pengetahuan yang lebih sempit dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan sehingga pengetahuan tentang buruknya pernikahan dini masih sangat minim. Masyarakat pedesaan juga masih cenderung memegang teguh adat istiadat daerahnya.

Sosial budaya dan Pertumbuhan penduduk

Tidak ada kebudayaan yang statis, semua kebudayaan mempunyai dinamika dan gerak. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi oleh karena mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lain. Terjadinya gerak/perubahan disebabkan oleh beberapa hal, yakni (1) sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat dan kebudayaan sendiri, misalnya perubahan jumlah dan komposisi penduduk; (2) sebab-sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Masyarakat yang hidupnya terbuka, yang berada dalam jalur-jalur hubungan dengan masyarakat dan kebudayaan lain, cenderung untuk berubah lebih cepat. Perubahan kebudayaan terjadi apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.

Beberapa masalah yang menyangkut proses perubahan kebudayaan antara lain, (1) unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima; (2) unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima; (3) individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur baru; (4) ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut. Secara sederhana hubungan antara manusia dan kebudayaan, adalah manusia sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan manusia.

Manusia menciptakan kebudayaan, dan setelah kebudayaan itu tercipta, maka kebudayaan mengatur hidup manusia agar sesuai dengannya. Tampak bahwa pada akhirnya, keduanya merupakan satu kesatuan. Contoh sederhana yang dapat kita lihat adalah hubungan antara manusia dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan. Pada

awalnya peraturan itu jadi, maka manusia yang membuatnya harus patuh terhadap peraturan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan, karena kebudayaan itu merupakan perwujudan dari manusia itu sendiri. Apa yang tercakup dalam suatu kebudayaan tidak akan jauh menyimpang dari kemauan manusia yang membuatnya.

Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor, diantaranya komunikasi; cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain, seperti penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ada pula beberapa faktor yang menghambat terjadinya perubahan, misalnya kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan masyarakat lain; perkembangan IPTEK yang lambat; sifat masyarakat yang sangat tradisional; ada kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat dalam masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan ideologis; dan pengaruh adat atau kebiasaan. Semua unsur-unsur budaya di atas dapat berdampak pada perubahan jumlah penduduk suatu negara atau daerah tertentu.

Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial budaya, dan Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dimana tiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Provinsi Sulawesi Selatan Misalnya di mana didominasi Suku Bugis-Makassar, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.426.867 jiwa pada tahun 2018, masing-masing 4.691.321 laki-laki dan 4.735.564 perempuan.

puan. Adapun faktor- faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah penduduk, salah satunya adalah faktor budaya. Suku Bugis-Makassar menganut garis keturunan ayah yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus menerus. Nilai anak dalam prinsip hidup keturunan adalah laki-laki. Anak laki-laki merupakan kekayaan utama bagi Suku Bugis-Makassar, sehingga memungkinkan suatu rumah tangga belum akan berhenti menambah anak lagi sebelum mereka mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris ayah.

Hal yang sama juga kita dapat jumpai pada masyarakat Batak Toba, di mana menganut sistem keturunan patrilineal yakni menurut garis keturunan laki-laki (ayah). Garis laki-laki diteruskan oleh anak laki-laki yang dilahirkan. Sistem keturunan patrilineal menjadi tulang punggung masyarakat Batak dalam melanjutkan keturunan, marga, kelompok suku, yang semuanya saling berhubungan menurut garis laki-laki. Anak laki-laki sangat berarti kehadirannya dalam suatu keluarga karena merupakan penerus keturunan ataupun marga dalam silsilah keluarga. Bahkan apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki maka itu dianggap aib yang dapat mengancam puasanya silsilah keluarga tersebut karena marga tidak akan diturunkan lagi.

Dahulu, jika dalam sebuah perkawinan tidak melahirkan keturunan atau tidak juga mendapatkan anak laki-laki, maka si suami akan melakukan poligami dan jika tidak ingin berpoligami yakni dengan cara mengadopsi anak. Begitu besar usaha masyarakat Batak Toba untuk mendapatkan keturunan utamanya mendapatkan anak laki-laki dalam mempertahankan nama marga.

Dengan pandangan budaya yang seperti itu, tentu saja akan berdampak pada tingginya fertilitas, sehingga akan berdampak positif terhadap tingginya angka pertumbuhan penduduk alami.

Kebijakan Kependudukan

Program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui penurunan fertilitas telah berlangsung cukup lama. Pada tahun 1970 TFR mencapai 5,6 menjadi semakin turun seiring dengan kencangnya program KB dari periode ke periode hingga mencapai 2,6 pada tahun 2000, dan turun menjadi 1,49 persen pada tahun 2018. Dari ide Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (KKBS) menjadi sebuah Norma (NKKBS) yang diterima dan dipraktekkan oleh sebagian besar keluarga pasangan usia subur. Program KB sempat terseok (mengalami stagnasi) pada pasca orde baru, namun keberhasilan program KB telah menyebabkan terjadinya perubahan komposisi penduduk di masing-masing provinsi menurut struktur umur.

Meskipun pada awal pelaksanaan KB, penduduk lansia (>64 tahun) yang purna produktif proporsinya sangat kecil (<5%), namun karena penduduk usia muda (0-14 tahun) yang belum produktif proporsinya sangat besar (>35%), mengakibatkan angka ketergantungan (*Dependency Ratio*, DR) Indonesia sangat tinggi, berada pada kisaran 65-68.

Keberhasilan program KB mengakibatkan penduduk 0-14 tahun semakin sedikit proporsinya, namun pada saat yang sama proporsi penduduk lansia belum meningkat, sehingga terjadi angka DR semakin mengecil, sebagai akibat semakin besarnya proporsi penduduk usia produktif (15-64) tahun. Kondisi semakin besarnya proporsi usia produktif (15-64) disebut Peluang Bonus Demografi, dimana setiap dua orang penduduk produktif hanya menanggung satu orang atau kurang penduduk yang tidak produktif.

Namun disisi lain, semakin tinggi proporsi penduduk usia 65 ke atas peluang bonus demografi akan terlewati, sehingga kita terbayang

sebuah piramida penduduk yang terbalik. Jadi DR yang rendah pelan-pelan akan kembali meningkat ketika wilayah tersebut mulai memasuki era atau periode aging, yakni ketika proporsi penduduk purna produktif semakin tinggi (>10%).

Era peluang bonus Demografi (DR<50), adalah era untuk menggenjot produktivitas dan pengendalian pengeluaran konsumsi dalam rangka pembentukan investasi yang bersumber dari tabungan, yang akan dibutuhkan oleh penduduk pada periode aging. Investasi diperuntukkan untuk peningkatan mutu kesehatan, mutu pendidikan, peningkatan karakter penduduk di suatu wilayah untuk mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, kemuanya ini merupakan faktor-faktor penentu perubahan jumlah penduduk di suatu daerah.

Faktor utama yang harus dicermati adalah keberhasilan dalam pengendalian fertilitas, baik sekarang dan terutama sekali pada masa yang akan datang. Penduduk Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai masyarakat perantau sejak nenek moyangnya menjadi faktor penentu dalam perkembangan jumlah penduduk Sulawesi Selatan sekarang, di mana pada tahun 2017 penduduk Sulawesi Selatan tercatat 9.490.123 jiwa menurun menjadi 9.426.885 jiwa pada tahun 2018. Penurunan ini sudah pasti bukan karena penurunan penduduk alami (fertilitas minus mortalitas), tetapi karena Sulawesi Selatan mengalami surplus migrasi ke luar pada periode tahun 2017-2018.

Daftar Pustaka

- Becker, G. S. (1993). *Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, Third Edition, Chicago: The University of Chicago Press
- Elda, L. P & Racmanina, L. (2013). “*Do They Look for Informal Jobs?: Migration of the working age in Indonesia.*” Paper prepared for

the 27th IUSSP International Population Conference, Busan, Korea, 26-31 August 2013.

- Roswita, H (2009) "***Analisis Karakteristik Pekerja Komuting dan Non Komuting Di Kota Medan.*** Jurnal Vol. 6 no. 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/15871>
- Saefullah, A. D. (1996). "***Mobilitas Internal Nonpermanen***", dalam ***Mobilitas Penduduk di Indonesia, Kantor Menteri Kependudukan/BKKBN dan Lembaga Demografi*** – Fakultas ekonomi Universitas Indonesia. Hlm 89-112. Jakarta
- Siegel, J. S. & Swanson. D. A. (ed). (2004). ***Method and Material of Demography.*** 2nd edition. USA: Elsevier Academic Press.
- Susilowati, S. (2008). "***Dampak Mobilitas Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan***". Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian Bogor. [http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(10\)%20soca-sriherisusilawat-mobilitas](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(10)%20soca-sriherisusilawat-mobilitas)
- Todaro, Michael, P. (2006). ***Economic Development in The Third World,*** Published by Longman Group Limited, London, UK.
- Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan., 2018. ***Buku Data Kependudukan Provinsi Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan.***
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN,. 1995. ***Transisi Demografi, Transisi Pendidikan, dan Transisi Kesehatan di Indonesia.***

Bab II

Dampak dan Implikasi Perkembangan Kependudukan di Indonesia Bagian Tengah

*Madris
Abdul Rahman*

Dampak Perkembangan Kependudukan

Secara nasional penduduk Indonesia masih akan terus bertambah dalam jumlah yang cukup besar dari tahun ke tahun, termasuk di daerah-daerah di Kawasan Indonesia Bagian Tengah. Penduduk Indonesia diperkirakan baru berhenti mengalami pertambahan terus menerus setelah tahun 2050, pada saat mana penduduk Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 350 juta jiwa. Sampai dengan tahun 2035, Indonesia diproyeksikan akan menampung 305, 652 juta jiwa dari 255,461 yang ada sekarang (2015), sementara di Kawasan yang dikaji dalam studi ini akan memiliki penduduk sebesar 46,261 juta (2035), meningkat dari 36,738 juta pada tahun 2015. Pertambahan penduduk

sebanyak hampir 10 juta dalam kurun waktu 20 tahun ini, akan akan membawa dampak dan implikasi yang luas terhadap kehidupan masyarakat serta proses pembangunan selanjutnya.

Meskipun persentase penduduk di sepuluh daerah di Kawasan Indonesia tengah ini secara total relatif kecil terhadap jumlah seluruh penduduk Indonesia, yakni hanya 14,38 persen tahun 2015, dan akan menjadi 15,13% pada tahun 2035, namun terlihat bahwa laju atau kecepatan pertumbuhan penduduk di Kawasan ini lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dampak dinamika pertumbuhan kependudukan terhadap kondisi kehidupan sosial ekonomi di masing-masing daerah yang bersangkutan diperkirakan akan lebih besar, termasuk akan berimplikasi luas terhadap kebijakan dan program-program pembangunan yang akan diambil.

Dampak yang paling umum dan segera dapat dirasakan adalah terjadinya penurunan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup terhadap kehidupan masyarakat. Penurunan daya dukung dimaksud dapat dilihat antara lain makin berkurangnya rasio penduduk dan lahan pertanian pada kawasan-kawasan pertanian/perdesaan, demikian pula makin sempitnya ruang pemukiman yang tersedia secara layak bagi pertumbuhan penduduk di perkotaan. Sebagai gambaran umum, kalangan ahli mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk secara universal dewasa ini, menyebabkan kapasitas daya tampung bumi sudah mencapai 1,8 kali dari seharusnya (Tjip-toherijanto, 2013).

Dampak umum lainnya, adalah meningkatnya permintaan terhadap lapangan kerja yang remuneratif, meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas dan pelayanan sosial terutama pendidikan dan kesehatan. Di lain pihak beban pemenuhan kebutuhan bahan-bahan pokok keluarga sehari-hari akan terus meningkat, serta kebutuhan terhadap

pelayanan publik oleh aparat pemerintah juga akan semakin meningkat. Ketidakmampuan dalam memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, selain akan berdampak pada kemiskinan dan keterbelakangan yang mungkin meningkat., juga pada gilirannya menjadi kondisi yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk instabilitas sosial, seperti maraknya kriminalitas, konflik-konflik antar kelompok masyarakat, dan lain-lainnya.

Beberapa daerah di Kawasan ini yang menunjukkan proyeksi angka pertumbuhan penduduk yang jauh lebih tinggi dari daerah lainnya, apalagi dibandingkan dengan tingkat nasional, adalah Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Khusus dalam kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur, faktor utama yang menyebabkannya adalah masih tingginya angka kelahiran penduduk, mengingat daerah ini juga termasuk daerah yang penduduknya banyak melakukan migrasi keluar. Sedangkan tiga daerah lainnya, selain karena angka kelahiran tinggi yang juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan, namun faktor yang lebih berpengaruh adalah besarnya jumlah penduduk pendatang dari daerah lain. Oleh karena itu, selain implikasi kebijaksanaan yang relatif sama bagi semua daerah, terdapat aspek-aspek tertentu yang seyogyanya mempunyai implikasi kebijakan yang berbeda.

Guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk bagi semua daerah agar mencapai angka pertumbuhan ideal yakni *Total Fertility Rate* (TFR) rata-rata 2,1 sesuai dengan target nasional, maka pengendalian angka kelahiran melalui program keluarga berencana nasional harus tetap diperkuat dengan program-program terpadu di bawah koordinasi pemerintah, yang dibarengi dengan peningkatan gerakan masyarakat melalui kampanye peningkatan kesadaran berperilaku kependudukan yang kondusif mendukung tercapainya norma keluarga kecil yang bagian dan sejahtera.

Adapun daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan tinggi terutama karena faktor migrasi masuk yang besar, kebijakan pembangunan yang lebih diperlukan adalah perluasan kesempatan kerja melalui kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif, selain kebijakan penyediaan fasilitas untuk peningkatan kualitas SDM yang memadai seperti lembaga pendidikan maupun latihan-latihan kerja.

Dampak sosial ekonomi yang lebih spesifik serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan, akan terlihat lebih jelas dan lebih fokus apabila didasarkan pada analisis menurut kelompok-kelompok penduduk sebagai berikut:

Dampak dan Pertumbuhan Penduduk Umur (0–14) Tahun

Uraian terdahulu menunjukkan bahwa secara nasional, maupun menurut daerah-daerah dalam studi ini, proporsi penduduk usia anak-anak (0-14 tahun) akan mengalami penurunan secara bertahap, meskipun angka proporsi pada tingkat daerah pada umumnya terlihat lebih tinggi pada setiap tahapan proyeksi. Satu-satunya daerah yang akan mengalami persentase anak-anak lebih rendah dari rata-rata nasional adalah Sulawesi Utara, dan dua daerah lainnya yakni Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan akan menunjukkan angka proporsi yang kurang lebih sama dengan angka nasional. Sedangkan daerah-daerah lainnya menunjukkan proporsi yang secara signifikan lebih tinggi, bahkan yang paling tinggi adalah Sulawesi Barat. Kecenderungan penurunan proporsi anak-anak ini, sebenarnya merupakan kecenderungan universal di berbagai negara, sejalan dengan berlangsungnya kegiatan pembangunan sosial ekonomi di negara tersebut. Hanya angka penurunannya yang mungkin berbeda antara satu wilayah dengan yang lain. Penurunan ini pada dasarnya sejalan dengan penurunan angka fertilitas di wilayah yang bersangkutan. Dalam berbagai survei

internasional, Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya seperti Mexico dan Thailand menunjukkan penurunan persentase penduduk usia 0-14 tahun terjadi relatif lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya seperti di Afrika dan Asia Selatan.

Kecenderungan yang dapat disimpulkan dari hasil proyeksi tersebut adalah bahwa pada masa sekarang serta masa-masa yang akan datang, angka persentase jumlah penduduk anak-anak sudah mencapai angka yang cukup proporsional dan ideal, yang memungkinkan beban tanggungan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan anak-anak secara kuantitas akan semakin berkurang, dan sebaliknya akan berge-ser pada beban pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas anak.

Pada unit kehidupan masyarakat yang paling dasar yakni unit keluarga, hasil proyeksi tersebut menunjukkan bahwa proporsi anak-anak akan makin kecil dan proporsi orang dewasa akan semakin besar dalam struktur keluarga Indonesia. Beberapa kondisi kehidupan keluarga akan berubah dengan perubahan struktur tersebut, antara lain: kaum ibu akan memiliki waktu luang yang lebih banyak dari fungsi dan tanggung jawab pengasuhan anak, terutama anak-anak yang masih kecil. Karena beban dimaksud berkorelasi dengan jumlah anak-anak yang ada dalam keluarga. Dengan demikian akan makin tersedia waktu yang cukup bagi orang tua, dan khususnya kaum ibu untuk meningkatkan partisipasinya dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarganya.

Akan tetapi di lain pihak, semakin sedikit jumlah anak-anak, akan berimplikasi pada makin besarnya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengasuhan anak, agar anak-anak tersebut dapat tumbuh menuju kedewasaan dengan kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik. Kebutuhan-kebutuhan dimaksud meliputi pemenuhan gizi yang cukup untuk menjamin pertumbuhan fisik anak secara normal, perawatan kesehatan yang prima, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan

untuk mempersiapkan kecerdasan serta keterampilannya sebelum dewasa. Gambaran perubahan struktur keluarga, serta implikasinya tersebut, secara makro atau agregat akan terjadi pada tingkat masyarakat atau wilayah.

Uraian tentang implikasi dari proyeksi penduduk anak-anak tersebut akan lebih jelas apabila anak-anak yang berada dalam rentang umur dimaksud dikelompokkan menurut tahap atau siklus hidupnya yang meliputi: bayi (usia kurang dari satu tahun), kelompok anak-anak bawa lima tahun (balita) yakni usia kurang dari lima tahun, serta anak-anak usia sekolah, yakni 6 – 14 tahun.

Penurunan persentase penduduk usia kurang dari satu tahun (bayi) sangat dipengaruhi oleh penurunan tingkat fertilitas penduduk dalam tahun yang bersangkutan. Menurut data hasil proyeksi dalam Kawasan ini, sebagian besar daerah mengalami penurunan fertilitas dengan parameter TFR tidak jauh berbeda dengan tingkat nasional. Namun ada 3 (tiga) daerah yang masih menunjukkan angka TFR yang masih jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.

Penurunan porsi bayi dalam masyarakat, bermakna setiap pasangan keluarga akan memiliki anak yang semakin sedikit. Di samping berimplikasi pada semakin ringannya beban pengasuhan anak kecil secara kuantitatif pada keluarga yang bersangkutan, maka yang paling perlu mendapatkan perhatian adalah peningkatan kualitas pengasuhan anak-anak tersebut. Hal ini selain ditujukan untuk meningkatkan usia harapan hidupnya dan “menjamin” agar bisa bertahan hidup sampai dewasa, juga untuk memperbaiki mutu pertumbuhan fisiknya agar mencapai ukuran berat dan tinggi badan yang normal. Oleh karena itu, di samping upaya pemenuhan kebutuhan gizi yang harus menjadi prioritas pengasuhan, juga tidak kurang pentingnya adalah perawatan kesehatan yang mengiringi pertumbuhan anak. Dalam tahap pertum-

buhan ini, diperlukan kebijakan-kebijakan yang menjamin tersedianya bahan-bahan dan pelayanan kebutuhan dimaksud, meliputi kecukupan persediaan bahan makanan bayi yang sehat, pelayanan kesehatan seperti program imunisasi, tersedianya tempat-tempat atau pos pemantauan perkembangan pertumbuhan anak, dan tersedianya tenaga-tenaga kompeten yang cukup untuk memberikan pelayanan dimaksud. Berbarengan dengan itu, diperlukan penyebarluasan informasi yang cukup bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak bayi tentang perawatan bayi yang benar, termasuk peningkatan kesadaran untuk memberikan air susu eksklusif bagi bayi mereka. Guna menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan pelayanan dimaksud, maka peningkatan taraf sosial ekonomi keluarga menjadi unsur yang sangat penting. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan pada tingkat masyarakat serta komunitas-komunitas lokal yang berdampak pada perluasan peluang kaum ibu untuk aktif dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi produktif akan turut menentukan. Sebab hanya dengan kemampuan ekonomi keluarga yang baik, maka semua kebutuhan dan pelayanan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pengasuhan bayi dapat terpenuhi.

Pada tahap usia Bawah Lima Tahun (Balita), implikasi kebutuhan seperti yang diperlukan bagi anak-anak bayi, akan lebih meningkat dan bersifat akumulatif. Dalam tahap ini juga, konsep pelayanan “1000 hari pertama kehidupan anak” perlu dijabarkan dalam berbagai kebijakan yang terpadu. Dan secara bertahap, peranan masyarakat dan pemerintah semakin urgen. Anak-anak balita tidak hanya memerlukan pemenuhan kebutuhan gizi untuk mendukung pertumbuhan fisiknya yang sehat seperti pada bayi, tetapi sudah meningkat pada pemenuhan kebutuhan untuk pembentukan fondasi kecerdasan dan karakter secara dini menyongsong kehidupannya sebagai warga dewasa dan sumber daya manusia pembangunan. Oleh karena itu, selain ketersediaan

sarana prasarana dan lembaga pelayanan kesehatan yang tetap sangat mutlak diperlukan, maka diperlukan pula sarana prasarana dan lembaga pelayanan pendidikan usia dini yang merata, seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta perluasan fasilitas pendidikan Pra Sekolah Dasar lainnya seperti program-program Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak. Dalam hubungan ini, perlu disadari bahwa porsi peranan serta kapasitas keluarga-keluarga untuk memenuhi seluruh kebutuhan pengasuhan dan pelayanan anak balita dimaksud akan semakin berkurang, dan seyogianya dilengkapi dengan makin besarnya lembaga-lembaga luar keluarga oleh masyarakat bersama pemerintah. Ketidak berhasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup serta pelayanan sosial terhadap anak-anak dalam tahap ini, akan berdampak negatif secara luas di masa depan, bukan saja bagi anak-anak bersangkutan bersama keluarganya, namun juga akan menjadi kerugian yang besar bagi masyarakat secara umum. Karena akibatnya, dalam tahap periode tertentu masyarakat akan mengalami apa yang disebut “*lost generation*” (generasi yang hilang), yakni kondisi dimana sumber daya manusia terdiri atas generasi yang tumbuh dewasa secara fisik, tanpa basis kecerdasan dan karakter yang dapat memberi kontribusi positif bagi kesejahteraan hidup keluarga dan masyarakatnya.

Perkembangan jumlah anak-anak usia sekolah, yakni antara 6 sampai 14 tahun, membawa implikasi yang makin luas dan berat bagi keluarga, masyarakat dan pemerintah di daerah masing-masing. Hal ini terjadi karena, kebutuhan pemenuhan hidupnya sehari-hari, begitu pula kebutuhan pengembangannya sebagai generasi baru dalam masyarakat makin besar dan beragam, karena terakumulasi dari kebutuhan sejak lahir sampai memasuki usia sekolah. Tentu saja, kebutuhan yang paling menonjol dan paling utama dalam kelompok ini adalah kebutuhan yang mendorong peningkatan kualitas hidupnya, secara fisik maupun non-fisik, berupa pertumbuhan jasmani yang sehat, serta

perkembangan kecerdasan dan karakter individual yang handal. Oleh karena itu, implikasinya terhadap kebijakan pembangunan nasional dan daerah akan semakin luas. Perluasan sarana dan prasarana pendidikan dasar (sampai Kelas 9) menjadi fokus kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang mutlak harus menjadi prioritas bagi pemenuhan anak-anak kelompok usia ini.

Diperlukan kebijakan untuk memperluas ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat menjamin terwujudnya pemerataan mendapatkan pendidikan bagi setiap anak usia sekolah (*education for all*), terutama di daerah-daerah yang relatif masih tertinggal kinerja pembangunan pendidikan dasarnya, sehingga kebijakan wajib belajar pendidikan dasar yang sudah menjadi kebijakan nasional dapat dituntaskan pelaksanaannya. Demikian pula dalam tahap ini sudah harus dipikirkan desain pondasi sistem serta materi pendidikan yang perlu diberikan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan sumber manusia di kalangan generasi muda kita. Sistem dan materi pendidikan dimaksud harus relevan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat terhadap kompetensi sumberdaya manusia yang diperlukan, baik yang menyangkut kompetensi keahlian praktis (*hard competence*) maupun kompetensi sosial (*soft competence*). Hal ini dimaksudkan agar sejak memasuki proses pendidikan formal pada tahap-tahap awal, para anak-anak sudah mengawali perjalanan pembinaan kualitas SDM mereka secara benar dan terarah.

Penurunan jumlah penduduk (0-14) tahun akan berdampak terhadap penurunan penyediaan sarana pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD), sarana hiburan untuk anak, dan sarana bermain. Meskipun demikian, tetap perlu dicermati, bahwa anak yang lahir pada tahun 2015 misalnya, akan menjadi potensi sumber daya manusia (angkatan kerja) yang akan masuk ke pasar kerja pada tahun 2030-2035 yang akan datang. Jika tidak direncanakan

dengan baik, potensi SDM boleh jadi menjadi petaka SDM di masa yang akan datang.

Kemudian, semakin menurunnya proporsi penduduk usia sekolah dasar, dan usia sekolah menengah pertama. Kecenderungan demografis ini memberi peluang yang lebih besar bagi sektor pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan bukan pada jumlah sarana pendidikan, terutama di Provinsi Sulut, Kaltim, Kalsel, dan Sulsel. Namun beberapa provinsi lainnya masih sangat membutuhkan jumlah pendidikan yang lebih banyak, terutama Provinsi NTT, Sulbar dan Sultra.

Jika mencermati lebih jauh hasil proyeksi penduduk di sepuluh provinsi Indonesia Bagian Tengah, maka beberapa dampak yang akan timbul. Pertama, turunnya angka kelahiran mempunyai dampak menarik, yakni akan mempengaruhi jumlah penduduk di bawah lima tahun (balita), dan akan berdampak terhadap semakin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki masing-masing pasangan di NTT. Orangtua ke depan akan memiliki anak yang lebih “bermutu”, sebagai akibat semakin meningkatnya pengeluaran “rupiah” per anak untuk berbagai hal seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi dan bentuk hiburan lainnya. Namun jangan terlena, bahwa anak yang lahir hari ini akan mulai meramaikan pasar kerja lima tahun yang akan datang, dan jika tidak diurus dan direncanakan dengan baik bisa saja menjadi beban pembangunan di masa datang.

Dampak Pertumbuhan Penduduk Kelompok Usia 15-64 Tahun.

Pertumbuhan jumlah penduduk dalam kelompok usia ini (mencakup remaja dan dewasa), akan memberikan dampak yang paling besar dan luas terhadap berbagai sektor kehidupan penduduk secara umum. Karena selain proporsi jumlahnya yang paling besar yakni antara 65 – 70 persen dari total penduduk, juga karena perkembangannya akan

membawa perubahan dalam banyak dimensi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perlu dipahami, bahwa penduduk yang termasuk dalam kelompok ini, pada umumnya adalah mereka yang sebagian besar waktu dan aktivitasnya kelak dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan di luar rumah tangga, terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial ekonomi.

Melihat kelompok umur mereka, dapat dipandang bahwa mereka adalah kelompok yang sudah termasuk tenaga kerja, yang diharapkan menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat dan keluarganya sehari-hari. Dengan demikian, permasalahan utama yang secara umum akan muncul sebagai dampak pertumbuhan jumlah penduduk dimaksud, berfokus pada keterkaitan hidup mereka utamanya masalah ketenagakerjaan, masalah kehidupan rumah tangga sehari-hari, termasuk juga masalah sosial politik di tengah-tengah masyarakat. Sepanjang kebijakan pemerintah berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan hidup mereka, khususnya ketersediaan kesempatan kerja dan aktualisasi diri yang layak bagi mereka, maka pada dasarnya permasalahan yang menjadi dampak dari pertumbuhan populasi ini akan terpecahkan. Dan akan membawa peningkatan kesejahteraan baik bagi keluarganya maupun terhadap kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Namun demikian, di dalam kelompok besar penduduk ini, terdapat kelompok kritis (*critical group*) yang harus dicermati dinamika perkembangannya secara lebih spesifik, yakni kelompok penduduk remaja dan pemuda. Mereka adalah kelompok yang lazim dimasukkan dalam interval umur 15 – 24 tahun. Dimasukkan ke dalam kelompok kritis (*critical group*), karena dinamika kehidupan mereka sehari-hari akan lebih rentan terhadap berbagai kebijakan pembangunan, demikian pula sebaliknya, keberadaan, kondisi dan perilaku mereka sehari-hari, akan lebih banyak berdampak terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks kebijakan pembangunan bidang pendidikan, ke-

lompok ini merupakan pihak yang paling berkepentingan terhadap layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Sehingga kebijakan dan program pendidikan pada jenjang tersebut, harus serasi dengan dinamika pertumbuhan penduduk kelompok muda dimaksud, baik dari segi ketersediaan sarana prasarana pendidikan, keterjangkauan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, demikian pula dari segi bidang atau jenis pendidikan yang perlu dikembangkan bagi mereka. Ketersediaan kesempatan belajar yang tidak memadai, demikian pula ketidak sesuaian antara kebutuhan pendidikan mereka dengan program pendidikan yang diberikan, akan berdampak sangat besar terhadap kebijakan pembangunan sumberdaya manusia kita di kalangan generasi muda, dan berpotensi akan meluasnya dampak-dampak sosial yang tidak dikehendaki.

Di bidang ketenagakerjaan, kelompok penduduk ini merupakan tenaga kerja muda yang sudah atau bersiap-siap memasuki pasar kerja, baik yang ingin bekerja karena terpaksa putus sekolah, maupun yang memang sudah menyelesaikan pendidikan formalnya. Sehingga kebijakan perluasan maupun penciptaan kesempatan kerja baru merupakan issue pembangunan yang sangat krusial dengan perkembangan mereka. Situasi dan permasalahan yang muncul selama ini adalah masih terjadinya kesenjangan antara kondisi atau situasi di pihak mereka (aspek suplai tenaga kerja), dengan kebutuhan kegiatan ekonomi yang diharapkan menampung mereka (aspek *demand*). Di pihak tenaga kerja muda tersebut, persoalan umum yang dikeluhkan adalah kurangnya keterampilan dan pengalaman kerja yang dimiliki terutama bagi tenaga kerja muda yang putus sekolah. Sementara di kalangan mereka yang lulusan jenjang pendidikan tertentu, selain pengalaman kerja serta tingkat keterampilan, juga masalah kesesuaian latar belakang pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja (*mismatch*) sering kali menjadi

hambatan bagi penyerapan tenaga mereka. Sebagai salah satu alternatif jalan keluar untuk menanggulangi masalah ini, kehadiran kegiatan-kegiatan ekonomi non-formal serta usaha-usaha perseorangan, terutama di perkotaan menjadi sangat penting fungsinya sebagai penyerap tenaga kerja yang lebih fleksibel bagi tenaga kerja muda tersebut, walaupun dengan produktivitas dan penghasilan yang rendah.

Oleh karena itu, khusus dalam isu ketenagakerjaan di kalangan kaum muda, di samping kebijakan makro pembangunan ekonomi yang lebih bersifat ramah tenaga kerja (pro-job), maka kebijakan di bidang pendidikan dan pembinaan kompetensi seharusnya mendapatkan prioritas tinggi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan perluasan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan lanjutan (SMTA ke atas), demikian pula perbaikan sistem dan materi pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan keterampilan kerja dan karakter SDM yang handal sehingga dapat mempersiapkan mereka secara lebih efektif memasuki pasar kerja kelak. Selain itu, pendirian lembaga-lembaga pendidikan keterampilan seperti penyelenggaraan balai-balai Latihan Kerja, merupakan kebutuhan generasi muda yang berfungsi untuk menjembatani transisi mereka dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Di samping masalah pendidikan dan masalah ketenagakerjaan yang menjadi dua isu penting dalam perkembangan generasi muda, juga terdapat sejumlah aspek kehidupan sosial kemasyarakatan yang sangat erat hubungannya dengan dinamika kehidupan generasi muda tersebut. Baik yang muncul sebagai dampak dari ketidakberhasilan bidang pendidikan dan ketenagakerjaan memenuhi kebutuhan perkembangan mereka, maupun yang timbul sebagai dampak dari perkembangan lingkungan sosial di mana mereka berada.

Aspek-aspek dimaksud antara lain yang terpenting adalah perilaku sosial demografis mereka yang tidak kondusif bagi kebijakan pembangunan kependudukan, seperti kecenderungan kawin muda,

atau perilaku seks bebas (*free sex*). Aspek sosial lainnya yang mengancam kehidupan masa depan generasi muda adalah meluasnya penggunaan narkoba serta obat-obat terlarang lainnya. Seperti dikemukakan di atas, fenomena generasi muda ini, dapat muncul akibat kurang memadainya pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan dan kesempatan kerja, namun juga bisa muncul akibat dampak perkembangan lingkungan sosial yang tidak kondusif. Yang jelas, fenomena sosial yang negatif tersebut, dapat dipandang sebagai potensi ancaman yang menghantui kebijakan dan program-program pembinaan generasi muda di masa-masa yang akan datang.

Salah satu aspek dalam perilaku kependudukan di kalangan generasi muda yang masih cukup luas terjadi adalah kebiasaan kawin muda, yakni perkawinan yang dilakukan dalam usia yang secara fisik maupun mental belum dianggap cukup dewasa. Perkawinan muda dimaksud, terutama banyak dilakukan oleh kaum perempuan yang berusia antara 15 sampai 17 tahun, meskipun tidak sedikit pula di bawahnya. Faktor yang paling banyak melatarbelakangi fenomena kawin muda tersebut adalah masih rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan muda dalam kegiatan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang mengalami putus sekolah, sehingga kurang alternative kegiatan yang dapat menyerap waktu mereka. Dalam batas tertentu, faktor budaya masyarakat lokal yang memberikan nilai positif tinggi bagi remaja perempuan yang cepat menikah juga masih cukup berpengaruh mendorong masih kuatnya kebiasaan kawin muda. Fenomena yang demikian ini nampak terjadi lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Faktor lain yang turut mendorong masih tingginya fenomena kawin muda di kalangan generasi muda ialah pengaruh dari perilaku seks bebas pranikah, yang cenderung makin meluas di kalangan generasi muda, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Akibat meluasnya fenomena seks bebas pranikah tersebut, banyak yang berakibat

pada kehamilan remaja perempuan yang tidak diinginkan, dan kemudian menjadi alasan untuk terpaksa melakukan pernikahan dalam usia yang masih muda. Perilaku kawin muda ini akan berdampak lebih lanjut terhadap resiko-resiko yang tidak dikehendaki, seperti proses reproduksi yang tidak sehat, baik yang menjadi ancaman kesehatan bagi ibu muda maupun bagi anak-anak yang dilahirkan. Pada sisi yang lain, perkawinan dini yang terjadi di kalangan generasi muda, secara sosial ekonomi kurang mendorong terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis dan lestari.

Di sisi lain, proporsi penduduk usia produktif mengalami peningkatan yang signifikan. Secara nasional dari 67,3 persen (2015) menjadi 67,9 persen (2035). Pada tahun 2035 nanti angka proporsi usia produktif berdasarkan provinsi tertinggi berturut-turut Propinsi Kaltim, Kalsel, Gorontalo, NTT, dan Sulut, sementara yang terendah adalah Sultra dan Sulbar. Hal ini akan berdampak pada persoalan klasik, yakni persoalan pengangguran sebagai akibat hukum penawaran dan permintaan di pasar kerja di mana tidak terjadinya kondisi *full-employment*. Dari sisi penawaran tenaga kerja, maka mereka yang lahir hari ini akan menyerbu pasar kerja (pasar faktor produksi) paling lambat 20-25 tahun yang akan datang, sementara dari sisi permintaan tenaga kerja tidak dapat sepenuhnya diverifikasi dari pasar *output*, sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja (*excess supply of labor*) di pasar tenaga kerja. Persoalan pengangguran bukan persoalan tunggal, tetapi persoalan turunan dari kebijakan di bidang kependudukan, dan persoalan turunan dari kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, ketaatan hukum dan lain-lain.

Dampak Pertumbuhan Penduduk Usia 65 tahun ke atas (Lansia)

Secara linear, penduduk lanjut usia di kawasan ini menunjukkan peningkatan proporsi yang cukup signifikan dari periode ke periode.

Situasi ini merupakan dampak langsung dari peningkatan harapan hidup rata-rata penduduk di daerah tersebut, sebagai dampak positif makin menurunnya angka kematian bayi. Dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan, proporsi penduduk usia 65 tahun keatas di Kawasan ini akan meningkat rata-rata hampir dua kali lipat, yakni dari 4,5 persen (2015) menjadi 8,6 persen (2035), meskipun masih lebih rendah dari rata-rata nasional yang menunjukkan peningkatan dari 5,4 persen (2015) menjadi 10,6 persen (2035).

Terlihat satu provinsi yang akan mengalami peningkatan proporsi penduduk lansia paling cepat, bahkan melewati rata-rata nasional yakni Sulawesi Utara, dari 6,0 persen (2015) menjadi 12,0 persen (2035). Hal ini memperkuat uraian terdahulu mengenai situasi perkembangan demografis di provinsi ini yang relatif sudah kondusif dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Daerah lain yang juga menunjukkan lonjakan proporsi lansia yang cukup besar adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, di mana keduanya menunjukkan peningkatan hampir tiga kali lipat dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan. Adapun daerah-daerah lainnya, menunjukkan kecenderungan peningkatan yang moderat seperti halnya pada rata-rata nasional. Namun di lain pihak terdapat tiga daerah yang masih relatif rendah peningkatan proporsi penduduk lansianya, yakni Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi tenggara.

Perbedaan dalam peningkatan angka harapan hidup masing-masing daerah sebagaimana digambarkan terdahulu. Sebagai implikasinya, akan membutuhkan kebijaksanaan pembangunan yang juga berbeda dalam aspek tertentu antara satu dengan lainnya, meskipun secara umum juga menunjukkan implikasi kebijakan kependudukan yang sama dalam aspek-aspek kependudukan tertentu.

Situasi kependudukan yang muncul dari hasil proyeksi tersebut adalah makin besarnya jumlah penduduk yang mengalami proses pe-

nurunan berbagai aspek kehidupan, secara fisik maupun non-fisik, secara ekonomi, sosial dan budaya. Secara fisik, proses penuaan tersebut berakibat langsung pada makin berkurangnya daya fisik mereka, serta fungsi-fungsi organ tubuh untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari, bahkan semakin lama akan kehilangan kemampuan untuk beraktivitas secara normal dan bahkan membutuhkan bantuan orang lain untuk bergerak sehari-hari. Secara non fisik, mereka akan mengalami permasalahan-permasalahan kejiwaan yang mengubah orientasi kehidupan mereka dibandingkan ketika masih berusia lebih muda.

Secara ekonomi, mereka akan semakin mengalami penurunan kemampuan memproduksi untuk memperoleh income, sehingga lambat laun akan mengalami ketergantungan terhadap orang lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Secara sosial budaya, mereka akan semakin berkurang aktivitas sosial bersama dengan warga masyarakat lain, baik karena faktor fisik yang makin lemah, maupun karena semakin berkurangnya aktivitas di luar rumah yang dilakukan.

Permasalahan yang lebih serius akan timbul apabila sebagian besar dari penduduk usia lanjut dimaksud, berada dalam kelompok keluarga miskin, dan tidak mempunyai sumber-sumber jaminan sosial yang dapat meringankan beban kehidupan mereka. Situasi ini dapat mempunyai keterkaitan dengan pertumbuhan angka kemiskinan di daerah yang bersangkutan, seperti yang ditunjukkan dalam kasus di daerah-daerah Sulawesi tenggara, Nusa Tenggara Timur serta Sulawesi Tenggara dalam studi ini. Namun di lain pihak, Sehingga implikasi kebijakan terhadap kasus daerah semacam ini, harus mengintegrasikan antara program penanggulangan kemiskinan dengan program penyantunan penduduk lansia.

Kelompok penduduk lansia yang secara sosial ekonomi berada dalam keluarga yang lebih mampu, juga tidak sedikit menghadapi permasalahan hidup yang sulit dipecahkan sendiri bersama keluarga. Da-

lam keadaan fisik dan non-fisik yang makin kurang berfungsi, mereka akan banyak menggantungkan kehidupannya pada orang lain, khususnya dalam mendapatkan pelayanan serta perawatan, baik untuk menjalani kehidupan sehari-hari ataupun untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, meskipun secara ekonomi mereka tergolong mampu. Permasalahan ini, berimplikasi pada kebijakan perluasan pembangunan sarana prasarana yang memiliki fungsi pelayanan sosial terhadap penduduk lansia yang makin berkembang jumlahnya tersebut.

Di sisi lain, penduduk lansia di masa datang semakin “ringkih”. Penduduk lansia semakin ramai di pelayanan kesehatan, di pusat perbelanjaan, di tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya. Angka beban ketergantungan penduduk lansia semakin meningkat, sementara angka beban ketergantungan balita turun, berarti akan terjadi pergeseran dari beban untuk membiayai mereka yang masih muda yang potensial berproduksi ke beban untuk membiayai mereka yang sudah tua yang sudah tidak produktif, meskipun masih akan meramaikan pasar kerja di masa datang.

Hal yang menarik lainnya adalah jumlah dan komposisi penduduk lanjut usia yang semakin “ringkih (*fragile*)”, yakni penduduk yang diselamatkan dari kematian oleh kemajuan teknologi di bidang kesehatan (Ananta, 1991). Penduduk ringkih akan panjang umur, tetapi sakit-sakitan sehingga akan berimplikasi terhadap peningkatan biaya kesehatan (pengobatan) di masa yang akan datang. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Provinsi NTT, tetapi seluruh wilayah di IBT(Tengah).

Menurunnya angka-angka fertilitas di Indonesia berdasarkan hasil proyeksi 2015-2035 akan berdampak pada penurunan angka pertumbuhan penduduk secara alami. Di samping itu, juga akan disertai perubahan komposisi umur, di mana bergeser dari umur muda ke umur tua. Komposisi penduduk umur (0-14) tahun akan menurun,

akan berimplikasi pada penduduk usia prasekolah (5-6) tahun, penduduk usia sekolah (7-12) tahun, termasuk penduduk usia wajib sekolah (13-15) tahun. Di sisi lain, jumlah penduduk lanjut usia (*aging population*) semakin bertambah dan komposisinya semakin meningkat, namun angka ketergantungan (*dependency ratio*) semakin menurun, mengakibatkan bonus demografi semakin meningkat.

Puncak bonus demografi di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada rentang periode 2020-2030, namun patut disayangkan tren penurunan jumlah penduduk tidak berlangsung terus-menerus sejak program KB digulirkan pada awal tahun 1970. Boleh dikatakan Indonesia pernah “gagal” melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk ketika euforia reformasi membawa konsekuensi terjadinya perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi (Jurnal Keluarga, 2012).

Penduduk secara absolut tetap akan mengalami penambahan sampai pada kondisi terjadinya pasca transisi demografi benar-benar tercapai. Bertambahnya jumlah dan perubahan komposisi umur penduduk akan berimplikasi secara multiplier dan multidimensional, baik secara langsung, maupun secara tidak langsung melalui dimensi-dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Dari segi sosial dan ekonomi akan berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur transportasi, energy listrik, air bersih, dan pelayanan jasa, serta penyediaan lapangan kerja. Termasuk peningkatan penanganan yang ditimbulkan oleh persoalan politik, hukum, norma sosial, agama, dan lain-lain.

Implikasi Proyeksi Angka Kematian Bayi

Dalam analisis mengenai hasil proyeksi pertumbuhan penduduk menurut struktur umur terdahulu, telah banyak disinggung juga mengenai angka kematian bayi dikaitkan dengan laju pertumbuhan

penduduk serta kaitannya dengan proyeksi angka harapan hidup dan proporsi penduduk lanjut usia (lansia).

Analisis situasi kependudukan berdasarkan proyeksi angka kematian bayi dipandang sangat penting, karena fenomena kematian bayi mengandung implikasi terhadap permasalahan dan kebijakan pembangunan yang sangat luas. Peristiwa kematian bayi sangat berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat sekitarnya, meliputi perkembangan taraf kesejahteraan sosial ekonomi, termasuk aspek-aspek sarana-prasarana pelayanan sosial, demikian pula faktor lingkungan hidup lainnya. Oleh sebab itu, pengukuran *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia yang dijadikan rujukan PBB, memasukkan unsur kematian bayi dan angka harapan hidup sebagai salah satu indikator utama.

Kondisi kehidupan sosial ekonomi keluarga bayi, menjadi faktor paling penting terhadap kesehatan dan keberlangsungan hidup bayinya, karena hal itu berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan perawatan bayi. Kondisi ini hanya dimungkinkan terjadi apabila kondisi perekonomian masyarakat dapat menyediakan sumber penghasilan yang cukup bagi para keluarga yang bersangkutan. Di sisi yang lain, perkembangan sosial ekonomi masyarakat akan mempengaruhi ketersediaan berbagai kegiatan dan lembaga-lembaga pelayanan yang menyentuh masalah kesehatan serta kelangsungan hidup bayi, seperti pelayanan ibu hamil dan persalinan, pelayanan pasca persalinan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain, termasuk pelayanan sumber informasi yang relevan dengan itu.

Hasil proyeksi di Kawasan Indonesia Bagian Tengah menunjukkan bahwa di tahun-tahun yang akan datang angka kematian bayi akan tetap lebih tinggi dari tingkat nasional, meskipun secara bertahap semuanya akan mengalami penurunan dari tahap ke tahap berikutnya.

Yang lebih penting lagi, bahwa di antara sepuluh provinsi dalam Kawasan ini, terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara kelompok daerah yang memiliki tren penurunan AKB yang sudah cukup baik, dengan kelompok daerah lainnya yang masih menunjukkan angka yang kurang menggembirakan. Daerah-daerah yang telah cukup berhasil dalam penurunan AKB nya, dalam arti sudah relatif sejajar dengan tingkat nasional, bahkan lebih rendah lagi, adalah Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Menyusul daerah-daerah lain yakni Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sebaliknya daerah yang menunjukkan proyeksi AKB yang masih jauh di atas nasional adalah Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, menyusul Sulawesi Tengah dan Kalimantan selatan.

Dalam berbagai hasil survei lapangan maupun literature, secara umum dikemukakan bahwa tingkat kematian bayi berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan penduduk, semakin tinggi angka kemiskinan semakin tinggi pula angka kematian bayi. Atau berkorelasi negatif dengan tingkat kemajuan sosial ekonomi penduduk. Oleh karena itu, hasil proyeksi di atas dapat menjadi indikator keterbelakangan sosial ekonomi beberapa daerah yang dikemukakan di atas, serta menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah yang bersangkutan. Mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan bayinya relatif masih amat rendah, termasuk kemampuan untuk mengakses berbagai tempat-tempat pelayanan untuk perawatan ibu dan bayi. Di lain pihak, keterbelakangan pembangunan sosial ekonomi masyarakat, juga dapat dicerminkan oleh masih terbatasnya ketersediaan tempat maupun fasilitas pelayanan sosial yang dapat mempercepat penurunan angka kematian bayi.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan pembangunan yang dipandang relevan dengan situasi ini meliputi dua aspek utama. Pertama, kebijakan yang lebih bersifat mendasar, yakni meningkatkan kemam-

puan keluarga-keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya, terutama anak-anak usia dini, melalui perluasan kesempatan memperoleh penghasilan tetap yang mencukupi. Ini berkaitan dengan kebijakan pembangunan yang *pro-job* dan *pro-poor*. Dan ini adalah kebijakan yang efektifitasnya dapat menjangkau akar permasalahan di balik itu, yaitu penanggulangan kemiskinan yang masih cukup tinggi di Kawasan ini. Kedua, pada saat yang sama, pihak pemerintah menginisiasi dan memperluas ketersediaan tempat-tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan sarana dan prasarana yang memadai dan terjangkau. Termasuk di dalamnya adalah penyiapan tenaga-tenaga yang bertugas melakukan pelayanan proses reproduksi yang dimaksud, seperti tenaga medis dan paramedis yang terlatih. Di pihak lain, di daerah-daerah di mana peranan penolong persalinan tradisional (dukun beranak) masih cukup menonjol seperti di Sulawesi Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka kebijakan pelayanan dapat diperluas menjangkau peningkatan kompetensi teknis bagi dukun-dukun tradisional dimaksud dengan metode persalinan yang lebih aman dan higienis. Berbarengan dengan itu, penyebarluasan informasi yang relevan dengan itu perlu diperluas, seperti informasi yang mengandung kampanye penggunaan Air Susu Ibu Eksklusif, serta petunjuk-petunjuk perawatan anak yang lebih baik. Dalam mendorong penurunan AKB lebih cepat, maka sinergi antara potensi-potensi dalam masyarakat dengan kewenangan serta sumber-sumber daya dan dana yang berasal dari pemerintah daerah maupun pusat, perlu lebih disinergikan.

Di sisi lain, penduduk usia (0-14) tahun akan menurun sebagai akibat menurunnya angka fertilitas (TFR) dalam periode yang sama. Sedangkan jumlah penduduk usia produktif (15-64) tahun dan penduduk lansia (65 tahun) ke atas akan mengalami peningkatan sebagai akibat menurunnya angka kematian kasar (CDR). Kemudian semakin menurunnya angka kematian bayi, yakni dari 25 per 1000 kelahiran

hidup pada tahun (2015-2020) ke 21 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2030-2035 akan mengakibatkan semakin tingginya angka harapan hidup saat lahir. Kondisi ini akan berdampak pada penyediaan sarana dan prasarana secara umum, dan secara khusus untuk usia balita, usia sekolah, usia produktif, dan usia lansia.

Fenomena yang menarik lainnya sebagai akibat meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, terutama misalnya Provinsi Kaltim, Sulbar, Sultra, dan NTT, dimana provinsi ini memiliki angka pertumbuhan penduduk di atas 1,0 pada tahun 2035 (Nasional 0,62) adalah akan berdampak pada semakin tingginya angka kepadatan penduduk (jiwa/km²). Semakin tingginya angka kepadatan penduduk akan berimplikasi terhadap semakin sempitnya lahan produktif sektor pertanian sebagai akibat semakin meningkatnya permintaan lahan permukiman penduduk, infrastruktur sosial, ekonomi, dan transportasi. Kegiatan ekonomi penduduk akan bergeser dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder (industri manufaktur), dan sektor tersier (jasa).

implikasi perkembangan penduduk

Ada tiga elemen utama tantangan kependudukan Indonesia dewasa ini, yakni masalah kuantitas, kualitas, dan penyebaran yang timpang. Saat ini Indonesia merupakan negara keempat terpadat di dunia dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Kualitas sumberdaya manusia relatif rendah, dimana IPM Indonesia di urutan 124 (2010). Untuk itu Indonesia harus memiliki “*Grand Design*” kependudukan, yakni menyangkut tentang fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk. Sehingga akan tercipta penduduk tumbuh seimbang (*stationary population*) menuju penduduk tanpa pertumbuhan, yakni $NRR=1$ (Syarief, 2011).

Penduduk dapat dipandang dari dua sisi, yakni sebagai produsen (faktor produksi) dan sebagai konsumen. Permintaan penduduk

sebagai faktor produksi (tenaga kerja) ditentukan oleh jumlah (*output*), struktur ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh jumlah, struktur, dan laju pertumbuhan investasi, baik investasi swasta, maupun investasi pemerintah melalui APBN dan APBD provinsi/kabupaten/kota, di samping faktor-faktor lain sebagai faktor produksi.

Di sisi lain, penduduk sebagai konsumen, membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana, baik dalam bentuk barang, maupun dalam bentuk jasa, baik dalam bentuk barang antara (*raw material*), maupun barang siap saji. Permintaan barang dan jasa oleh konsumen ditentukan oleh jumlah penduduk, komposisi umur, dan faktor-faktor lain seperti struktur sosial, ekonomi, dan masyarakat.

Dengan demikian kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk akan berimplikasi terhadap dinamika kependudukan (jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan komposisi penduduk). Kemudian dinamika kependudukan akan berimplikasi terhadap aspek pembangunan (ekonomi, sosial/pendidikan, budaya, politik, dan lingkungan alam). Lalu pembangunan akan berimplikasi terhadap variabel demografi (kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk). Kebijakan di bidang pembangunan akan berimplikasi secara timbal-balik (simultan) dengan kebijakan di bidang kependudukan (Ananta, 1991a), sehingga masing-masing pihak pemangku kebijakan dapat bergerak secara simultan.

Penanganan Penduduk Balita dan Usia Sekolah.

Turunnya angka kelahiran di hampir semua propinsi di Tengah, terutama Provinsi Sulut, Kalsel, Sulsel, dan Gorontalo mempunyai dampak menarik, yakni semakin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki pasangan di keempat provinsi tersebut. Semakin sedikitnya jumlah anak per satu pasangan keluarga, maka dengan pendapatan tertentu,

orang tua kini akan lebih banyak mengeluarkan “rupiah” per anak, baik untuk pengeluaran konsumsi yang bergizi, pakaian yang cukup, pendidikan, kesehatan, dan hiburan, sehingga anak masa depan akan semakin berkualitas. Di samping itu pengeluaran rumah tangga per anak relatif rendah untuk pendapatan tertentu, sehingga biaya investasi (*human capital*) per anak relatif rendah, dan akan berdampak pada mutu sumberdaya manusia di masa datang.

Sebalik provinsi yang angka fertilitasnya masih tinggi, maka beban pemerintah pusat dan daerah masih akan relatif tinggi, seperti penyediaan sarana pendidikan prasekolah (PAUD), dan persiapan pelayanan usia sekolah (7-12), serta pelayanan usia sekolah SLT (12-14) tahun. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pelayanan kesehatan balita, serta fasilitas bermain untuk balita.

Di sisi lain terkait dengan semakin banyaknya jumlah pekerja anak (10-14) tahun, sebagai akibat tekanan ekonomi rumah tangga, maka sebaiknya Kementerian Pendidikan Nasional meningkatkan sistem koordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mengeliminir dampak-dampak yang ditimbulkannya, seperti tingginya angka putus sekolah, eksploitasi anak usia sekolah, dan persoalan hak asasi manusia (anak).

Oleh karena itu, perlu persiapan dan perencanaan yang matang, dalam mencetak generasi yang memiliki *human capital* yang tinggi dan berkualitas, sehingga mereka siap bersaing di pasar kerja kelak setelah masuk usia produktif (15 tahun ke atas). Tantangan di dunia kerja kedepan akan semakin berat, sejak persetujuan pasar tenaga kerja bersama di Wilayah Asean (*Asean Free Labor Market*) di Masyarakat Ekonomi Asean, MEA.

Kebijakan Penduduk Usia Produktif

Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang relatif besar akan berdampak luas, be-

rupa penyediaan lapangan kerja, tambahan fasilitas pendidikan, dan kesehatan, serta ketersediaan pangan dan energi yang memadai. Tingginya angka kelahiran paling kurang 15 lalu, berdampak terhadap melimpahnya penduduk usia produktif hari ini yang merupakan modal pembangunan, namun jika tidak bermanfaat secara optimal akan menjadi beban pembangunan itu sendiri.

Bonus demografi merupakan modal sumberdaya manusia jika berpotensi produktif, tetapi disisi lain akan menjadi petaka bagi pembangunan jika memiliki mutu yang rendah, apalagi jika kesempatan kerja tidak tersedia dan layak bagi pencari kerja. Tentu saja harapan semua orang, walaupun penduduk besar jika berkualitas tidak menjadi masalah; sehingga angka pengangguran dan angka penduduk miskin berkurang, yang memungkinkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, berdaya saing, lebih sejahtera, dan bermartabat.

Mengantisipasi semakin tingginya angka pengangguran, pihak Bappenas dan Bappeda di wilayah provinsi dan Kabupaten/kota, merencanakan dan merancang beberapa konsep pembangunan. Program yang lain, terkait dengan pengentasan kemiskinan, yakni *Master Plan Perencanaan Pengentasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)*, dan sayangnya juga di program dua tahun saja (2013-2-2014), dan sekarang tidak berlanjut lagi. Program yang sementara berjalan, sebagai pengganti dua program sebelumnya adalah Perencanaan Pengembangan Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM), dan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B). Di samping itu yang masih berjalan, yakni PNPM-Perdesaan, PNPM-Perkotaan, dan PNPM-PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah).

Khusus di Provinsi Sulbar, PNPM-PISEW dilaksanakan di tiga Kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Mamuju Utara, dalam bentuk pembangunan jalan tani, gudang kakao, posyan-

du, drainase, air bersih, jembatan dan jalan (untuk mengakses daerah pertanian dan perkebunan). Keseluruhan program di atas tentu saja bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk usia kerja (pekerja), membuka lapangan kerja baru, dan pengentasan kemiskinan.

Harapan kita adalah, sebaiknya semua program di atas, utamanya yang tidak dilanjutkan lagi setelah era pemerintahan Jokowi-Jk., agar dievaluasi kembali untuk dilanjutkan, apakah dengan konsep yang sama, atau dalam bentuk yang lain.

Terkait dengan perencanaan ketenagakerjaan ke depan, perlu dilihat dari dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan, secara teoritis permintaan tenaga kerja ditentukan oleh permintaan *output*. Semakin tinggi permintaan *output*, maka semakin tinggi permintaan tenaga kerja (Ehrenberg, 1988 dan McConnell, 1999). Oleh karena itu perencanaan tenaga kerja harus dilihat kondisi ekonomi suatu daerah. Daerah yang memiliki struktur ekonomi didominasi oleh sektor primer, maka perencanaan sumber daya manusia (SDM), mengarah ke sektor ekonomi yang dominan tersebut. Sebagai perbandingan misalnya Negara Singapura tidak mungkin merencanakan SDM-nya ke sektor primer, sebab negara tersebut potensi sektor primer sangat minim, sehingga dia memilih pengembangan SDM di sektor jasa, atau manufaktur.

Oleh karena perencanaan SDM di masing-masing provinsi misalnya, sebaiknya mengacu pada sumber-sumber daya lokal, baik menyangkut sumber daya manusia maupun potensi sumberdaya alami wilayah berdasarkan koridor masing-masing wilayah. Jika demikian halnya, maka jenis dan jenjang sekolah menengah atas sampai pada perguruan tinggi (terutama pendidikan vokasi) harusnya dirancang sesuai dengan konsep tersebut.

Kemudian perencanaan tenaga kerja di sisi penawaran, sebaiknya negara dan daerah membentuk dan mengaktifkan kembali sebuah lembaga yang pernah ada, yakni Dewan Ketenagakerjaan Nasional/Daerah sebagai mitra Kementerian Tenaga Kerja dalam menangani masalah-masalah ketenagakerjaan nasional dan daerah. Kementerian Tenaga Kerja dan Dewan Ketenagakerjaan sebaiknya duduk bersama/berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan; dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam merencanakan pengemangan SDM untuk penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor ekonomi dan masalah pengangguran.

Perencanaan pengembangan SDM harusnya berbasis permintaan di pasar *output*. Sehingga pengembangan SDM melalui pendidikan formal misalnya, tidak harus sama antara satu propinsi dengan propinsi yang lain. Jika kita mengacu pada konsep potensi daerah masing-masing, pengembangan pendidikan tinggi, misalnya pembukaan “program studi dan pendidikan vokasi” baru tidak harus sama antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, tergantung kebutuhan wilayah tersebut.

Penanganan Penduduk Lansia

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada periode (2010-2035), maka berturut-turut Provinsi Sulut, Sulsel, Kalsel, dan Kaltim yang memiliki proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas tertinggi (di atas proporsi rata-rata 10 provinsi di IBT), sebagai dampak dari semakin tingginya angka harapan hidup saat lahir. Penduduk lansia, ke depan akan berbeda penanganannya dengan lansia masa depan. Lansia masa depan akan “ringkih” panjang umur tetapi angka kesakitannya (*morbidity*) relatif tinggi.

Hasil penelitian Nilasari (2015), bahwa penduduk lansia di Kota Makassar, rata-rata mereka sakit lima kali per tahun. Kemudian tidak

ada pengaruh yang signifikan antara jumlah sakit per tahun terhadap penawaran tenaga kerja (jam kerja) penduduk lansia per bulan. Hal tersebut, menunjukkan bahwa penduduk lansia masa depan masih akan meramaikan pasar kerja, dan akan berimplikasi semakin ketatnya persaingan di pasar kerja, sebab penduduk lansia merupakan pekerja yang berpengalaman dan profesional, terutama di sektor jasa.

Di sisi lain, penduduk lansia di masa depan, lebih mandiri, lebih demokrasi, dan berwawasan luas, sehingga harus dipersiapkan sarana dan prasarana untuk menyalurkan aspirasi mereka, misalnya lewat media atau ada pertemuan khusus untuk mendengar dan menceritakan masa-masa mudanya dulu, sehingga usianya semakin panjang, tetapi tidak sakit-sakitan.

Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menjadi salah satu payung hukum dalam mendesain pengendalian jumlah penduduk, melalui pengendalian kelahiran, kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 52 tersebut dimotori oleh Badan Kependudukan dan KB Nasional (BKKBN). Program BK-KBN dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan kematian seharusnya kembali dilaksanakan secara terintegrasi (untuk semua lembaga pemerintah, maupun swasta) baik secara horizontal, dan terutama secara vertikal, di bawah kewenangan pemerintah pusat, mulai dari level kementerian dan kelembagaan sampai pada level pemerintahan desa/kelurahan. Tidak seperti halnya sekarang, pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) bertindak otonom terhadap kebijakan BKKBN pusat dan provinsi.

Peran dari masyarakat dan DPRD dalam proses kebijakan kependudukan harusnya menjadi semakin besar sehingga arah kebijakan

kependudukan yang selama ini mengabaikan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan kelompok sasaran tidak lagi dapat dipertahankan. Apalagi dengan masih banyaknya kelompok *unmet needs* (pasangan usia subur yang ingin ber-KB, namun tidak memperoleh akses terhadap pelayanan kontrasepsi) sebesar 9,1 persen (Sensus Penduduk Indonesia, 2010), dan disertai *total fertility rate* (TFR) sebesar 2,442 berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2010-2015 (Tabel 3.2), merupakan tantangan bagi percepatan program KB nasional.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, intervensi program KB perlu lebih diintensifkan untuk provinsi yang memiliki TFR di atas rata-rata nasional, khusus di Indonesia Bagian Tengah berturut-turut mulai dari TFR tertinggi, yakni Provinsi NTT, Sulbar, Sultra, Sulteng, NTB, Gorontalo, Kaltim, Sulsel, dan Kalsel. Kecuali Provinsi Sulawesi Utara TFR-nya di bawah TFR nasional.

Tingginya angka kelahiran, angka kematian, dan angka kemiskinan bagaikan lingkaran setan, antara satu dengan yang lain tidak terputuskan. UNFPA merekomendasikan, mengurangi kemiskinan dengan menginvestasikan pada kesehatan dan pendidikan, terutama bagi perempuan dan remaja putri, dapat memutus lingkaran setan tersebut.

Ketika perempuan memperoleh pendidikan dan penghasilan yang memadai, sebagian besar akan diinvestasikan untuk seluruh keluarga, baik untuk kebutuhan konsumsi dalam rangka memperbaiki gizi keluarga, juga untuk peningkatan *human capital* anaknya. Di samping itu, remaja putri yang berpendidikan, kelak akan menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas. Ibu yang berkualitas, dapat mengatur kelahiran, dan menjaga kesehatan keluarganya, sehingga akan berdampak pada rendahnya angka kematian, khususnya angka kematian bayi .

Perempuan yang bekerja akan memiliki nilai waktu luang yang relatif mahal (*opportunity cost*), sehingga untuk menambah satu anak berikutnya perempuan akan berpikir panjang, bagaimana merawat

anak mulai dari kehamilan, persalinan, sampai anak melewati usia balita. Dengan demikian semakin tinggi partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi, secara tidak langsung akan mengurangi angka fertilitas.

Untuk itu perlu didorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, dan memperluas lapangan kerja yang tidak bias *gender*, mulai dari pimpinan politik (legislatif), pejabat eksekutif negara dan daerah, pengusaha di sektor formal dan informal, sampai pada buruh pekerja kasar. Kesibukan wanita dalam kegiatan ekonomi, tanpa meninggalkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga bagi keluarganya, akan berdampak terhadap terciptanya keluarga kecil sejahtera.

Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan terkait dengan otonomi daerah, di mana pendidikan dasar dan menengah pertama (SD, SMP, dan sederajat) akan dikoordinasi langsung oleh pemerintah Kabupaten/Kota, pendidikan menengah atas (SMA dan sederajat) dikoordinasi oleh pemerintah provinsi, dan pendidikan tinggi dikoordinasi oleh pemerintah pusat, serta pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, sehingga terjadi pembagian kewenangan antar jenjang pendidikan dengan jenjang pemerintahan. Dengan demikian anak putus sekolah lebih mudah dikontrol dan diawasi oleh masing-masing yang berwenang. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk menunda usia kawin pertama bagi remaja putri, dan akan berdampak positif terhadap penurunan angka kelahiran, dan penurunan angka kematian maternal (*maternal fertility rate*).

Di sisi lain, pada saat angka kelahiran semakin menurun, $NRR < 1$ di Propinsi Sulut pada tahun 2030-2035, maka peristiwa kelahiran di Sulut akan semakin jarang terjadi. Karena peristiwa kelahiran itu langka, maka sangat mungkin upacara yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, dan pasca kelahiran dapat makin bermunculan dan semarak. Mungkin saja upacara kelahiran anak pertama, sekaligus merupakan upacara kelahiran anak terakhir, dengan kata lain “satu anak cukup”.

Peristiwa demografi lainnya yang tidak kalah menarik adalah kematian. Permasalahan kematian akan berdampak terhadap orang hidup, biaya pemakaman akan semakin meningkat (apalagi jika seorang perantau (migran) jauh, kemudian ingin dimakamkan di kampung asalnya, maka jasa pelayanan dan upacara pemakaman akan semakin meningkat di masa depan. Persoalan lain adalah semakin terbatasnya lahan untuk pemakaman di daerah padat penduduk (Ibukota Provinsi), sehingga tanah untuk “yang telah mati” dapat bersaing dengan tanah “yang masih hidup”. Mungkin perlu subsidi dari pemerintah daerah untuk keluarga yang mau dimakamkan di luar kota.

Disisi lain, nampak bahwa di antara 10 provinsi di IBT terdapat 5 provinsi yang memiliki rasio jenis kelamin (*sex ratio*) lebih kecil 100, artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Propinsi yang dimaksud adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Di sisi lain, provinsi yang memiliki *sex ratio* lebih kecil 100 (Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki).

Banyaknya penduduk perempuan di atas laki-laki di lima provinsi di atas akan berdampak pada semakin tingginya partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi rumah tangga yang diperrankan oleh perempuan akan semakin meningkat, sehingga perempuan akan semakin mengalokasikan waktunya untuk kegiatan ekonomi, dan semakin sedikit waktu luang (*leisure time*) yang digunakan untuk melahirkan, memelihara anak, dan membesarkan anak yang dia miliki, dan pada akhirnya angka kelahiran semakin menurun.

Semakin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki oleh perempuan usia produktif terutama di Provinsi Sulut, Kalsel, Sulsel, Gorontalo dan NTB yang memasuki pasca transisi fertilitas pada periode tahun 2030-2035, akan berdampak pada peningkatan partisipasi wanita da-

lam kegiatan ekonomi yang disertai dengan peningkatan mobilitas penduduk perempuan. Kondisi ini akan berdampak pada peningkatan berbagai kebutuhan perlengkapan khusus penduduk perempuan, misalnya toilet, gendongan anak, dan fasilitas lain yang bias *gender*. Kemudian semakin aktifnya perempuan bekerja di luar rumah terutama yang masih memiliki anak kecil (Balita) akan membutuhkan fasilitas jasa penitipan anak terutama di daerah perkotaan.

Penduduk perempuan usia produktif dan reproduktif, masih potensial melahirkan, masih akan meningkat terus, meskipun dengan motivasi mempunyai jumlah anak yang semakin sedikit, sehingga besar dugaan bahwa kebutuhan pemakaian alat kontrasepsi tetap akan semakin meningkat di masa mendatang. Dengan demikian, program KB tidak harus dibebankan sepenuhnya kepada kaum perempuan, tetapi harus berarus *gender* (*bi-sex*).

Daftar Pustaka

- Ananta, Aris 1995. *Transisi Kependudukan Di Indonesia: Beberapa Masalah dan Prospek Perekonomian*, Pidato Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi pada FE-UI, Jakarta.
- , 1991a. *Variable Demografi Dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi*, LDFE-UI, Jakarta.
- , dan Evi Nurvidya Anwar. 1991b. *Projection of Indonesian Population: 1990-2020*, LDFE-UI, Jakarta.
- , (Penyunting). 1993. *Ciri Demografis, Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, LDFE-UI, Jakarta.
- Nilasari, Andi Besse, 2015. *Penawaran Tenaga Kerja Lanjut Usia Di Kota Makassar*. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Unhas (Tidak Dipublikasi).
- Wirakartakusumah, M. Djauhari, dkk. 1991. *Revolusi Fertilitas di*

- Indonesia.** Makalah Disampaikan dalam Seminar Jangka Panjang Gerakan KB Nasional, oleh BKKBN di Jakarta.
- Suriastini, Ni Wayan, 1995. *Transisi Vital, dalam Transisi Demografi, Transisi Pendidikan, dan Transisi Kesehatan di Indonesia*, Kantor BKKBN, Jakarta (Halaman 77-117).
- Todaro, Michael, P. 2000. *Economic Development in The Third World*, Published by Longman Group Limited, London, UK.
- Shryock, Henry S., Jacob S., Siegel et.al. 1976. *The Methods and Materials of Demography*, Vol. 2., USA.
- Syarief, Sugiri, 2011. *Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk, Apa Itu?*, dalam Jurnal Keluarga: Informasi Kependudukan dan KB, Edisi Khusus Desember 2011.
- M. Cholil Nafis, 2011. *Kependudukan Perspektif Islam*, Mitra Abadi Press, Jakarta Selatan.
- McConnell, Campbell R. and Stanley L. Brue. 1999. *Contemporary Labor Economics*, First Edition, Mc Graw-Hill International Editions, Singapore.
- Becker, Gary S., 1988. *A Reformulation of the Economic Theory of Fertility*: The Quarterly Journal of Economics, Vol. CIII (1-25), Chicago.
- Becker, Gary S., 1991. *A Treatise on The Family*, Enlarged Edition, Harvard University Press, Cambridge.
- Fergus D.J. dan Dia Widyawati. 1995. *Dampak Jumlah dan Umur Anak Terhadap Kecenderungan Bekerja Perempuan Menikah: dalam Pasar Kerja dan Produktivitas Di Indonesia*. Kantor Menteri Negara/BKKBN, Jakarta.

Bab III

Migrasi Internasional dalam Tinjauan Teoretis dan Empiris

*Nurhuda
Fatmawati*

Beberapa Pandangan Tentang Migrasi Internasional

Migrasi internasional berhubungan erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan transisi kependudukan pada suatu negara. Pekerja migran internasional adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia pengertian ini merujuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Migrasi tenaga kerja biasanya didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melintasi perbatasan untuk tujuan men-

dapatkan pekerjaan di negara asing. Melalui cara yang resmi atau tidak resmi, difasilitasi atau tidak, tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun negara tujuan. Tenaga kerja membantu memperbesar angkatan kerja di negara tujuan dan dapat membantu pembangunan di negara mereka sendiri melalui pengiriman uang penghasilan mereka.

Migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Sedangkan faktor lainnya adalah kelahiran dan kematian. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian dalam suatu negara. Migrasi sering diartikan perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain Munir (2000).

Definisi United Nation didukung oleh beberapa peneliti misalnya Said (1985) yang mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan tempat tinggal seseorang atau kelompok secara permanen atau relatif permanen (dalam jangka waktu tertentu) dengan menempuh jarak minimal tertentu, berpindah dari satu unit geografis ke unit geografis lainnya. Unit geografis disini berarti unit administratif pemerintah baik berupa negara maupun bagian-bagian dari negara.

Selama dekade 1960an dan 1970an yaitu saat negara-negara berkembang berada pada puncak arus migrasi penduduk secara besar-besaran, yang terjadi adalah timbulnya berbagai kesulitan salah satunya adalah pengangguran. Dengan kata lain data-data empiris telah menggoyahkan keabsahan teori perpindahan tenaga kerja yang dirumuskan Lewis dalam model pembangunan dua sektornya.

Masalah tersebut kemudian dipecahkan oleh Todaro (1998) dalam teorinya yakni Model Teori Migrasi Todaro. Model ini memiliki asumsi bahwa migrasi penduduk pada dasarnya akibat dari adanya fenomena ekonomi. Keputusan yang dibuat untuk melakukan migrasi

adalah rasional, jadi walaupun sudah diketahui bahwa di kota angka pengangguran tinggi namun berdasarkan pada alasan yang kuat, para tenaga kerja tetap melakukan mobilitas. Model Todaro ini pun dilandasi pemikiran bahwa adanya arus migrasi merupakan akibat dari adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antar wilayah, yang dimaksud pendapatan disini bukanlah pendapatan aktualnya melainkan pendapatan yang diharapkan (*expected income*). Oleh karena itu, para migran selalu melakukan suatu perbandingan antara pasar kerja di masing-masing wilayah, untuk menemukan mana yang sekiranya akan memberikan keuntungan maksimum. Biasanya mereka akan memutuskan untuk bermigrasi jika penghasilan bersih di kota tujuan lebih besar dari pada penghasilan bersih selama ini di daerah asal.

Menurut model pembangunan yang diajukan oleh W. Arthur Lewis dalam Todaro (1998) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John Fei dan Gustav Ranis, yang dikenal dengan model Dua Sektor Lewis (*Lewis Two Sector Model*). Model ini menjelaskan bahwa perekonomian di negara berkembang terdiri dari dua sektor, yakni sektor tradisional yaitu sektor pedesaan subsisten yang surplus penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol, dan sektor industri modern yang tingkat produktivitasnya tinggi yang menjadi tempat penampungan tenaga kerja dari sektor subsisten. Lewis berasumsi bahwa tingkat upah di daerah perkotaan minimal harus 30 persen lebih tinggi dibanding upah di daerah pedesaan. Hal ini akan memaksa para pekerja berpindah. Sedangkan perpindahan tenaga kerja dan pertumbuhan lapangan kerja menyebabkan pertumbuhan *output* sektor modern, Todaro (1998).

Menurut Osaki (2003) migrasi penduduk terjadi karena adanya tenaga kerja yang bersifat hakiki (*intrinsic labor*) pada masyarakat industri modern. Pernyataan ini merupakan salah satu aliran yang menganalisis keinginan seseorang melakukan migrasi yang disebut

dengan *dual labor market theory*. Menurut aliran ini, migrasi terjadi karena adanya keperluan tenaga kerja tertentu pada daerah atau negara yang telah maju. Migrasi bukan hanya terjadi karena push factor yang ada pada daerah asal tetapi juga adanya pull factor pada daerah tujuan.

Menurut Salvatore (1996) ada cukup banyak keuntungan ekonomi dari migrasi internasional. Bagi para pekerja, tingkat pendapatan di tempat baru lebih tinggi daripada yang mereka peroleh dari tempat asalnya. Dengan pendapatan yang lebih tinggi itu mereka akan memperoleh standar hidup yang lebih baik. Mereka juga dapat menyediakan pendidikan, peluang kerja serta masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya.

Teori *Human capital Model* dan Model Todaro memfokuskan perhatiannya pada hubungan ekonomi dan migrasi. Menurut teori *Human capital Model* bahwa seseorang akan melakukan migrasi apabila pendapatan yang diperoleh di tempat tujuan lebih besar daripada pendapatan di daerah asal yang di tambah dengan biaya langsung migrasi, Simanjuntak (1985). Dalam model ini niat untuk melakukan migrasi dipengaruhi oleh motivasi untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik. Dalam konteks ini Todaro (1985) mengemukakan bahwa keputusan seseorang untuk melakukan migrasi merupakan respon dari harapan untuk memperoleh kesempatan kerja dan pendapatan yang lebih baik. Todaro berpendapat bahwa sektor modern di perkotaan merupakan sektor penarik utama migrasi tenaga kerja khususnya bagi tenaga kerja terampil. Cole dan Sanders (1983) dalam (Djoko, 2017) mengemukakan bahwa penduduk yang tidak berpendidikan yang melakukan migrasi akan masuk sektor informal. Todaro (2003) mengatakan bahwa keputusan untuk bermigrasi tidak hanya ditentukan oleh berapa pendapatan yang diterima seandainya melakukan migrasi, tetapi juga memperhitungkan berapa besar pelu-

ang untuk mendapatkan pekerjaan, ini erat kaitannya dengan kesempatan kerja yang terdapat di suatu tempat.

Kajian dan analisis terhadap migrasi tenaga kerja selama ini lazim menggunakan tiga pendekatan yaitu : pertama, pendekatan teori ekonomi (Todaro, 1985). Kedua, pendekatan psikologi yang menganalisis motif-motif orang berpindah (Fawcett, 1978 dan Wolpert, J., 1996); dan Ketiga, pendekatan yang berasal dari teori-teori demografi dan geografi yang bersumber dari hukum gravitasi E.G Ravenstein.

Teori *Neoclassic Economic Macro* menjelaskan bagaimana proses dan akibat dari perpindahan tenaga kerja yang berasal dari negara yang mengalami surplus tenaga kerja tetapi kekurangan kapital menuju negara yang kekurangan tenaga kerja, tetapi memiliki kapital yang berlimpah. Teori ini kurang memperhatikan bagaimana seseorang memutuskan untuk berpindah, sebab- sebab perpindahan, serta dengan cara apa ia pindah.

Teori ekonomi lainnya, yaitu teori *Neoclassical Economic Micro*, yang sebetulnya juga memperbincangkan soal pengambilan keputusan di tingkat individu migran, tetapi tidak mencoba menjelaskan persoalan, mengapa seseorang berpindah dengan cara tertentu, mengapa buka dengan cara yang lain. Teori ini hanya merekomendasikan kepada para migran potensial itu, agar mempertimbangkan “*cost and benefit*” dari setiap perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan daerah asal migran (Massey, 1993; dan Kuper 2000).

Kepastian migrasi akan berlaku jika pasar lainnya di negara asal seperti pasar asuransi, pasar modal, pasar kartu kredit dan lainnya berlaku tidak sempurna, meskipun itu ada tapi tidak sempurna dalam akses untuk mendapatkannya. Meskipun sebenarnya pemerintah sangat berwenang dan mampu untuk mengubah ukuran aliran migrasi peker-

ja dengan menyediakan kebijakan atas penyempurnaan pasar lainnya tersebut (Stark dan Boom, 1985).

Teori selanjutnya yang berkaitan dengan teori migrasi internasional adalah Teori *Segmentation of Labour Market* dikemukakan oleh Castles dan Miller (2009). Teori ini menyatakan pentingnya faktor institusi serta ras dan *gender* dalam segmentasi pasar kerja. Migrasi internasional pekerja selalu mendapatkan permintaan yang besar dan awal mula dari itu adanya proses perekrutan oleh majikan di negara penerima atau dari kepentingan pemerintah.

Beberapa Faktor Penentu Migrasi dalam Pandangan Teoretis

Migrasi dilakukan seseorang karena adanya tekanan lingkungan alam, ekonomi, sosial dan budaya. Menghadapi tekanan lingkungan ini ada tiga kemungkinan yang dilakukan masyarakat. Pertama, mereka bertahan di tempat, karena menganggap tempat yang sekarang adalah tempat terbaik dan dianggap paling banyak memberikan keuntungan bagi terpenuhinya kebutuhan hidup. Kedua, mereka pindah tempat atau melakukan migrasi. Ketiga, mereka melakukan peralihan antara keduanya, yaitu tetap tinggal di tempat yang lama tetapi mencari pekerjaan baru secara berkala dan terus menerus atau commuter (Hugo, 1981).

Todaro mengajukan hipotesa bahwa yang mendorong orang bersedia mengadakan penanaman modal dalam bentuk ini adalah perbedaan aliran pendapatan antara tempat asal dan tempat tujuan. Salah satu implikasi dari hipotesa yang diajukan oleh Todaro tersebut adalah bahwa migrasi tenaga kerja didorong oleh pertimbangan ekonomis sedangkan pertimbangan-pertimbangan lain diturunkan menjadi bukan pertimbangan pokok. Memang berbagai penelitian yang dia lakukan

maupun oleh peneliti memperkuat hipotesanya. Akan tetapi justru karena berat sebelahnya mode ini menantang penelitian lain untuk mengkaji hipotesanya.

Todaro (1995) secara sederhana menyimpulkan bahwa migrasi itu terjadi terutama karena adanya perbedaan tingkat upah riil antara desa dan kota, atau adanya nilai harapan yang direfleksikan oleh suatu nilai yang merupakan perbedaan positif antara tingkat upah di daerah asal dan daerah tujuan.

Penelitian Kodwo Ewusi, di Ghana (1971) menyimpulkan bahwa keadaan sosial yang terlampaui menekanlah yang mendorong orang untuk pindah. Setidak-tidaknya faktor yang menekan ini lebih menentukan dalam pengambilan keputusan untuk pindah daripada faktor-faktor ekonomis. Sesudah keputusan untuk pindah dibuat, baru ditentukan ke daerah mana perpindahan itu diarahkan. Menurut Ewusi, variabel-variabel yang mempengaruhi motivasi dan arah migrasi adalah: (i) ratio urbanisasi yang diperoleh dari hasil bagi antara jumlah yang pindah ke kota dibagi dengan jumlah penduduk kota, (ii) konsumen listrik di tempat asal, variabel dipakai sebagai proxy terhadap pendapatan, (iii) jarak antara daerah asal ke daerah baru, (iv) proporsi penduduk yang bisa membaca menulis di daerah asal, (v) konsumsi listrik di daerah tujuan, (vi) jumlah kesempatan kerja di daerah tujuan dan (vii) tujuan urbanisasi di daerah tujuan.

Mantra (1994) berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Sedangkan menurut Todaro (2003) karakteristik yang penting dari para migran pada dasarnya dibagi dalam tiga kategori umum, yaitu demografis, pendidikan dan ekonomi : (i) karakteristik demografis. Para migran di

kota negara-negara berkembang umumnya terdiri dari pemuda yang berumur antara 15 sampai 24 tahun, (ii) Karakteristik pen-

didikan. Tampaknya ada asosiasi yang jelas antara tingkat pendidikan dengan kecenderungan untuk bermigrasi, yaitu mereka yang berpendidikan lebih tinggi, lebih banyak melakukan migrasi dari pada yang berpendidikan rendah dan (iii) karakteristik ekonomi Persentase yang paling besar dari para migran adalah mereka yang miskin, tidak punya sawah atau tanah, orang yang tidak punya keterampilan dan sudah tidak ada lagi kesempatan bekerja di tempat asal.

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi, Bogue (1952) mengidentifikasi variabel-variabel tersebut atas tiga kelompok utama yaitu pertama yang berkaitan dengan kondisi-kondisi ekonomi yang mengakibatkan adanya migrasi, seperti adanya investasi modal, perubahan teknologi, dan pembagian kesejahteraan. Kedua, migrasi akan menstimulasi keadaan, seperti adanya peningkatan perkawinan, tenaga kerja dan bencana alam. Ketiga, adanya faktor-faktor lain, seperti biaya pindah, hubungan dengan teman dan informasi yang semakin berkurang mengenai daerah asal. Menurutny, lingkungan yang terdapat di daerah tujuan mendorong orang pindah karena adanya rasa superior di tempat yang baru, terutama untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, pendapatan, pendidikan dan kehidupan yang menyenangkan. Sedangkan lingkungan di daerah asal mendorong orang untuk pindah karena adanya tekanan-tekanan, seperti berkurangnya sumber daya alam, menyempitnya lapangan pekerjaan, bencana alam dan tekanan-tekanan di bidang sosial, politik dan agama.

Faktor *Young Dependency Ratio*

Negara – negara berkembang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam pembangunan sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang pesat. Perkembangan penduduk yang pesat menimbulkan efek yang buruk pada usaha pembangunan, yaitu: (i) di beberapa negara

jumlah penduduknya relatif besar dan (ii) tingkat perkembangan penduduk sangat cepat. Pada umumnya negara berkembang pada keseluruhannya menghadapi masalah yang sangat besar dalam membangun: yaitu: di satu pihak negara-negara tersebut memiliki sumber-sumber dan kemampuan yang terbatas dalam melakukan pembangunan ekonomi, tetapi di lain pihak mereka harus menciptakan kesempatan kerja dan berusaha menaikkan kemakmuran untuk sebagian besar penduduk yang bertambah.

Jumlah tanggungan keluarga menjadi faktor pendorong bagi TKI untuk bekerja di luar negeri baik secara permanen maupun sementara. Hal ini dikarenakan niat seseorang sebenarnya akan dipengaruhi oleh tekad yang kuat dari dalam diri individu untuk berani melakukan suatu keputusan (*risk taker*) sejalan dengan kewajiban untuk bertanggung jawab menanggung beban keluarga (Waridin: 2012). Mereka yang melakukan migrasi dari Filipina ke Hongkong setidaknya memiliki pendidikan sekolah menengah, mampu berbahasa Inggris, pekerja kantor atau profesional di Filipina, atau dia mungkin penganggur, telah menikah dan mereka biasanya meninggalkan dua atau tiga anak di belakang untuk diasuh oleh kerabat di Filipina (Constable 2007 dalam Karen O'Reilly, 2012).

Sama halnya yang terjadi pada Elsa, yang meninggalkan Filipina ketika dia berusia dua puluh tiga tahun, sebelumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan di pabrik elektronik. Ayahnya mendorongnya untuk bermigrasi untuk membantu membayar biaya kuliah bagi adik perempuannya. Dia menerima 'peluang' ini dengan ikhlas, kemauan yang jelas dan sadar sepenuhnya bahwa dia bisa mendapatkan lebih dari ayahnya, dan dia ingat betapa kerasnya kedua orangtuanya bekerja ketika dia masih muda. Migrasi mewujudkan impiannya untuk dirinya dan saudara-saudaranya, impian memiliki sesuatu yang lebih dari kemiskinan yang mereka alami ketika masih anak-anak. Bel-

le bergabung dengan saudara perempuannya di Hongkong tiga tahun kemudian, dan selama bertahun-tahun mereka telah mampu berkontribusi terhadap pendidikan universitas untuk dua adik perempuan, dan sekolah menengah untuk saudara laki-laki mereka. Keluarga tersebut telah membeli sebidang kecil tanah dimana mereka memelihara babi, ayam dan angsa, dan menanam pohon buah-buahan (Constable 2007).

Besarnya Young Dependency Ratio yang disebabkan oleh tingginya angka kelahiran, merupakan faktor penghambat pembangunan ekonomi, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh yang sebenarnya harus ditabung untuk kemudian diinvestasikan bagi pembangunan ekonomi, terpaksa harus dikeluarkan untuk keperluan sandang dan pangan bagi mereka yang merupakan beban tanggungan penduduk. Di Negara-negara yang mempunyai angka tanggungan rendah, investasi-investasi dapat dilaksanakan dengan baik untuk menaikkan tingkat kemakmuran negara dan negara-negara ini justru merupakan negara yang sudah maju dalam kehidupan ekonomi.

Faktor demografi merupakan faktor yang memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan tingkat migrasi, terutama beban tanggungan jumlah anggota rumah tangga yang besar merupakan pertimbangan seseorang untuk memutuskan migrasi terutama bila anggota rumah tangga bukan tergolong angkatan kerja. Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan Leuwol (1988) dalam Budijanto (2015) bahwa besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah salah satu faktor pendorong migrasi adalah banyaknya jumlah anak yang dimiliki para migran.

Dalam keadaan dimana jumlah anggota cukup besar, sedangkan pendapatan keluarga tidak memadai, maka anggota keluarga terpaksa harus mencari dan melakukan pekerjaan tambahan Aris Ananta dan Sri Harijati (Sanniawati, 2006).

Adanya tekanan dalam rumah tangga dengan beban ketergan-

tungan yang tinggi memaksa para angkatan kerja untuk bekerja pada sektor informal. Dipak Mazundar misalnya telah mengamati bahwa sektor informal kebanyakan terdiri dari angkatan kerja yang sangat muda atau sangat tua, wanita, terbebas pendidikannya, bukan kepala rumah tangga. Dalam hal ini sektor informal dianggap sebagai katup penyelamat dari tingginya beban ketergantungan yang harus ditanggung oleh suatu rumah tangga. Kemanfaatan usaha mempertahankan otonomi sektor informal dari segi lain yaitu, peranannya dalam proses “*recycling*” barang bekas, kemampuannya untuk mengadakan inovasi dengan biaya murah dan rendahnya rasio modal per tenaga kerja (Sethuraman, dalam Arifin M. Siregar 1982).

Lebih dari itu, sektor informal sendiri telah membuktikan kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi angkatan kerja perkotaan. Sektor informal telah menyerap 50% angkatan kerja perkotaan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa sektor informal membuahakan hampir sepertiga dari seluruh pendapatan perkotaan. Manakala di negara asal penyerapan tenaga kerja tinggi maka kemungkinan seseorang untuk melakukan migrasinya kecil. Karena umumnya yang melakukan migrasi adalah mereka para angkatan kerja yang tidak terserap ke dalam dunia kerja (pengangguran).

Perpindahan tenaga kerja dari negara-negara berkembang ke luar negeri pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan ekonomi antar negara. Rendahnya tingkat upah ditambah dengan sulitnya memperoleh pekerjaan yang memadai di negara berkembang cenderung mendorong perpindahan tenaga kerja dari negara –negara berkembang ke negara-negara maju (Mulyadi S. 2003) *Social Capital Theory* yang disampaikan oleh Castles dan Miller (2009) yang mengembangkan konsep jaringan migrasi. Pendekatan dari teori ini menyatakan bahwa migrasi internasional senantiasa mengembang sehingga menjadi hubungan jaringan yang sangat luas serta semua orang

tidak merasa kesulitan untuk bermigrasi. Hubungan yang sangat nampak dimaksudkan disini ialah perbedaan gaji dan peluang pekerjaan.

Faktor Mutu Sumber daya Manusia

Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor dari dalam diri seseorang untuk melakukan migrasi. Mutu SDM dapat diukur dengan tingkat pendidikan formal yang diperolehnya. McConnell (Mantra, 1986) menegaskan bahwa penduduk yang berpendidikan cenderung untuk pergi ke daerah lain sedangkan yang buta huruf kebanyakan tinggal di rumah. Hal senada juga dinyatakan oleh Todaro (2003) yang menyatakan adanya korelasi atau hubungan yang positif antara tingkat pendidikan yang dicapai dengan migrasi dan adanya hubungan yang nyata antara tahap pendidikan yang diselesaikan dengan kemungkinan untuk bermigrasi, semakin tingkat pendidikan kecenderungan untuk bermigrasi lebih besar.

Semakin tingginya kesadaran akan pendidikan membuat generasi muda merasa kehidupan di daerah asal semakin tidak menarik. Mereka berharap dengan modal pendidikan yang mereka miliki menjadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak baik dari segi strata sosial maupun dari sisi pengupahan. Hal senada diperkuat oleh Borjas (2013), ada korelasi positif antara pencapaian pendidikan pekerja dengan kemungkinan migrasi.

Pendidikan merupakan investasi modal manusia yang sama pentingnya dengan investasi modal fisik bagi keberhasilan jangka panjang sebuah negara. Tingkat pendidikan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara terutama pada ketenagakerjaan, karena tingkat pendidikan merupakan upaya nyata dalam mengembangkan sumber daya manusia. Begitu pula tingkat pendidikan sangat mempengaruhi mobilitas dari seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula kecende-

rungan seseorang untuk melakukan migrasi.

Sering diamati bahwa perbedaan upah antar daerah yang besar di suatu negara ada, di mana daerah dengan upah rendah juga dicirikan dengan tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Misalnya, di Distrik Jerman Timur, biaya tenaga kerja mencapai 65 persen dari rata-rata nasional pada tahun 2004 sementara tingkat pengangguran di Jerman Timur sekitar 20 persen melampaui tingkat pengangguran nasional dengan persentase lebih dari 8 poin (Institut Der Deutschen Wirtschaft, 2006). Hubungan serupa telah diamati selama satu dekade, tanpa kecenderungan konvergensi yang jelas. Pada saat yang sama, kualifikasi formal yang lebih tinggi selalu dikaitkan dengan pengurangan risiko pengangguran. Akhirnya, kecenderungan untuk bermigrasi biasanya lebih kuat untuk individu berkemampuan tinggi daripada yang berkecakupan rendah.

Dalam suatu studi yang komprehensif, yang diselenggarakan oleh Barnum dan Sabot di Tanzania, hubungan antara pendidikan dengan migrasi didokumentasikan secara jelas, terutama dalam hubungannya dengan dampak menurunnya kesempatan kerja di perkotaan terhadap karakteristik pendidikan para migrasi. Jebolan sekolah menengah merupakan proporsi yang semakin besar dari arus migrasi. Penjelasan yang ditawarkan oleh Barnum dan Sabot yaitu bahwa keterbatasan kesempatan kerja di daerah perkotaan akan terbagi menurut tingkat pendidikan, dan hanya mereka yang mengesampingkan pendidikan menengah yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka yang hanya mendapat pendidikan dasar, mendapatkan pekerjaan dengan susah payah, dan dengan demikian proporsi mereka dalam arus migrasi mulai menurun (Todaro, 2006).

Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, karena pendidikan dianggap mampu untuk menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai

pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan. Sumber Daya manusia yang berkualitas diyakini mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang baru, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan tenaga kerja. Ketika pertumbuhan ekonomi di dalam negeri tinggi yang dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja maka berdampak pada pengurangan pengangguran. Pendidikan dalam hal ini berkorelasi negatif terhadap migrasi tenaga kerja ke luar negeri.

Pendidikan adalah salah satu bentuk pengembangan *human resource* yang bermanfaat mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing tenaga kerja dalam hubungannya dengan hidup bermasyarakat. Pendidikan sangat penting dalam menentukan masa depan masyarakat yang lebih baik dan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi utama dalam meningkatkan kualitas *human resource*. Dengan pendidikan yang optimal akan tersedia tenaga-tenaga kerja yang terdidik dan terampil yang dapat mengantarkan ke arah perbaikan dalam pembangunan ekonomi. Dalam kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja, pendidikan diasumsikan sebagai bentuk investasi yang dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi yang menyebabkan pada peningkatan kualitas kerja. Suatu daerah tidak akan sanggup membangun daerahnya jika tidak mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakatnya serta tidak dapat memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada secara optimal, Tilaar (1990).

Salah satu upaya dalam mewujudkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan ini dikenal dengan kebijakan *link and match*. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan mengefisienkan sumber daya manusia dengan sistem pendidikan.

Semakin selaras struktur tenaga kerja yang disediakan oleh sistem pendidikan dengan struktur lapangan kerja maka semakin efisienlah sistem pendidikan yang ada. Karena dalam pengalokasian sumberdaya manusia akan diserap oleh lapangan kerja (Fadhilah Rahmawati, dkk,2004).

Menurut Ace (1994), pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan masyarakat ditentukan oleh produktivitas perorangan. Jika setiap orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang. Teori *human capital* menganggap pendidikan formal merupakan suatu investasi, baik bagi individu maupun masyarakat

Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan lebih terbuka bagi mereka yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini karena pada umumnya tingkat kelangkaan dari lulusan pendidikan yang lebih tinggi juga lebih akurat, sehingga tingkat persaingannya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai juga lebih longgar. Kesempatan kerja bagi lulusan pendidikan tinggi lebih terbuka, sehingga secara teoritis tingkat pengangguran pada kelompok ini cenderung lebih kecil dibanding kelompok yang berpendidikan lebih rendah, namun demikian kesempatan kerja itu akan menyempit dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat pendapatan, mereka yang mempunyai pendidikan lebih tinggi cenderung memperoleh pendapatan yang tinggi pula. Pada dasarnya pendapatan yang lebih tinggi dari mereka yang berpendidikan tinggi bukanlah hasil langsung dari investasi yang lebih mahal pada pendidikan mereka yang lebih tinggi, melainkan dari sesuatu yang kompleks.

Menurut *screening hypothesis* diutarakan oleh Psacharopoulos

(Bellante dan Jackson, 1990) majikan pada umumnya mengetahui bahwa rata-rata tamatan pendidikan lebih tinggi mempunyai karakteristik individu yang relatif lebih unggul sehingga ia mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata mereka yang pendidikan rendah. Maka karena tingkat pendidikan dijadikan alat penyaringan (*screening device*) maka majikan cenderung mengutamakan mereka yang berpendidikan lebih tinggi untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia, jika mereka yang berpendidikan tinggi mau menerima upah yang sama dengan mereka yang berpendidikan rendah, akibatnya peluang kerja yang tersedia dari majikan bagi yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih luas dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah. Walaupun demikian keberhasilan mereka menyelesaikan pendidikan sampai pada pendidikan tinggi sekalipun belum merupakan jaminan segera mendapatkan pekerjaan.

Syahriani (2007) menyatakan banyak faktor yang memotivasi para pekerja Indonesia memilih bekerja di luar negeri diantaranya peluang kerja yang terbatas, upah yang rendah, dan kemiskinan mendorong seseorang meninggalkan negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Para migran ini pergi ke negara tujuan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding negara asalnya.

Sejumlah ekonom berpendapat bahwa modal manusia sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi karena modal manusia membawa eksternalitas positif. Eksternalitas adalah dampak dari tindakan seseorang terhadap orang-orang di sekelilingnya. Seseorang yang berpendidikan, misalnya mungkin memiliki gagasan – gagasan tentang cara terbaik untuk membuat barang dan jasa. Jika gagasan – gagasan ini masuk ke dalam pool pengetahuan masyarakat, semua orang bisa memanfaatkannya, maka gagasan - tersebut merupakan manfaat eksternal dari pendidikan. Dalam hal ini, manfaat pendidikan bagi masyarakat lebih

besar daripada manfaatnya bagi individu. Argumen ini menjustifikasi besarnya subsidi untuk investasi dalam modal manusia yang kita lihat dalam pendidikan publik, Mankiw (2003)

S. Everet (1966) yang berkenaan dengan faktor pendorong dan faktor penarik seseorang untuk bermigrasi antar negara. Antara faktor pendorong dari negara asal pekerja migran ialah pertimbangan gaji yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya akses sosial masyarakat di negara asal. Sementara faktor penarik di negara penempatan ialah gaji yang kompetitif, rendahnya tingkat pengangguran dan kecenderungan seseorang meninggalkan negara asalnya.

Faktor Pendapatan Per Kapita

Setiap manusia memiliki keinginan untuk hidup sejahtera, sejahtera menunjuk pada suatu keadaan yang serba baik atau suatu kondisi manusia, dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur dan sehat. PDRB perkapita merupakan salah satu faktor pendorong terhadap migrasi ke luar negeri. Hal ini didasari dengan asumsi bahwa PDRB perkapita mempunyai hubungan langsung terhadap perbedaan tingkat upah antara negara. Tingkat kesejahteraan suatu negara salah satunya nampak pada PDRB perkapita, dimana terdapat hubungan yang positif antara tingkat PDRB perkapita dengan tingkat kesejahteraan sosial.

Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi standar hidup material (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan).

Variabel pendapatan perkapita, keaksaraan orang dewasa, dan ketidakstabilan politik bernilai negatif. Pendapatan perkapita konsisten dengan argumen yang menyatakan bahwa ekonomi yang tumbuh dapat mencegah migrasi keluar. Keaksaraan orang dewasa bahkan signifikan 5 persen. Artinya, arus migrasi sangat sensitif terhadap ting-

kat melek huruf orang dewasa. Upaya pencegahan emigrasi dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia (Agboola dan Acupan 2010). Hal ini bertentangan dengan teori modal manusia yang mengatakan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kecenderungan bermigrasi. Hasil ini mungkin mencerminkan migran Filipina yang kebanyakan merupakan pekerja berketerampilan rendah yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi untuk bermigrasi sehingga akan berhubungan negatif dengan pengembangan modal manusia.

Libman, dkk (2012) melakukan penelitian di India tentang hubungan migrasi dengan kualitas perlindungan HAM dan kesejahteraan ekonomi. Di beberapa daerah di India memang mengalami kondisi yang rawan terhadap perlindungan HAM yang dapat mengancam keselamatan individu. Hasilnya, migrasi intra-nasional di India signifikan terhadap perbedaan kondisi ekonomi dan politik. Sedangkan untuk kualitas perlindungan HAM dan kesejahteraan ekonomi di negara tujuan merupakan salah satu faktor yang menentukan migrasi.

Todaro dan Stephen C. Smith (2006) mengungkapkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat

batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Pendapatan perkapita mempunyai dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Pendapatan per kapita yang tinggi menjadi indikator makmurnya penduduk suatu negara. Hal ini berdampak pada tingginya konsumsi, konsumsi yang tinggi menyebabkan permintaan akan barang dan jasa mengalami peningkatan, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan permintaan tenaga kerja. Manakala permintaan tenaga kerja mengalami peningkatan maka berdampak pula pada tingginya penyerapan tenaga kerja. Agboola dan Acupan (2010) menyatakan bahwa tenaga kerja yang tidak bisa memasuki pasar tenaga kerja di negara asal akan memilih menjadi migran internasional untuk mencari peluang bekerja di negara lain.

Berapa Hasil Studi Terdahulu

Susilowati (1998) dan Waridin (2002) mengemukakan hasil studinya tentang beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi TKI ke luar negeri, diantaranya adalah : faktor sosial, ekonomi, dan politik. Para TKI yang berusia muda dan berpendidikan relatif tinggi cenderung untuk tidak menetap secara permanen. Sedangkan faktor lain yang diduga mempengaruhi niat migrasi responden dalam bekerja di luar negeri secara statistik tidak dapat menjelaskan bagaimana fenomena dari niat TKI responden untuk bekerja dan menetap di luar negeri.

Penelitian Sanis S (2010) yang berjudul “Analisis Pengaruh Upah, Lama Migrasi, Umur, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Minat Migrasi Sirkuler Penduduk Salatiga ke Kota Semarang. Dalam penelitian tersebut tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh upah, lama migrasi, umur, dan tingkat pendidikan Salatiga ke Kota Semarang. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan upah dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat migrasi

sirkuler penduduk Salatiga ke kota Semarang sedangkan lama migrasi dan umur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat migrasi sirkuler penduduk Salatiga ke kota Semarang.

Wijoyo (2011) yang berjudul “Determinan migrasi netto internasional di ASEAN+6 (Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Arab Saudi) selama periode waktu 1980-2010 dan pola migrasi keluar Indonesia dari tahun 1994-2008”. Tingkat migrasi netto menjadi variabel dependen model ASEAN+6, sedangkan persentase migrasi keluar Indonesia menjadi variabel dependen untuk model migrasi Indonesia. Model Panel GLS-LSDV dipergunakan untuk menjelaskan kedua model. Dari hasil analisis, mengindikasikan bahwa untuk kasus ASEAN+6 faktor penarik (pendapatan perkapita) lebih kuat dibandingkan faktor pendorong (tingkat pengangguran), sementara untuk Indonesia hanya rasio pendapatan perkapita yang terbukti berkorelasi positif dengan migrasi keluar Indonesia.

Rustariyuni (2013) yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat migran melakukan mobilitas non permanen ke Kota Denpasar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh upah, lama melakukan mobilitas sirkuler, umur dan tingkat pendidikan secara simultan dan parsial terhadap mobilitas sirkuler ke Kota Denpasar serta untuk mengetahui variabel yang berpengaruh dominan terhadap mobilitas sirkuler ke Kota Denpasar. Metode penelitian ini menggunakan data primer dengan alat analisis *binary logistic* karena variabelnya bersifat dikotomi yaitu menggunakan variabel *dummy*, variabel bebasnya merupakan kombinasi antara matrik dan numerik (non-numerik). Dari hasil perhitungan rumus Slovin diperoleh jumlah sampel 82 orang responden, akan tetapi penelitian ini dilakukan sebanyak 90 responden. Hasil penelitian variabel umur, tingkat pendidikan, lama melakukan mobilitas dan upah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan minat melakukan

mobilitas ke Kota Denpasar. Variabel tingkat pendidikan dan upah secara parsial berpengaruh positif terhadap keputusan minat melakukan mobilitas ke Kota Denpasar

Budijanto (2015) yang berjudul “ Migrasi Internasional TKI dan pemanfaatan remitansi di daerah asal. Penelitian ini menjelaskan berbagai kondisi yang melatarbelakangi rumah tangga TKI yang termotivasi melakukan migrasi Internasional: pengiriman remitansi ke daerah asal, dan dampak migrasi Internasional TKI terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan budaya pada rumah tangga keluarga TKI di daerah asal. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif, pengumpulan data dengan teknik wawancara. Analisis data dengan analisis deskriptif dan *partial least square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor demografis, faktor sosial ekonomis dan faktor sosial budaya sebagai faktor pendorong terhadap tingginya motivasi migrasi Internasional TKI dari daerah asal, 2) faktor lingkungan bekerja TKI dan faktor sosial ekonomi TKI di Luar Negeri, yang menentukan tingginya remitansi ke daerah asal 3) faktor migrasi dan remitansi yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekonomi sosial, budaya di daerah asal.

Allo (2016) yang berjudul “ perkiraan pola migrasi antar provinsi di Indonesia: pendekatan demografi-ekonomi ”. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel rasio UMP/KHL dan PDRB perkapita memiliki dampak positif dan signifikan (secara berturut-turut (0.2501 dan 0,2742). Sedangkan variabel Indeks Gini memiliki dampak negatif, tetapi tidak signifikan (-0.0730)

Puspitasari (2016) yang berjudul “faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan provinsi di indonesia ”. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitiannya yaitu jumlah pengangguran, PDRB per kapita dan rata-rata lama menempuh pendidikan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel jumlah

pengangguran, PDRB per kapita, rata-rata lama seseorang menempuh pendidikan, dan jumlah penduduk miskin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja keluar Indonesia. Selanjutnya, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin secara parsial berpengaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Variabel rata rata lama seseorang menempuh pendidikan dan PDRB perkapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi.

Referensi

- Agbola, F.W. & Acupan, A.B. 2010. *An Empirical Analysis of International Labour Migration in the Philipinnes*. Economic System 34: 386-396
- Boque 1952. *"A Metodological Study of Migration and Labour Mobility in Michigan and Ohio in 1947"* oxford, Ohio: Scrips Foundation, Miami University.
- Budijanto, 2015. *Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia dan Pemanfaatan Remitansi di Daerah Asal Malang*: International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG), Vol 1, No.1 April 2015
- Castles, M.J., and Miller, Mark, J. 2009. *The Age Of Migration, Fourth Edition: International Population Movements In The Modern World 4th (fourth) Edition*. Geneva: Institut de Hautesetudes Internationales et du Develompent. Palgrave Macmillan Publisher.
- Djoko, Sri M.A.S. dkk 2017. *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*. Bandung: UNPAD Press
- Hugo, J. Graeme. 1978. *Population Mobility in West Java*.Yogjakarta.
- Lee, S. Everett. 1976. *Suatu Teori Migrasi*. Diterjemahkan oleh Daeng Hans. Jogjakarta.

- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Persebaran Penduduk Dan Kebijaksanaannya Di Indonesia*. [on line] Available. Http: // www.google.com
- Mulyadi S. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Osaki, K. 2003. *Migrant Remittances in Thailand : Economic Necessity or Social Norm?.* Journal of Population Research, 20 (2) 203-204.
- Pressman, Steven.2002. *Lima Puluh pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Puspitasari. Wahyu Indah 2016. *“Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan provinsi di Indonesia”*. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 02 (1).
- Rachmadi, Mahendra Satrio. 2010. *“Analisis Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dengan Model Gravitasi”* Universitas Airlangga.
- Rusli Said, 1985. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi & Sosial.
- Sanniawati, Dinna. 2006. *Analisis Sosial Ekonomi Demografi Pekerja Perempuan Industri Rumah Tangga Pengolahan Pangan di Surakarta*. Surakarta: FE UNS
- Simanjuntak, Payaman J, 1985. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: BPFE UI
- Stark O., Bloom D. E. 1985. *The New Economics of Labour Migration*. American Economic Review, 75:173-8.
- Susilowati, Sri Heri. 2008. *“Dampak Mobilitas Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan”*.
- , 1998. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermigrasi Ke Malaysia (Studi Kasus di Kawasan Selangor, Malaysia)*. Majalah penelitian lembaga penelitian, UNDIP. Tahun X, No. 40, Desember 1998.

- Todaro, Michael, 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, terjemahan, penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Edisi ke delapan jilid I.
- Wirawan, I.B (2006). *Analisis keputusan TKI bekerja ke luar negeri (Studi Kasus: Kabupaten Malang)*. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Wolfgang Eggert. 2007. *Education, Unemployment and Migration*. CESifo Working Paper No. 2119. Jerman.

Bab IV

Kajian Teoretis Penyerapan Tenaga Kerja, Upah, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

*Ayu Latifah Alfisyahrin Yunus
Madris*

Fokus utama dari kajian teoretis ini adalah pembahasan tentang upah, pengeluaran pemerintah, investasi, mutu SDM, pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Perkembangan studi Ilmu ekonomi makro mempelajari struktur, kinerja dan perilaku ekonomi secara keseluruhan. Pusat perhatian dari penelitian ilmu ekonomi makro ialah pemahaman terhadap faktor-faktor penentu dari kecenderungan umum dalam perekonomian

yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, inflasi, dan transaksi internasional. Kinerja perekonomian yang baik tentu saja dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan inflasi yang rendah serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di mana terdapat hubungan yang erat antar kebijakan dan kinerja perekonomian (Snowdown dan Vane, 2005).

Pemikiran Keynes (1936) merupakan tonggak ilmu ekonomi makro modern, meskipun sebelum itu Klasik telah membahas mengenai tenaga kerja, siklus bisnis, inflasi dan pertumbuhan, namun pembahasannya menggunakan pendekatan mikro, dengan menggunakan mekanisme pasar. Kemudian depresi besar menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan asumsi kesempurnaan informasi tidak bisa diandalkan. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam depresi besar, mekanisme pasar gagal dalam mengoordinasikan perekonomian. Sehingga Keynes (1936) mengatakan perlu adanya pihak ketiga (pemerintah) melakukan koordinasi untuk mengatasi kegagalan tersebut.

Kehadiran teori Keynes terutama berkaitan dengan ide kegagalan pasar, dan pengangguran yang terpaksa (*involuntary unemployment*) mempersulit rekonsiliasi antara kubu Keynes dan Klasik (Snowdown dan Vane, 2005). Teori keseimbangan umum mengatakan bahwa akan terjadi keseimbangan di setiap pasar. Menurut pandangan klasik, apabila terjadi surplus tenaga kerja dalam hal ini pengangguran dapat dicegah dengan mekanisme harga di pasar bebas agar permintaan yang tercipta dapat menyerap semua penawaran.

Mis-alokasi sumber daya yang dapat menyebabkan permasalahan tenaga kerja ini bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004). Sehingga jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun pada tingkat keseimbangan yang menyebabkan biaya produksi akan turun dan per-

mintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena produsen mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari penurunan upah.

Pasar Tenaga Kerja mengikuti pasar barang apabila *output* naik maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau penyerapan tenaga kerja juga naik begitupun sebaliknya. Keynes menekankan bahwa proses makro adalah proses menuju keseimbangan umum (*general equilibrium*). Apabila terjadi suatu perubahan (misalnya, I atau G atau MS berubah), maka akan mempunyai pengaruh berantai terhadap semua pasar (Mankiw, 2008).

Menurut Keynes (1936), hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar seluruh sektor perekonomian dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro et al., 2005).

Greenwald dan Stiglitz (1987) berpendapat bahwa kedua aliran Klasik dan Keynes dapat disatukan dengan dua cara, yaitu teori makro diaplikasikan dalam teori mikro (pendekatan *New Clasical*), selanjutnya teori mikro diaplikasikan dalam teori makro (pendekatan Keynesian Baru). Kemudian, pemikiran Keynes dikritik oleh *new classical* yang dipelopori oleh Lucas yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah untuk stabilitas justru akan membuat gejolak perekonomian semakin tidak stabil. Kelompok ini berpendapat bahwa perekonomian kapitalis secara alamiah membawa kestabilan sehingga tidak perlu ada campur tangan pihak ketiga, yang dimana pihak ketiga hanya akan menyebabkan adanya kejutan (*shock*) yang tidak diantisipasi dan merupakan

sumber terjadinya gejolak perekonomian. Sehingga dalam hal ini campur tangan pemerintah tidak diperlukan.

Sama halnya dengan pemikiran Keynes, Davidson (1998) sebagai tokoh dari pemikiran *Post Keynesian*, berpendapat bahwa *involuntary unemployment* dapat dijelaskan dari ketidakcukupan *effective demand*, ketidakstabilan nilai tukar, dan mobilitas internasional dari keuangan yang menciptakan ketidakpastian dapat melemahkan kepercayaan produsen dalam menciptakan investasi yang dapat mengurangi pengangguran.

Kemudian tenaga kerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapatkan pekerjaan (Sukirno, 2010). Pandangan lain tentang kesempatan kerja adalah kesempatan kerja sebagai lapangan pekerjaan yang sudah diisi (*employment*) dan lapangan pekerjaan yang masih lowong (*vanacy*). Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut timbul kebutuhan tenaga kerja. Adanya kebutuhan tersebut berarti ada kesempatan kerja bagi orang yang menganggur. Dengan diisinya lapangan pekerjaan oleh para penganggur itu, maka berarti kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki/diisi (Hakim, 2004).

Selanjutnya penyerapan tenaga kerja yang dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja, atau sumber daya produktif lainnya, adalah permintaan turunan. Ini berarti bahwa permintaan tenaga kerja bergantung pada permintaan akan barang atau jasa yang digunakan untuk diproduksi atau disediakan. Di bidang manufaktur, tenaga kerja diminta untuk berkontribusi terhadap produksi produk-produk seperti mobil, pesawat televisi, atau roti. Dengan demikian, penurunan permintaan mobil akan mengurangi permintaan pekerja otomotif. Di sektor jasa, tenaga kerja dibutuhkan oleh perusahaan karena secara langsung memberikan keuntungan terhadap konsumen. Peningkatan permintaan akan layanan penitipan anak, misalnya, akan meningkat-

kan permintaan akan pekerja penitipan anak. Fakta bahwa permintaan tenaga kerja adalah permintaan turunan berarti bahwa kekuatan permintaan untuk jenis tenaga kerja tertentu akan bergantung pada (1) seberapa produktif tenaga kerja tersebut dalam membantu menciptakan suatu produk atau jasa dan (2) nilai pasar dari barang itu (McConnell, 2017).

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sulistiyanti (2010) di dalam pasar kerja, sumber dari permintaan terhadap tenaga kerja ialah dunia usaha yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Skala *output* yang akan dihasilkan oleh dunia usaha menentukan seberapa banyak faktor-faktor produksi akan digunakan dalam proses produksi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, yang permintaannya antara lain ditentukan oleh; tingkat substitusi antara tenaga kerja dengan faktor produksi lain, permintaan terhadap *output* yang dihasilkan, tingkat substitusi antara tenaga kerja dengan faktor produksi lain, besarnya upah pekerja, motivasi perusahaan dan produktivitas tenaga kerja.

Teori pertumbuhan Harrod Domar yang merumuskan pertumbuhan ekonomi dalam keadaan mantap (*steady growth*) sebagai fungsi linier terhadap besarnya PDB dengan gradient arah garis adalah perkalian antara rasio modal produksi (kebalikan COR) dengan kecenderungan menabung marginal (MPS). Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja yang berasal dari pertumbuhan PDB tergantung pada besar kecilnya COR (*Capital Output Ratio*) dan MPS (*Marginal Propensity to Save*) serta besarnya bagian pertumbuhan ekonomi itu yang dialokasikan untuk kesempatan kerja baru (Todaro, 2013).

Teori pertumbuhan Robert M. Solow dan James E. Meade, yang mengkritisi kelemahan teori Harrod Domar yang dianggap sangat rentan terhadap bahaya inflasi dan depresi berkepanjangan jika asumsi syarat keseimbangan tidak dipenuhi (*warranted growth* tidak sama dengan *natural growth*). Kemudian Solow menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang mengizinkan capital dan tenaga kerja untuk tumbuh pada tingkat yang berbeda. Sementara Meade menggeneralisir lebih jauh dengan menambahkan faktor tanah dan trend waktu sebagai pengaruh perkembangan teknologi.

Kemudian secara umum Harijono (2010) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan kebutuhan *input* tenaga kerja, sehingga akan memperluas penyerapan kesempatan kerja.

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Mutu Sumberdaya Manusia

Secara konseptual, perkembangan terpenting dalam kebangkitan ekonomi tenaga kerja modern adalah revolusi '*Human capital*' yang terkait dengan Gary Becker dan Jacob Mincer. Analisis modal manusia berkonsentrasi pada pengambilan keputusan individu, terutama yang berkaitan dengan penawaran tenaga kerja yang sering dikaitkan dengan sosiologi daripada ekonomi. Sebelum *Human capital* Becker, banyak ekonom tenaga kerja cenderung menganggap keputusan pasokan tenaga kerja hanya didasarkan pada rasionalitas ekonomi dan karena teori dan analisis yang ketat dipandang sebagai bidang subjek yang buruk. Dengan menempatkan keputusan mengenai pendidikan dan bentuk lain dari peningkatan keterampilan dalam kerangka investasi dan mengembangkan implikasi seperti pada upah, waktu kerja, dan beragam bentuk perilaku lainnya, analisis modal manusia secara

fundamental mengubah cara para ekonom melihat penawaran tenaga kerja (Macmillan, 2018).

Human capital menurut Backer ialah manusia bukan hanya sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Kemudian Davenport menyatakan bahwa *human capital* sebagai seluruh usaha yang dibawa tenaga kerja untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka yang termasuk juga didalamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu (Atmanti, 2005). Sehingga *human capital* merupakan nilai dan atau kualitas dari seseorang atau tenaga kerja yang menentukan seberapa potensial orang atau tenaga kerja tersebut bisa berproduksi dalam perekonomian terutama menghasilkan barang dan jasa (Suaidah dan Cahyono, 2013).

Pendidikan termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang sumber daya manusia, yang dimana investasi dalam bentuk pendidikan dinamakan dengan *Human capital* (teori modal manusia). Pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kesempatan kerja yang ada, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula produktivitasnya. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru (Sari, 2013).

Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai sebagai stock manusia, dimana nilai stock manusia setelah mengikuti pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan nilai yang dapat berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional (*social benefit*) individu dibandingkan dengan sebelum mengecap pendidikan (Idris, 2007).

Investasi perusahaan dalam bentuk pelatihan umum dapat menjadi investasi yang agak berisiko bagi pemberi kerja, karena jika pemberi kerja mencoba mempertahankan kenaikan upah pasca-pelatihan di bawah peningkatan produktivitas pendapatan marjinal, pekerja yang terlatih dapat memilih keluar dan penyerapan tenaga kerja dapat menurun. Karena dengan pelatihan umum juga dapat meningkatkan produktivitas dengan pemberi kerja lain yang menyebabkan pekerja terlatih memiliki insentif untuk mencari tawaran upah yang lebih tinggi dari pemberi kerja yang tidak memiliki biaya pelatihan untuk dibayar (Ehrenberg, 2012).

Kemudian menurut Becker (1993) investasi pada pelatihan umum dapat terjadi hanya jika terdapat perjanjian tertulis antar tenaga kerja dan pemberi kerja karena biaya mobilitas yang tinggi. Sehingga perusahaan sering berinvestasi dalam pelatihan umum untuk para pekerjanya, dan investasi ini disebut-sebut sebagai alasan lain untuk percaya bahwa pasar tenaga kerja dicirikan oleh kondisi monopsonistik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zimmer (2016) mengenai pentingnya pendidikan terhadap pengangguran memperoleh bahwa pada jangka pendek pendidikan penting dalam mempengaruhi kemampuan individu yang menganggur agar dapat terserap pada lapangan pekerjaan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan pengangguran akan muncul dengan upah yang sebanding dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan baru.

Mengingat pentingnya peran pendidikan, maka investasi modal manusia melalui pendidikan di negara berkembang sangat diperlukan walaupun investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang secara makro dimana manfaatnya baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Keterbatasan dana mengharuskan adanya penetapan prioritas dari berbagai pilihan kegiatan investasi di bidang pendidikan

yang sesuai, dalam jangka panjang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Investasi yang menguntungkan adalah investasi modal manusia untuk mempersiapkan kreativitas, produktivitas dan jiwa kompetitif dalam masyarakatnya (Atmanti, 2005).

Tingkat pendidikan angkatan kerja berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka kesempatan kerja akan semakin besar. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi seseorang akan lebih mudah mengakses informasi pekerjaan, memenuhi kualifikasi yang diinginkan pasar kerja sehingga memperbesar kemungkinan untuk diterima bekerja (Sadariawati, 2010). Hal tersebut sejalan dengan penelitian Asiedu (2004) yang mengemukakan bahwa infrastruktur yang baik, pendapatan yang lebih tinggi, keterbukaan terhadap perdagangan dan angkatan kerja yang terdidik mempunyai dampak yang positif terhadap kesempatan kerja di Afrika.

Berbagai Kajian Teoretis Terkait dengan Investasi

Todaro (2013) menyatakan bahwa sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi pada masa yang akan datang disebut investasi. Sehingga investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelian barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, dimana investasi dapat disebut juga sebagai penanaman modal atau pembentukan modal.

Menurut Ismei (2015), nilai investasi dapat menjadi salah satu faktor penentu laju pada pertumbuhan ekonomi dan selain dapat mendorong kenaikan *output* secara signifikan, investasi juga akan meningkatkan permintaan *input* yaitu tenaga kerja. Sehingga dengan adanya investasi dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan mempengaruhi penyediaan kesempatan kerja.

Peningkatan investasi pada suatu perusahaan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan dapat meningkatkan jumlah *output* yang akan dihasilkan, sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Ismei *et al*, 2015).

Adapun teori yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, modal fisik dan tenaga kerja yaitu teori fungsi produksi Cobb Douglas dalam teori ini menjelaskan adanya pembagian pendapatan nasional diantara modal dan tenaga kerja tetap konstan selama periode yang jangka panjang. Dengan kata lain, ketika perekonomian mengalami pertumbuhan yang baik, pendapatan total pemilik modal (investor) dan pendapatan total pekerja tumbuh pada tingkat yang nyaris sama (Mankiw, 2008).

Investasi yang ditanamkan pada suatu negara atau daerah ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu tingkat bunga, ekspektasi tingkat return, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat laba perusahaan, situasi politik, dan kemajuan teknologi (Sondakh, 2017). Adanya kegiatan investasi di suatu Negara atau daerah dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dan perluasan kesempatan kerja, karena investasi dapat menambah jumlah daripada kapital. Tanpa investasi maka tidak akan ada pabrik/mesin baru, dan dengan demikian tidak ada ekspansi.

Harrod Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Dengan asumsi "*full employment*", maka semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, dimana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja (Putri, 2018). Dengan

begitu, perekonomian dapat menyerap seluruh kelebihan tenaga tenaga kerja, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja.

Kemudian Teori pembangunan Lewis yang menjelaskan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja berasal dari investasi di sektor industri dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern akan menimbulkan perluasan *output* yang akan menyebabkan pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan *output* dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern (Todaro, 2013).

Selanjutnya hasil penelitian Sulistiawati (2012) menyatakan bahwa investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan begitu pula pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia tetapi lain halnya dengan hubungan investasi dan penyerapan tenaga kerja yang berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif. Kenaikan investasi akan diikuti dengan kenaikan pada penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia.

Kaitan Teoretis Upah Terhadap Investasi, Mutu Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Penyerapan Tenaga Kerja

Hart (1980) berpendapat bahwa pada negara maju upah merupakan alat seleksi yang digunakan untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dengan upah sebagai pendorong produktivitas serta dapat menjadi mekanisme insentif bagi pekerja. Lain halnya pendapat Malcomson (1981) yang mengemukakan bahwa pekerja akan menuntut upah berdasarkan tingkat produktivitasnya dengan besaran upah yang

dibayarkan dapat berada di atas ataupun di bawah tingkat upah minimum.

Selanjutnya Wood (1994) menyatakan bahwa tenaga kerja yang berketerampilan rendah di negara maju dapat dirugikan dengan adanya hubungan perdagangan dengan negara berkembang yang dapat mengurangi upah pekerja berketerampilan rendah di Amerika Serikat dan Eropa. Sama halnya dengan pendapat Krugman (1994) yang juga berfokus pada pergeseran permintaan relatif untuk pekerja dengan keterampilan berbeda. Di Amerika Serikat perubahan teknologi telah diserap oleh ketidaksetaraan upah yang lebih besar. Sementara di Eropa, preferensi untuk perbedaan upah yang lebih rendah menyebabkan upah sebagian besar tenaga kerja meningkat yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran (Bertola dan Ichino, 1995).

Mankiw (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja ialah upah. Penetapan tingkat upah oleh pemerintah daerah akan berdampak terhadap tinggi rendahnya penyerapan tenaga kerja yang terjadi di suatu daerah. Peningkatan nilai upah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kebijakan upah minimum dapat mengakibatkan penurunan jumlah orang yang bekerja di suatu wilayah (Kaufman dan Hotchkiss, 1999)

Kemudian permintaan tenaga kerja sangat berperan mengurangi pengangguran melalui upah minimum. Apabila kenaikan upah minimum yang dapat menyebabkan berkurangnya jumlah permintaan tenaga kerja, diimbangi dengan kenaikan investasi, tentunya hal ini akan memperbesar permintaan tenaga kerja (Mahayana, 2014). Hal yang sama diungkapkan oleh Stigler (1946) yang menyatakan bahwa upah yang melebihi upah ekuilibrium menyebabkan penawaran tenaga kerja akan melebihi permintaan tenaga kerja yang menciptakan surplus tenaga kerja. Sehingga akan terdapat persaingan diantara tenaga kerja dalam memperebutkan pekerjaan.

Wicaksono (2002) mengatakan bahwa secara teoretis, pada pasar sempurna, pengangguran dapat diartikan dengan leisure, karena pengangguran yang terjadi bersifat voluntary. Sementara penetapan tingkat upah minimum oleh pemerintah dapat menyebabkan pengangguran involuntary. Di Indonesia terdapat peraturan penetapan upah minimum, secara keseluruhan pasar tenaga kerja bersifat fleksibel, yang artinya penentuan upah dapat dilakukan secara individual maupun melalui serikat pekerja dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh UMR.

Selanjutnya terdapat pengaruh timbal balik dalam hubungan internal antara upah dan pertumbuhan ekonomi. Singkatnya, pengaruh timbal balik antara upah dan pertumbuhan ekonomi tercermin dalam dua aspek. Bagi pekerja, upah berarti pendapatan, kenaikan upah akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan dapat mendorong permintaan konsumsi. Pada saat yang sama, upah berarti biaya perusahaan, peningkatan upah meningkatkan biaya produksi perusahaan yang dapat mengurangi efisiensi produksi perusahaan dan pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Melalui model simulasi upah multi-atribut yang ditingkatkan, diperoleh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan siklus dengan menggunakan analisis data aktual USA 1982 -2013 tahun (Xu, 2015).

Kemudian, rendah atau tidak sesuainya tingkat upah yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta tanggungannya merupakan permasalahan yang langsung menyentuh para pekerja (Mansur et al., 2014). Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah maka pekerja dapat menolak mendapatkan upah tersebut yang akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran.

Teori kekakuan upah (*wage rigidity*) dijelaskan oleh Salvatore (2007). Menurut Salvatore teori yang signifikan untuk menjelaskan

keadaan perekonomian di suatu daerah khususnya di Indonesia adalah teori kekakuan upah (*wage rigidity*), yaitu gagalnya upah melakukan penyesuaian agar penawaran dan permintaan tenaga kerja sama. Jika kebijakan upah minimum diterapkan di atas tingkat keseimbangannya maka terjadi kekakuan upah, dimana upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerja sehingga timbul pengangguran (Sarimuda dan Soekarnoto, 2014).

Berbeda dengan teori kekakuan upah, penelitian yang dilakukan oleh Poyoh et al. (2017) yang melihat hubungan upah dan pengangguran di Sulawesi Utara bersifat negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat kenaikan upah berada di bawah titik keseimbangan pasar yang menyebabkan para penganggur segera mencari pekerjaan. Kemudian *Efficiency Wage Theory* menyatakan bahwa tingkat upah yang tinggi dapat mendorong para pekerja untuk giat bekerja dan meningkatkan produktivitasnya. Sehingga dengan pendapatan yang tinggi maka pekerja akan membeli makanan yang lebih bergizi untuk menambah energinya yang akan menambah tingkat produktivitasnya (Sumarsono, 2003).

Lain halnya dengan studi Mazumdar (2007) di India, yang mengamati perubahan kesempatan kerja berkaitan dengan perubahan tingkat upah. Mazumdar menyimpulkan bahwa ada *trade-off* antara *employment-growth* dengan *wage-growth*, artinya jika ada pertumbuhan upah, maka pertumbuhan kesempatan kerja menurun dan sebaliknya jika ada penurunan upah, maka kesempatan kerja akan meningkat. Hal ini menjelaskan bahwa upah yang tinggi akan menurunkan permintaan tenaga kerja.

Menurut Mankiw (2008) terdapat dua alasan terjadinya pengangguran, pertama karena dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan

antara para pekerja dengan pekerjaan yang dapat menciptakan pengangguran friksional. Kedua ialah kekakuan upah yang dimana ketika gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaanya yang menciptakan pengangguran struktural. Sehingga dari kedua penyebab tersebut dapat diperoleh dua jenis pengangguran berdasarkan penyebab terbentuknya.

Menurut Keynes (1963) upah sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak terkait dengan pasar tenaga kerja dan mekanisme pembentukan upah tidak mampu mengembalikan keseimbangannya. Faktor riil yang membuat penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja cenderung seimbang bukanlah upah tetapi perubahan ketersediaan lapangan kerja, karena pengusaha menanggapi naik atau turunnya permintaan pasar akan produk dengan memberhentikan atau merekrut tenaga kerja. Setelah titik pekerjaan penuh tercapai, kenaikan upah memerlukan perluasan pasokan tenaga kerja dan kemudian aturan neoklasik berlaku dimana penentuan upah menggunakan mekanisme harga (Kryńska, 2010).

Kaitan Teoretis Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Mutu SDM dan Penyerapan Tenaga Kerja

Laksono (2016) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperbesar *output* yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu, juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan agregat sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan *output* produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan *input* produksi, salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga akan tercipta kesem-

patan kerja baru. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan kerja baru bagi masyarakat. Proyek-proyek yang dibiayai oleh pemerintah seperti membangun jalan, sekolah, atau fasilitas lain umumnya bersifat padat karya sehingga dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja dalam hal ini permintaan tenaga kerja akan meningkat.

Kemudian berdasarkan analisis empiris Brückner (2012) menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja dalam hal ini penawaran tenaga kerja, lapangan kerja (permintaan tenaga kerja), dan tingkat pengangguran dapat meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap guncangan pengeluaran pemerintah di banyak negara OECD. Hasilnya kuat untuk skema identifikasi alternatif, penyertaan variabel kontrol, dan sub periode yang berbeda untuk sebagian besar negara kecuali Amerika Serikat, di mana respons pengangguran terhadap guncangan fiskal tampaknya telah mengubah pola secara substansial dari waktu ke waktu. Sejalan dengan hasil penelitian Isiaka (2020) menunjukkan bahwa dampak pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran bersifat ambigu. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja tetapi belum tentu mengurangi pengangguran.

Menurut Harrod Domar terdapat berbagai macam pengeluaran pemerintah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini peran investasi yang menjadi aspek utama, dimana investasi berdampak positif melalui proses multiplier effect terhadap permintaan agregat dan penawaran agregat melalui pengaruh kapasitas produksi (Todaro, 2013).

Kemudian menurut pengeluaran pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai investasi yang menambahkan kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang, pengeluaran langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagai penghemat pengeluaran

an yang akan datang. Tidak hanya itu pengeluaran pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar dan penyebaran tenaga kerja yang lebih luas (Sodik, 2007).

Selanjutnya Cottarelli (2012) dalam studi deskriptif besar pada sampel yang terdiri dari beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dalam bentuk tunjangan pengangguran mengurangi pengangguran ketika didistribusikan dengan jangka waktu yang pendek. Berbeda dengan penelitian Abubakar (2016) yang melakukan kajian mengenai pengangguran di Nigeria tahun 1981-2015 berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah tidak mengurangi pengangguran tetapi malah meningkatkan jumlah pengangguran.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perhitungan pertumbuhan ekonomi tetapi pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan variabel lainnya. Tetapi pengeluaran pemerintah juga menjadi hal yang krusial karena mempunyai efek sosial politis yang strategis sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Tidak hanya itu, pengeluaran pemerintah pun mempunyai efek multiplier terhadap ekonomi makro riil dalam pergerakan jangka pendek dari *output* dan ketenagakerjaan (Samuelson dan Nordhaus, 2010).

Terdapat berbagai macam pengeluaran pemerintah yang dapat memberikan kontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan profitabilitas yang akan mempengaruhi permintaan agregat. Pengaruh terhadap permintaan agregat inilah yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Diamond, 1989).

Selanjutnya penelitian Harijono (2013) yang tidak sepenuhnya sesuai dengan teori makro Keynes, karena walau investasi sektor pemerintah dan swasta berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruhnya terhadap perluasan kesempatan kerja ternyata

lemah. Hal tersebut disebabkan oleh investasi swasta berpengaruh lemah terhadap kesempatan kerja di Provinsi Bali sehingga pengaruh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali terhadap kesempatan kerja pun menjadi lemah pula.

Beberapa Hasil Kajian Empiris Sebelumnya

Terdapat beberapa hasil penelitian dan studi empiris yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan kesempatan kerja. Kasau (2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja melalui investasi dan dampaknya pada Kawasan Timur dan Barat Indonesia. Variabel yang digunakan ialah pengeluaran pemerintah, pembeda intersepsi, pembeda slope 1 (pengeluaran pemerintah terhadap kesempatan kerja), dan pembeda slope 2 (investasi terhadap kesempatan kerja). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Struktural Equation Modelling* (SEM) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi dan kesempatan kerja baik langsung, tidak langsung maupun secara total. Demikian juga halnya pengaruh investasi terhadap kesempatan kerja baik di KTI maupun di KBI. Namun pengaruh di KTI lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh di KBI.

ŞERB (2016) dalam penelitiannya mengenai analisis tingkat kesempatan kerja dari perspektif faktor-faktor penentunya dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, imigran, dan kesempatan kerja di Romania. Penelitian ini menggunakan model regresi linear dengan hasil yang diperoleh ialah Hasil penelitian diperoleh jumlah penduduk dan tingkat lapangan kerja terdapat hubungan sebab akibat, dan intensitas yang kuat antara keduanya. Hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa antara proyeksi penduduk dengan variabel penyebab-tingkat lapangan kerja (sumber daya kerja) terdapat

korelasi, pada dasarnya data menunjukkan korelasi deterministik. Tingkat kesempatan kerja telah menurun sebagai akibat dari peningkatan jumlah imigran, sementara antara jumlah total imigran permanen dan tingkat kesempatan kerja terdapat hubungan balik yang lemah.

Jamir (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pendidikan terhadap kesempatan kerja, pendapatan dan kemiskinan di Nagaland dengan variabel yang digunakan adalah pendidikan, kesempatan kerja, pendapatan, dan kemiskinan. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear yang menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pendidikan terhadap pendapatan dan kesempatan kerja menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga maka semakin tinggi pula tingkat pekerjaan dan pendapatan serta diketahui pula bahwa pencapaian pendidikan rumah tangga dan tingkat kemiskinan berhubungan berbanding terbalik.

Sitompul (2019) dalam penelitiannya mengenai analisis dari pengaruh GDP, FDI, dan upah minimum terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia dengan variabel yang digunakan ialah Produk Domestik Bruto (PDB), *Foreign Direct Investment* (FDI), upah minimum, dan Kesempatan Kerja. Model yang digunakan yaitu *Multiple linear regression* dengan hasil yang diperoleh ialah PDB dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia, sedangkan variabel FDI tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara parsial, PDB dan upah minimum masing-masing memiliki pengaruh yang sama, yaitu positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dari ketiga variabel independen tersebut, PDB memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Adeem (2019) dalam penelitiannya mengenai Penentu Sosial-

-Ekonomi Pekerjaan di Pakistan dengan variabel yang digunakan adalah tingkat kesempatan kerja, PDB per kapita, penerimaan pada sekolah menengah, Perdagangan, FDI, stabilitas politik, pembentukan modal tetap bruto, Jumlah uang beredar, dan pengeluaran pemerintah. Model yang digunakan ialah regresi linear dan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PDB per kapita dan pengeluaran pemerintah.

Referensi

- Abubakar, A. B. 2016. *Dynamic Effects of Fiscal Policy on Output and Unemployment in Nigeria: An Econometric Investigation*. *Central Bank of Nigeria Journal of Applied Statistics*, Vol. 7, No. 2: 101–122.
- Adeem, Muhammad Atif; Muhammad Sibte-Ali; Raheel Akhtar. 2019. *Socio-Economic Determinants of Employment: A Case study of Pakistan*. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, Vol. 5, No.1: 71-82.
- Agustina, Neli; Nalyda Yola Althofia. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja di Propinsi Jawa Barat Tahun 2012*. *Jurnal Aplikasi Statistik dan Komputasi Statistik*, Vol. 7, No. 1: 1-20.
- Asiedu, Elizabeth. 2004. *The Determinants of Employment of Affiliates of US Multinational Enterprises in Africa*. *Development Policy Review*, Vol. 22, No.4: 371-379.
- Atiyatna, D. Pratama; Nurlina T. Muhyiddin; Bambang B. Soebyakto. 2016. *Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatra Selatan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 14, No. 1:

8-21.

- Atmanti, Hastarini Dwi. 2005. *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. Dinamika Pembangunan, vol. 2 No. 1: 30- 39.
- Becker, Gary S. 1965. *A Theory of the Allocation of Time*. Economic Journal Vol. 75, No. 299: 493–517.
- Becker, Gary S. 1993. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education 3rd Ed*. London: The National Bureau of Economic Research.
- Bertola, Giuseppe; Andrea Ichino. 1995. *Wage Inequality and Unemployment: United States vs. Europe*. NBER Macroeconomics Annual Vol. 10: 13-54.
- Brückner, Markus; Evi Pappa. 2012. *Fiscal Expansions, Unemployment, and Labor Force Participation: Theory and Evidence*. International Economic Review, Vol. 53, No. 4: 1205-1228.
- Buchari, Imam. 2016. *Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pendidikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11, No. 1: 73-85.
- Cottarelli, C. 2012. *Fiscal Policy and Employment in Advanced and Emerging Economies*. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Davidson, P. 1998. *Post Keynesian Employment Analysis and the Macroeconomics of OECD Unemployment*. The Economic Journal, Vol.108 No. 448: 817-831.
- Diamond, J. 1989. *Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical*, IMF Working Paper, No. 89/45, Washington DC.
- Ehrenberg, Ronald G.; Robert S. Smith. 2012. *Modern Labor Economic Theory and Public Policy 11th Ed*. United States of America:

Pearson Education.

- Gilarso, T. 2004 *Pengantar ilmu ekonomi Mako*. Yogyakarta: Kansius.
- Greenwald, Bruce C.; Joseph E. Stiglitz 1987. *Imperfect information, credit markets and unemployment*. European Economic Review, Elsevier, vol. 31 No. (1-2): 444-456.
- Hakim, Abdul. 2004. *Ekonomi Pembangunan (Cetakan Kedua)*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Harijono, Gatot Setio. 2013. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi*. E- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana: 354-373.
- Hart, O. D. 1980. *A model of imperfect competition with Keynesian features*. University of Cambridge Economic Theory Discussion Paper, No. 29.
- Idris; Ramel Yanuarta. 2007. *Bahan Ajar: Ekonomi Sumber Daya Manusia*. FE UNP.
- Isiaka, Abdulaleem. 2020. *How Does Government Spending Affect Labour Force Participation and Unemployment Within The Wamz Countries?* International Journal of Social Science Research, Vol. 8, No. 2:30-4.
- Ismei, Afriliyanti; Andri Wijanarko; Henny Oktavianti, 2015. *Analisis Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013*. Media Trend Vol. 10 No. 1: 95-113.
- Jamir, Chubakumzukul; T. Zarenthung Ezung. 2017. *Impact of Education on Employment, Income and Poverty in Nagaland*. International Journal of Research in Economics and Social Sciences, Vol. 7, No. 9: 50-56.

- Kasau, Matius Irsan; Rahmat Laan. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Investasi dan Dampaknya pada Kawasan Timur dan Barat Indonesia*. INA-Rxiv Papers, Vol. 2, No. 2: 1-14.
- Kaufman, Bruce E; Julie L Hotchkiss. 1999. *The Economic Labor Markets*. USA: Georgia State University.
- Kawet, Jefry Antonious; Vecky A. J. Masiambow; George M. V. Kawung. 2019. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vo. 19, No. 10: 1-18.
- Keynes, John M. 1936. *The General Theory of Employment. Interest and Money*. London: Macmillan.
- Krugman, P. 1994. *Europe jobless, America penniless*. Foreign Policy (Fall).
- Kryńska, Elżbieta; Danuta Kopycińska. 2010. *Wages in Labour Market Theories*. Folia Oeconomica Stetinensia.
- Laksono, Richat Tri. 2016. *Efektivitas Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Jember*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 10, No. 2: 189 – 202.
- Macmillan, Palgrave. 2018. *The New Palgrave Dictionary of Economics*. United Kingdom: Springer Nature.
- Mahayana, I Made Alit; I Wayan Sukadana. 2014. *Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Pada Permintaan Tenaga Kerja di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, Vol 3, No. 8: 384-394.
- Malcomson, James M. 1981. *Unemployment and The Efficiency Wage*

- Hypothesis.** The Economic Journal, Vol. 91 No. 364: 848-866.
- Mansur, Nirmala; Daisy Engka; Steeva Tumangkeng. 2014. **Analisis Upah Terhadap Pengangguran di Kota Manado Tahun 2003-2012.** Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.14 No. 2: 14-28.
- Mankiw, N. Gregory. 2008. **Teori Makro Ekonomi.** Jakarta: Erlangga.
- Mazumdad, Dipak; Sandip Sarkar. 2007. **Employment Elasticity in Organized Manufacturing in India.** Toronto: Munk Center for International Studies University of Toronto.
- McConnell, Campbell R.; Stanley L. Brue; David A. Macpherson. 2017. **Contemporary Labor Economics.** New York: McGraw- Hill Education.
- Mimbar, lalu; Muhammad Yusuf. 2016 **Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerj di Kabupaten Lombok Barat.** Jurnal Valid, Vol. 13, No. 3: 33-343.
- Ningsih, Ni Made Cahya; I Gst. Bagus Indrajaya. 2015. **Pengaruh Modal Dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak.** Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 8, No. 1: 83- 91.
- Nurhadi, Muh.; Diah Widyawati. 2019. **Dampak Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Formal dan Informal: Analisis Spasial.** Jurnal Ekonomi-Qu, Vol. 9, No. 1:97-117.
- Poyoh, Arfan; Gene H. M. Kapantow; Juliana R. Mandei. 2017. **Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara.** Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, Vol. 13 No. 1A: 55 – 66.
- Putri, Nofandillah Arumasyah; Aris Soelistyo. 2018. **Analisis Pengaruh Upah, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016.** Jurnal Ilmu

- Ekonomi, Vol. 2 No.3: 357-371.
- Rochmani, Tanti Siti; Yunastiti P.; Agustinus S. 2016. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah*. JIEP Vol. 16, No 2: 50-61.
- Rosmeli. 2015. *Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia*. Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 10 No. 2: 362-369.
- Rusniati, Ririn; Sudarti; Atut Frida Agustin. 2018. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang*. FALAH Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No.2: 34-42.
- Sabia, Joseph J. 2015. *Do Minimum Wages Stimulate Productivity and Growth?* IZA World of Labor.
- Sadariawati, Rika. 2010. *Pengaruh Human Capital dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja di Sumatra Selatan*. Kajian Ekonomi, Vol 9, No 2.
- Salvatore, Dominick. 2007. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samuelson, P.A.; Nordhaus, W.D. 2010. *Macroeconomics 19th Ed*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Sari, Anggun Kembar. 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 1 No 2.
- Sari, Mutia; Mohd. Nur Syechalad; Sabri. Abd. Majid. 2016. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 2:

109-115.

Sarimuda, Tengkoek; Soekarnoto. 2014. *Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 2: 106-119.

ŞERB, Diana. 2016. *Employment Level Analysis from the Determinant Factors Perspective*. Ecoforum, Vol. 5, No. 1: 266-273.

Sitompul, Thomson; Yansen Simangunsong. 2019. *The Analysis of the Impact of GDP, FDI, Minimum Wage on Employment in Indonesia*. International Journal of Management, Entrepreneurship, Social Science and Humanities, Vol. 2 No. 2: 53-62.

Snowdown, Brian; Howard R. Vane. 2005. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development, and Current States*. UK: Edward Elgar.

Sodik, Jamzani. 2007. *Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Analisis Konvergensi*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 11, No.1.

Soesastro, Hadi. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir: Proses Pemulihan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sondakh, G. Yericko; Agnes L. Ch. P. Lapijan; Hanly F. Dj Siwu. 2017. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado (Tahun 2006-2015)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 17 No. 1: 146-156.

Stigler, George I. 1946. *The Economics of Minimum Wages Legislation*. American Economic Journal Review, Vol. 36.

Suaidah, Imarotus; Hendry Cahyono. 2013. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten*

- Jombang.** Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), Vol. 1 No. 3.
- Sukirno, Sadono. 2010. **Makro Ekonomi: Teori Pengantar.** Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukwika, Tatan. 2018. *Peran Pembangunan Infrastruktur Terhadap ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia.* Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Vol. 6, No. 2: 115-130.
- Sulistiawati, Rini. 2012. **Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia.** Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 1: 29-50.
- Sulistiyanti. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektoral terhadap kesempatan kerja Tamatan SMK. Publikasi Ilmiah Universitas Brawijaya Malang.
- Sumarsono, S. 2003. **Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan.** Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Supranto, J. 2004. **Ekonometrik (Buku Kedua).** Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Syaihu, Akhmad. 2012. **Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.** Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10 No. 1.
- Tapparan, Samuel Randy. 2017. **Pengaruh Upah Minimum dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan.** Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vol. 4, No.1: 7-14.
- Todaro, Michael P.; Stephen C. Smith. 2013. **Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Ed. 11.** Jakarta: Erlangga.
- Wicaksono, Teguh Yudo. 2002. **Tingkat Upah, Inflasi dan Pengangguran: Aplikasi Model Lucas-Rapping terhadap Pasar**

- Tenaga kerja Indonesia Tahun 1960-2001*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol 3 No 1: 15-30.
- Wilis, Retno. 2016. *Analisis Pengaruh Upah Minimum, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan*. El Dinar, Vol. 3, No. 1: 12-26.
- Wood, A. 1994. *North-South Trade, Employment, and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World*. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press.
- Xu, Shanying; Lin Huo; Wei Shang. 2015. *The impact of wage distributions on economics growth based on multi-agent simulation*. Procedia Computer Science, Vol. 55: 809 – 817.
- Zimmer, Timothy. 2016. *The Importance of Education for the Unemployed*. Indiana University Kelley School of Business, Indiana Business Research Center

Bab V

Keterkaitan antara Faktor Sosial Ekonomi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

*Nurul Rabbiyeni
Nur Dwiana Sari Saudi*

Pengantar

Di dalam konsep ketenagakerjaan, pokok permasalahan yang dibicarakan tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber Daya manusia atau *Human Resources* mengandung dua pengertian yaitu pertama, sumber daya manusia mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis,

yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia. Dengan kata lain, orang dalam usia kerja dianggap mampu bekerja. Kelompok penduduk dalam usia kerja tersebut dinamakan tenaga kerja atau *manpower*.

Tenaga kerja adalah penduduk yang siap melakukan pekerjaan, atau penduduk yang telah memasuki usia kerja (*working age population*), Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pengertian tenaga kerja menurut Sumitro Djojohadikusumo (1985) adalah semua orang yang bersedia dan sanggup, dan golongan ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima bayaran serta mereka yang bekerja untuk menerima bayaran/upah/gaji. Sedangkan menurut Payman J. Simanjuntak (1998) definisi tenaga kerja adalah penduduk yang berusia antara 14 sampai 60 tahun adalah variabel dari tenaga kerja itu sedangkan orang-orang yang berusia dibawah 14 tahun digolongkan bukan sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga macam apabila dilihat dari tingkat keahliannya, yaitu tenaga kerja tidak ahli, yang merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai keahlian dan hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, tenaga kerja semi yang merupakan tenaga kerja yang tidak hanya mengandalkan keahlian, dan tenaga kerja ahli yang mengandalkan keahlian dan kemampuannya.

Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* merupakan bagian tenaga kerja yang ingin dan yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan go-

longan yang mengganggu dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering dinamakan potensial labor force (Simanjuntak, 1985).

Angkatan Kerja (*Labor Force*)

Dalam konsep ketenagakerjaan atau *The Labor Force Concept* oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang disarankan oleh suatu organisasi yang bernama *International Labour Organization* (ILO) membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Menurut kegiatan utama yang sedang dilakukan, penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan Kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja antara 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (Pengangguran Terbuka). Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa atau mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling tidak 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

Menurut BPS (2008), angkatan kerja yaitu penduduk yang kegiatannya dalam seminggu adalah bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang kegiatannya dalam seminggu adalah sekolah, mengurus rumah tangga maksudnya ibu

rumah tangga yang bukan merupakan wanita karier atau bekerja dan lainnya. Pengangguran Terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapat pekerjaan dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan akan tetapi belum mulai bekerja. Mencari pekerjaan adalah mereka yang bekerja, tetapi karena sesuatu hal masih mencari pekerjaan atau mereka yang di bebas tugas dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Untuk memperkirakan seberapa besar jumlah orang yang bersedia menawarkan jasanya guna membantu terselesaikannya suatu proses produksi, tergantung kepada besarnya penyediaan atau *supply* tenaga kerja di dalam masyarakat. Jumlah orang yang bersedia untuk menjadi tenaga kerja terdiri dari golongan yang telah bekerja dan golongan yang siap untuk bekerja dan golongan yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Untuk itu keadaan ini dinamakan angkatan kerja atau *Labour Force* (Simanjuntak, 1985).

Sedangkan untuk konsep angkatan kerja secara menyeluruh dinamakan *Total Labour Force*. Konsep *Total Labour Force* ini digunakan untuk merumuskan jumlah keseluruhan angkatan kerja dari semua individu yang tidak dilembagakan dan yang berusia 15 tahun atau pun yang lebih tua dalam satu minggu, termasuk di dalamnya adalah angkatan militer, baik yang tenaganya digunakan maupun yang tenaganya tidak digunakan.

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah berbagai jumlah tenaga kerja yang mampu diserap atau dibutuhkan oleh suatu unit atau perusahaan. Tenaga kerja yang diserap ini khususnya yang mempunyai kemam-

puan atau keterampilan yang mereka miliki sehingga mereka mampu diserap oleh suatu unit tertentu yang membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja yang telah bekerja dan terserap di berbagai unit perekonomian yang tentunya akan menghasilkan barang atau jasa dengan jumlah yang besar. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi tersebut akan menimbulkan perbedaan pada produktivitas bahkan kontribusi bagi pendapatan nasional.

Penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya, atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerjaan (lapangan pekerjaan) untuk diisi oleh para pencari kerja. Salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam proses produksi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan *input* yang tidak saja memiliki komponen fisik namun juga mempunyai daya pikir, dan perasaan. Amat pentingnya kedudukan faktor produksi tenaga kerja sehingga suatu proses produksi tidak dapat berjalan tanpa adanya unsur manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesempatan kerja sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja. Peningkatan pada bidang investasi dapat memperluas lapangan kerja sehingga lapangan kerja menjadi lebih banyak, sebab jika investasi meningkat maka akan meningkatkan jumlah produksi barang maupun jasa.

Menurut Handoko (dalam Ridha, 2011) penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal antara lain yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat diartikan sebagai proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititik-beratkan pada tiga aspek, yaitu proses, peningkatan *output* perkapita dan dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (*oneshoot*). Di sini dapat dilihat adanya aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Budiono, 1992).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan tolak ukur dari kemajuan dan perkembangan suatu bangsa. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka semakin baik pula perekonomian yang ada pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan nilai GDP (*Gross Domestic Product*) dan GNP (*Gross National Product*) tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari kenaikan jumlah penduduk atau perubahan pola dan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu masalah klasik yang banyak di alami oleh negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia.

Menurut Sukirno (2004), Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduk-

nya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (Jinghan, 2012).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan nasional riil atau produk domestik bruto dalam jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Untuk mengukur pertumbuhan suatu perekonomian dari pertambahan yang sebenarnya dalam barang dan jasa yang diproduksi haruslah dihitung berdasarkan harga tetap, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seharusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain. Konsep perhitungan ini biasanya dinamakan sebagai PDB menurut harga tetap (Sukirno, 2004).

Adapun teori pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

1. Teori pertumbuhan klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi Klasik terutama menitik-beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi klasik yang baru diterangkan, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan perkaitan di antara pendapatan Per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum.

Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada

pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

2. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith

“*An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation*”, teorinya yang dibuat dengan teori the invisible hands (Teori tangan-tangan gaib). Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan, yakni pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan *output* total.

Pertumbuhan *output* yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu sumber-sumber alam, tenaga kerja (pertumbuhan penduduk dan jumlah persediaan).

3. Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo dan T.R Malthus

Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subisten atau kemandegan.

4. Teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan Neo-klasik melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi ter-

gantung kepada perkembangan faktor- faktor produksi. Dengan persamaan :

$$AY = f(AK, AL, AT); \text{ di mana :}$$

- a. AY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi
- b. AK adalah tingkat pertumbuhan modal
- c. AL adalah tingkat pertumbuhan penduduk
- d. AT adalah tingkat pertumbuhan teknologi.

Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

5. Teori pertumbuhan ekonomi Robert Sollow

Robert Solow lahir pada tahun 1928 di Brooklyn, ia seorang peraih nobel di bidang dibidang ilmu ekonomi pada tahun 1987. Robert Sollow menekankan perhatiannya pada pertumbuhan *output* yang akan terjadi atas hasil kerja dua faktor *input* utama. Yaitu modal dan tenaga kerja.

6. Teori pertumbuhan ekonomi Harrod dan Domar

Harrod dan Evsey Domar (1947), pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada peningkatan produktivitas modal (MEC) dan produktivitas tenaga kerja.

7. Teori pertumbuhan ekonomi Joseph Schumpeter

Menurut J. Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi (penemuan-penemuan baru di bidang teknologi produksi) yang dilakukan oleh para pengusaha. Tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi.

Mutu Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menyangkut pengembangan

aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Diantara unsur-unsur pengembangan sumber daya manusia di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan dan latihan merupakan unsur terpenting dalam peningkatan mutu sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia, dalam jangka pendek dapat diartikan sebagai pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan segera tenaga-tenaga terampil yang bertujuan untuk mempermudah mereka terlibat dalam sistem sosial ekonomi di negara yang bersangkutan.

Todaro & Smith (2003) menyatakan bahwa “pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.” Jadi, pendidikan dapat digunakan untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan.

Pengertian ini meletakkan manusia sebagai pelaku dan penerima pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia yaitu proses peningkatan kemampuan untuk melakukan pilihan. Pengertian ini memusatkan perhatian pada pemerataan dalam meningkatkan kemampuan melalui penciptaan kerangka keterlibatan manusia untuk mendapatkan penghasilan dan perluasan peluang kerja.

Teori *human capital* atau modal manusia yang dikemukakan oleh Becker (1985), memaparkan bahwa pendidikan dapat mengajarkan kepada para pekerja tentang keahlian-keahlian yang dapat meningkatkan produktivitas dan pekerja akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi pula. Dengan adanya peningkatan pendidikan maka diharapkan hal tersebut akan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia tidak hanya sekedar meningkat-

kan kemampuan saja, tetapi juga menyangkut pemanfaatan manusia. Dengan demikian dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yaitu dengan peningkatan kontribusi manusia tersebut dalam perluasan kesempatan kerja demi mendapatkan peluang kerja.

Pembinaan sumber daya manusia adalah usaha memperbesar kemampuan produksi seseorang atau masyarakat, baik dalam pekerjaan atau kegiatan lain yang dapat mempermudah orang atau masyarakat tersebut ditempatkan dalam pekerjaan. Menurutnya, usaha pembinaan sumber daya manusia pada waktu ini telah disetujui sebagai salah satu usaha penciptaan kesempatan kerja.

Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah yang telah ditetapkan secara minimum regional, sektor regional, dan sub sektor. Dalam hal ini, upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Tunjangan termasuk dalam minimum karena hal ini merupakan kebijakan upah minimum Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikan produktivitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum. Upah minimum

adalah sebuah kontroversi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopsoni dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaeni. D, 1998).

Perbedaan tingkat upah terletak pada kualitas yang sangat berbeda diantara tenaga kerja (Samuelson, 2001). Perbedaan kualitas ini disebabkan oleh pembawaan mental, kemampuan fisik, jumlah tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman. Penyebab yang paling berpengaruh yaitu tamatan pendidikan dan pelatihan serta pengalaman seseorang. Semakin tinggi kualitas seseorang maka akan semakin besar kontribusinya bagi perusahaan, sehingga upah yang diterima juga semakin besar.

Permintaan tenaga kerja merupakan jumlah tenaga kerja yang diminta oleh suatu perusahaan pada tingkat upah tertentu. Pengusaha mempekerjakan seseorang dimaksudkan untuk membantu memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada masyarakat. Pertambahan permintaan terhadap tenaga kerja tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksinya. Permintaan akan tenaga kerja yang demikian disebut *derived demand*. Menurut Sumarsono (2009) permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh Perubahan Tingkat Upah Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal – hal sebagai berikut:

1. Tingkat upah yang tinggi akan menaikkan biaya produksi perusahaan, selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang yang diproduksi. Konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila

terjadi kenaikan harga barang yaitu dengan mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli barang yang bersangkutan. Sehingga terjadinya kelebihan barang yang tak terjual dalam pasar dan produsen terpaksa mengurangi jumlah produksinya. Berkurangnya *output* yang diproduksi mengakibatkan pengurangan tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan ini disebut efek skala produksi atau *scale effect product* akibat pengaruh turunya skala produksi.

2. Apabila upah naik (asumsi faktor lain *ceteris paribus*) maka pengusaha akan lebih menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan barang – barang modal seperti mesin dan lain – lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin- mesin ini disebut dengan efek substitusi atau *substitusi effect*.

Menurut teori yang diungkapkan Mankiw yakni teori upah efisiensi. Upah minimum tidak memiliki dampak terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja dikarenakan ketika tingkat upah naik maka pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup lebih tinggi dari angka kebutuhan hidup layak. Ketika kebutuhan nutrisi para pekerja tercukupi dengan baik maka akan mempengaruhi peningkatan produktivitas pekerja tersebut sehingga meningkatkan *output*.

Tingginya produktivitas pekerja dalam menghasilkan *output* dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja. Jadi meskipun *marginal cost* yakni tingkat upah naik namun hal tersebut tidak berdampak dikarenakan *marginal product of labor* (MPL) juga mengalami kenaikan sehingga kondisi laba keseimbangan $MC=MR$ atau $W=MPL \times P$ tetap terjaga dengan baik. kemudian upah yang lebih tinggi menjadi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan upah yang lebih tinggi meningkatkan upaya pekerja, per-

usaha bisa mengurangi masalah kejahatan moral dengan membayar upah yang lebih tinggi, semakin tinggi upah maka semakin tinggi biaya pekerja apabila mereka dipecat dari perusahaan. Dengan membayar upah yang lebih tinggi maka pekerja akan meningkatkan produktifitas dan tidak akan bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiarto dan Made Heny Urmila Dewi dalam jurnalnya (2015). Penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum provinsi secara parsial tidak memiliki pengaruh dan memiliki koefisien negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam penelitiannya dikatakan bahwa kenaikan terhadap upah minimum provinsi setiap tahunnya tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Jadi naiknya upah minimum regional dapat menekan jumlah pengangguran. Ketika upah minimum meningkat maka dorongan seseorang untuk mencari pekerjaan semakin tinggi dan menyebabkan *supply of labor* meningkat. Dengan meningkatnya penawaran tenaga kerja akan mendorong pengurangan jumlah pengangguran. Namun meskipun upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pemerintah harus tetap bijaksana dalam menentukan upah minimum pada tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut untuk menjaga agar kondisi pasar tenaga kerja tetap pada stabilitas yang baik.

Hubungan Antar Variabel :

Mutu Sumberdaya Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas atau mutu sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan tiga variabel sebagai variabel independen berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh ketiga variabel tersebut sangat signifikan baik dalam kedudukannya sebagai variabel individu (mandiri) maupun secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis yang dilakukan oleh Lonni, Tahir Kasnawi, dan Paulus Uppun (2012) Sebagai variabel terikat pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel bebasnya terdiri atas variabel proporsi penduduk usia produktif, proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berpendidikan SLA keatas, dan angka harapan hidup pada saat lahir menunjukkan bahwa semua variabel bebas memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan sebagai salah satu faktor menentukan kualitas sumberdaya manusia, Makin banyak tenaga kerja yang berhasil mencapai tingkat pendidikan tinggi, maka kualitas tenaga kerja semakin baik. Secara angka, menunjukkan bahwa kenaikan jumlah dan persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi maka pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja akan semakin baik, sehingga dengan pengetahuan yang dimiliki mampu mengorganisir pekerjaan secara efektif sehingga menghasilkan produksi yang tinggi. Sumber Daya Manusia mempunyai peranan sebagai faktor produksi. Namun sebagaimana halnya dengan faktor produks lainnya sumber daya manusia mempunyai keterbatasan, sehingga ekonomi sumberdaya manusia berusaha menerangkan bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat, (Sonny, S 2003).

Salah satu determinan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia atau *human capital* yang tidak hanya dilihat dari jumlahnya tetapi juga dari segi kualitasnya. Beberapa varia-

bel yang banyak berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusia (Robby.S, A 2006). Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya berkelanjutan merupakan suatu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi di suatu Negara. Kondisi yang kondusif tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk seperti yang diindikasikan oleh penurunan tingkat kesehatan, Migrasi, angka kemiskinan, serta adanya perbaikan indikator-indikator sosial lainnya, (Jhingan. ML. 2007).

Upah Minimum dengan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menjelaskan pengaruh upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari jurnal penelitian oleh Oktavianingsih (2006) dalam Analisis Pengaruh Nilai Upah Minimum Kabupaten Terhadap Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan PDRB di Kabupaten Bogor menyimpulkan bahwa pengaruh nilai UMK terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, dan PDRB di Kabupaten Bogor adalah negatif. Peningkatan nilai UMK pada akhirnya akan menyebabkan penurunan pada PDRB di Kabupaten Bogor. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu (*time series*) tahun 1993-2004 yang merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Kantor Penanaman Modal Daerah (KPMMD), dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor. Bertambahnya jumlah industri besar yang kemudian diikuti oleh semakin tingginya nilai Upah Minimum maka kedua komponen ini dapat memicu bertambahnya jumlah tenaga kerja yang kemudian juga akan memicu naiknya tingkat konsumsi masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarsono (1988) yang menyatakan bahwa permintaan akan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah dan faktor lain adalah permintaan akan barang-barang hasil pro-

duksi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat upah pada tenaga kerja maka akan memicu tingkat konsumsi masyarakat di mana hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Tingginya tingkat upah minimum akan menyebabkan pelaku usaha enggan untuk melakukan investasi, rendahnya tingkat investasi ini akan berdampak pada tingkat pertumbuhan *output* yang lambat. Pertumbuhan *output* yang lambat akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang semakin rendah akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam menetapkan tingkat upah minimum pemerintah harus memertimbangkan kepentingan dari pelaku usaha dan tenaga kerja karena pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

Mutu Sumber daya Manusia dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Mutu sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang lebih luas, tingkat pendidikan yang tinggi, kesehatan yang baik dan penguasaan skill di bidang teknologi. Mutu sumber daya manusia sangat dipengaruhi dengan tingkat pendidikan, industri besar yang membutuhkan banyak tenaga kerja dengan tamatan pendidikan tinggi dan memiliki keterampilan, maka dari itu untuk mencapai mutu sumberdaya manusia yang tinggi pemerintah daerah meningkatkan fasilitas pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana serta meningkatkan tenaga pengajar. Jadi dengan meningkatnya mutu sumber daya manusia pada tamatan perguruan tinggi, maka akan memperbesar kesempatan kerja sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran terdidik.

Hubungan tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah semakin tinggi jenjang atau tingkat pendidikan yang ditamatkan, akan semakin tinggi pula standar pekerjaan yang diinginkan

tenaga kerja. Standar pekerjaan yang dimaksud adalah berupa pilihan pada pekerjaan-pekerjaan yang notabene kemampuan (skill) dan keterampilan tinggi pada umumnya. Jumlah tamatan pendidikan atau jenis pendidikan diduga dapat mempengaruhi keengganan terhadap para pekerja tertentu.

Orang yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan lebih mudah mencari informasi untuk pekerjaan, dan lebih fleksibel untuk bermigrasi karena mempunyai kualifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah sehingga dapat disimpulkan peningkatan pendidikan (pendidikan yang lebih baik yang dimiliki seseorang) akan meningkatkan peluang kerja yang bisa diperolehnya.

Hasil penelitian Sadariawati (2010) tentang Pengaruh *Human capital* dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Selatan menjelaskan pada variabel pendidikan berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan menambah kesempatan kerja seseorang.

Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Upah minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Upah minimum ditetapkan berdasarkan persetujuan dewan pengupahan yang terdiri dari Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja. Tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat membiayai kebutuhan hidup tenaga kerja yang berpendapatan rendah (Tjiptoherijanto, 1990).

Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila upah naik sedangkan harga *input* lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari *input* lain. Situasi ini

mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan *input-input* lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan *maximum profit*.

Teori Mankiw menjelaskan tentang tingkat upah atau upah minimum yaitu teori upah efisiensi dimana upah minimum tidak memiliki dampak penurunan penyerapan tenaga kerja dikarenakan ketika tingkat upah naik maka pekerja mampu memenuhi kebutuhan hidup lebih tinggi dari angka kebutuhan hidup layak. Ketika nutrisi para pekerja lebih baik maka mereka akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan dampaknya akan meningkatkan *output*. Tingginya produktivitas karyawan dalam menghasilkan *output* dapat menekan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga tidak terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, meskipun marginal cost yakni tingkat upah naik namun hal tersebut tidak berdampak dikarenakan *marginal product of labor* (MPL) juga mengalami kenaikan sehingga kondisi laba keseimbangan $MC=MR$ atau $W=MPL \times P$ tetap terjaga dengan baik. kemudian upah yang lebih tinggi menjadi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan upah yang lebih tinggi meningkatkan upaya pekerja, perusahaan bisa mengurangi masalah kejahatan moral dengan membayar upah yang lebih tinggi, semakin tinggi upah maka semakin tinggi biaya pekerja apabila mereka dipecat dari perusahaan. Dengan membayar upah yang lebih tinggi maka pekerja akan meningkatkan produktifitas dan tidak akan bermalas-malasan dan dengan demikian meningkatkan produktivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiarto dan Made Dewi dalam jurnalnya (2015). Penelitiannya menyatakan bahwa upah minimum provinsi secara parsial tidak memiliki pengaruh dan memiliki koefisien negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa kenaikan terhadap upah minimum provinsi setiap tahunnya tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan tenaga

kerja, hal tersebut menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Jadi naiknya upah minimum regional dapat menekan jumlah pengangguran. Ketika upah minimum meningkat maka dorongan seseorang untuk mencari pekerjaan semakin tinggi dan menyebabkan *supply of labor* meningkat. Dengan meningkatnya penawaran tenaga kerja akan mendorong pengurangan jumlah pengangguran. Namun meskipun upah minimum tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pemerintah harus tetap bijaksana dalam menentukan upah minimum pada tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut untuk menjaga agar kondisi pasar tenaga kerja tetap pada stabilitas yang baik. Dengan kata lain tingkat upah yang tinggi tidak akan menjamin terjadinya penyerapan tenaga kerja yang optimal.

Pertumbuhan Ekonomi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi berfokus pada proses peningkatan barang produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut teori klasik Adam Smith menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alasannya, alam (tanah) tidak ada artinya tanpa sumber daya manusia yang mengelolanya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Smith melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi.

Terjadinya pertumbuhan ekonomi akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi sehingga dari sisi produksi akan memerlukan tenaga kerja produksi. Pada dasarnya, pandangan umum mengenai pertum-

buhan ekonomi menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (*growth*) berkorelasi positif dengan tingkat penyerapan tenaga kerja (*employment ate*). Akan tetapi, ada juga dugaan bahwa dengan produktivitas yang tinggi bisa berarti akan lebih sedikit tenaga kerja yang dapat diserap.

Hubungan positif tersebut berdasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi Solow tentang fungsi produksi agregat (Dornbusch, Fischer, dan Startz, 2004) menyatakan bahwa *output* nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan *Y*) merupakan fungsi dari modal (kapital=*K*) fisik, tenaga kerja (*L*) dan kemajuan teknologi yang dicapai (*A*). Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi), dalam arti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diduga akan membawa dampak positif terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja seperti ditunjukkan oleh model berikut:

$$Y = A.F(K,L);$$

Di mana *Y* adalah *output* nasional, *K* adalah modal fisik, *L* adalah tenaga kerja, dan *A* merupakan teknologi. *Y* akan meningkat ketika *input* (*K* atau *L*, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. *Y* juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan *A*. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan *input* dan perkembangan kemajuan teknologi yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja oleh seorang ekonom bernama Arthur Okun, Menyatakan bahwa tingkat pengangguran yang minimal (4% per tahun) akan tercapai apabila seluruh kapasitas produksi terpakai (kesempatan kerja penuh).

Penelitian dari Tahir (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja artinya setiap kenaikan

1% pertumbuhan ekonomi akan menaikkan penyerapan tenaga kerja atau kesempatan kerja. hubungan positif antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja disebabkan akibat dari peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengusaha cenderung menambah tenaga kerja untuk kegiatan produksinya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Referensi

- Budiono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: PBF.
- Budiarty, Ida. 2006. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Budiarto, Arief dan Made Heny Urmila Dewi. 2015. *Pengaruh PDRB Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Mediasi Investasi Di Provinsi Bali*. E-jurnal ekonomi pembangunan Universitas Udayana. Vol.4, no. 10 oktober 2015.
- Connel, R Campbell. 1999. *Contemporary Labor Economics*. University of Nebraska. McGraw-Hill.
- Databoks. 2018. *Inilah Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sejak 1961 : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (1961-2018)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/31/inilah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-sejak-1961>. 31 Januari 2018.
- Dornbusch R, Stanley Fischer, dan Richard Startz. 2004. *Makroekonomi*. Edisi Delapan. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Feriyanto, Nur. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Jhingan. ML. 2007. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Edisi 1-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Julianto, Foengsitanojo Trisantoso dan Suparno. 2016. *Analisis Pengaruh Jumlah Industri Besar dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surabaya*. Volume 1 Jurnal Ekonomi & Bisnis halaman 229-256.
- Kamar, Karnawi. 2017. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang pada Tahun 2009 – 2015*. Jurnal Bisnis & Manajemen, Vol. 17, No. 1, 2017 : 1 – 10.
- Kawet, dkk. 2019. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.19 No.10. MEI 2019.
- Kaufman, Bruce E. 2006. *The Economics of Labor Markets*. Thomson South Western. Mason USA.
- Kusnadi, 1998. *Pengantar Bisnis Niaga: Dengan Pendekatan Kewiraswastaan*. STAIN : Malang.
- Kusnaini, D. 1998. *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia*. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Lonni, Tahir Kasnawi, dan Paulus Uppun. 2012. “*Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamasa*”.
- Mankiw, Gregori N. 2003. *Pengantar Ekonomi edisi kedua jilid ke 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mulyadi, Subri. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

- Octavianingsih AR. 2006. *Analisis Pengaruh Nilai Upah Minimum Kabupaten Terhadap Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja, dan PDRB di Kabupaten Bogor*. Skripsi. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1/1999 Pasal 1 Ayat 1.
- Tahir, Kurnia. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Upah Minimum Provinsi terhadap Penyerapan tenaga Kerja di Sulawesi Selatan*. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vol.1, No.2, hlm 110-132. Diakses 1 Oktober 2018.
- Tirtoid. 2019. *Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah*. (<https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>), 2 Mei 2019.
- Tjictoherijanto, Prijono. 1990. *“Upah Minimal dan Serikat Pekerja”, dalam Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tohar, M. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. KANISIUS: Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tumoutounews. 2017. *Daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia Tahun 2018*. <https://tumoutounews.com/2017/11/05/daftar-upah-minimum-provinsi-ump-di-indonesia-tahun-2018/>. 05 November 2017.
- Ridha, Andi Rahmat. 2011. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Usaha Percetakan Skala Kecil-Menengah di Kota Makassar*. Skripsi.
- Samuelson, Paul A dan William D. Nordhaus. 2001. *“Makro-Ekonomi”*, Edisi Keempatbelas. Erlangga : Jakarta.
- Sadariawati, Rika. 2010. *Pengaruh Human Capital dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja di Sumatera Selatan*. Kajian

Ekonomi, Vol.9, No.2, Th 2010. ISSN: A 1693-0436.

- Sirait A. Robby., 2006. *Hubungan antara Pembangunan Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta.
- SMERU. 2001. *Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia*. Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Tim Peneliti SMERU.
- Subri, Mulyadi. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perpektif Pembangunan*. Penerbit: Rajawali Pers. Jakarta.
- Sudarsono dkk, 1988, *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Karunia Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, sonny, 2009. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*, Teori dan Kebijakan Publik, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suroto, 1992. *Strategi Pengembangan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. BPFE UGM: Yogyakarta.
- Wihastuti, Iatri dan Henny Rahmatullah. 2018. *Upah Minimum Provinsi (Ump) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa*. Jurnal Gama Societa, Vol. 1 No. 1, Januari 2018, 96 – 102.
- Wijaya, andi, Toti Indrawati dan Eka Armas Pailis. 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau*. Jom FEKON, Vol. 1 No. 2 Oktober 2014. Pekanbaru : Faculty of Economics Riau University.
- Zenda Rizki Herdian dan Suparno. 2017. *Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Surabaya*. Jurnal Ekonomi & Bisnis. Hal 371 - 384 Volume 2, Nomor 1, Maret 2017.

Bab VI

Faktor Penentu Permintaan Tenaga Kerja dalam Perspektif Teoretis

*Diky Aditia Rangga
Sanusi Fattah*

Investasi

Investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Menurut Boediono (1985) investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang dan jasa untuk menambah stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik. Fischer (1997) berpendapat bahwa investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa mendatang.

Persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara menurut Todaro (2003) adalah (1) Akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia; (2) Perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya; (3) Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengalihkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*" untuk mencapai tingkat produksi yang lebih besar.

Investasi di bidang pengembangan sumberdaya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Menurut Sukirno (2005) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni ; (1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Sedangkan Suryana (2003) menyatakan bahwa kekurangan modal dalam negara berkembang dapat dilihat dari beberapa sudut.

Robinson menyatakan bahwa: "membeli selembar kertas sekalipun itu adalah kertas saham bukanlah investasi. Investasi sementara

itu haruslah berarti penanaman barang-barang modal baru (*new capital formation*)” (Rosyidi, 2000). Menurut Suparmoko (1992) “Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (*capital stock*)”. Menurut Samuelson (2004) “Investasi meliputi penambahan stok modal atau barang di suatu negara, seperti bangunan, peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di masa mendatang.”

Jenis-jenis Investasi

Menurut Rosyidi (2000) jenis-jenis investasi dikelompokkan menjadi 4 kelompok (bertujuan agar tidak terjadi jenis investasi yang masuk dalam dua pengelompokan), antara lain:

1. Berdasarkan pada unsur pendapatan nasional: a. *Autonomous Investment* (Investasi Otonom), merupakan investasi yang perubahannya tidak dipengaruhi oleh pendapatan, dalam hal ini pendapatan nasional. *Induced investment* (Investasi terimbas) adalah investasi yang perkembangannya sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional.
2. Berdasarkan Subjeknya: a. *Public Investment* (Investasi Pemerintah), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat. b. *Private Investment* (Investasi Swasta), merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh pihak swasta dengan tujuan untuk mencari keuntungan.
3. Berdasarkan Alasannya: a. *Domestic Investment* (Investasi Dalam Negeri), merupakan penanaman modal dalam negeri, artinya penanaman modal dari negeri sendiri yang berinvestasi di dalam negeri. b. *Foreign Investment* (Investasi Asing), yaitu penanaman modal asing yang artinya investasi yang diperoleh dari luar negeri

untuk digunakan di dalam negeri guna mengoptimalkan sumber-sumberdaya yang masih belum dimanfaatkan.

4. Berdasarkan unsur pembentuknya: a. *Gross Investment* (Investasi Bruto), merupakan total dari seluruh investasi yang dilakukan oleh suatu negara pada suatu ketika atau pada waktu tertentu. b. *Net Investment* (Investasi Neto), merupakan hasil dari investasi bruto yang dikurangi dengan penyusutan (*Depreciation*) atau disebut Investasi Bersih.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1994).

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesoebroto, 1994). Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. (Suparmoko, 1987).

Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai: (a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; (b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai; dan (c) Pengeluaran pemerintah untuk *transfer payment* (Boediono, 1999).

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Sebagai contoh, misalnya pemerintah menetapkan akan membuat sebuah pelabuhan udara baru. Pelaksanaan pembuatan pelabuhan baru tersebut menimbulkan permintaan akan barang lain yang dihasilkan oleh sektor swasta seperti semen, baja, alat-alat pengangkutan dan sebagainya (Basri, 2005).

Tenaga Kerja

Tenaga kerja mengandung pengertian jumlah penduduk yang sedang dan siap untuk bekerja dan pengertian kualitas usaha kerja yang diberikan. Menurut undang-undang pokok ketenagakerjaan No.14 tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga walaupun tidak bekerja, tetapi mereka secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Ada beberapa pengertian terkait dengan ketenagakerjaan yaitu, tenaga kerja, angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Tenaga kerja merupakan Penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003).

Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan pro-

duktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja serta golongan menganggur dan mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai angkatan kerja potensial (*potential labor force*).

Sedangkan, tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai persentase penduduk dalam kelompok umum tersebut.

Jenis-jenis tenaga kerja

Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3 menurut Munandar (2002) yaitu, tenaga Kerja Terdidik, Tenaga Kerja Terlatih dan Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya seperti sarjana ekonomi, insinyur, sarjana muda, doktor, master, dan lain sebagainya.

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak memerlukan pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan melakukannya berulang-ulang sampai bisa dan menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya adalah supir, pelayan toko, tukang masak, montir, pelukis, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh tenaga kerja model ini seperti kuli, buruh angkut,

buruh pabrik, pembantu, tukang becak, dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Terserapnya penduduk bekerja disebabkan oleh adanya permintaan akan tenaga kerja. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja dapat dikatakan sebagai permintaan tenaga kerja (Kuncoro, 2002).

Menurut Todaro (2006), penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh para pencari pekerjaan. Secara umum, penyerapan tenaga kerja tersebut menunjukkan seberapa besar suatu perusahaan dalam menyerap tenaga kerja untuk menghasilkan suatu produk. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja berbeda dari satu sektor dengan sektor lainnya (Sumarsono, 2003).

Teori Produksi

Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Untuk bisa melakukan produksi, orang memerlukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal dalam segala bentuknya, serta kecakapan. Semua unsur itu disebut faktor-faktor produksi (*factors of production*). Jadi, semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi.

Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum *output* yang dihasilkan dengan kombinasi *input* tertentu (Ferguson dan Gould, 1975).

Fungsi produksi didefinisikan sebagai hubungan teknis antara *input* dengan *output*, yang mana hubungan ini menunjukkan *output* sebagai fungsi dari *input*. Fungsi produksi dalam beberapa pembahasan ekonomi produksi banyak diminati dan dianggap penting karena (Soekartawi, 1990).

1. Fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu sendiri secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti.
2. Fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan (Q), dengan variabel yang menjelaskan (X) serta sekaligus mampu mengetahui hubungan antar variabel penjelasnya (antara X dengan X yang lain).

Secara matematis sederhana, fungsi produksi dapat ditulis sebagai berikut :

$$Output = f(input)$$

$$Q = f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_i)$$

Dimana:

$$Q = output$$

X_i = *input* yang digunakan dalam proses produksi; $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Input yang digunakan dalam proses produksi antara lain adalah modal, tenaga kerja, dummmy, dan lain-lain. Dalam ilmu ekonomi, *output* dinotasikan dengan Q sedangkan *input* (faktor produksi) yang digunakan biasanya (untuk penyederhanaan) terdiri dari *input* kapital (K) dan tenaga kerja (L).

Sedangkan menurut Sukino fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang

dihasilkan. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah *input* dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai *output*. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam rumus seperti berikut (Sukirno, 1997).

$$Q = f(K, L, R, T)$$

Dimana K adalah jumlah stok modal, L adalah jumlah tenaga kerja dan ini meliputi berbagai jenis tenaga kerja dan keahlian kewirausahaan, R adalah kekayaan alam, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor-faktor tersebut, yaitu secara bersama digunakan untuk memproduksi barang yang sedang dianalisis sifat produksinya. Persamaan tersebut merupakan suatu pernyataan matematik yang pada dasarnya berarti bahwa tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan.

Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan adalah suatu hubungan antara harga dan kuantitas. Sehubungan dengan tenaga kerja, permintaan adalah hubungan antara tingkat upah (yang ditilik dari perspektif seorang majikan adalah harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh perusahaan (dalam hal ini dapat dikatakan dibeli). Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang karena barang itu memberi kenikmatan (*utility*) kepada pembeli. Akan tetapi pengusaha mempekerjakan seseorang karena seseorang itu membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja yang seperti ini disebut dengan *derived demand* (Simanjuntak, 2005).

Sifat permintaan tenaga kerja adalah derived demand sehingga untuk mempertahankan tenaga kerja yang digunakan perusahaan, maka harus dijaga bahwa permintaan masyarakat terhadap produk perusahaan harus tetap stabil dan kalau mungkin meningkat. Untuk menjaga stabilitas permintaan produk perusahaan serta kemungkinan pelaksanaan ekspor, maka perusahaan harus memiliki kemampuan bersaing baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Dengan demikian bisa diharapkan permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja bisa dipertahankan atau bahkan ditinggalkan (Sumarsono, 2003).

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antar tingkat upah (harga tenaga kerja) dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki untuk dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. secara umum permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh:

1. Perubahan tingkat upah. Dalam jangka pendek kenaikan upah diantisipasi perusahaan dengan mengurangi produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja karena turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*. Dalam jangka panjang kenaikan upah akan direspon perusahaan dengan penyesuaian terhadap *input* yang digunakan. Perusahaan akan menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi ini terjadi bila tingkat upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan penggunaan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja atau *substitution effect (capital intensive)*.
2. Perubahan permintaan hasil produksi oleh konsumen. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusa-

haan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

Harga barang modal turun Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009).

Hubungan Luas Lahan dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Luas lahan pertanian menentukan skala usaha, semakin besar luas lahan yang digunakan maka semakin besar pula skala usahanya (Soekartawi, 2003). Semakin luas lahan pertanian maka akan dapat menyerap tenaga kerja sektor pertanian dalam jumlah relatif besar. Sebaliknya jika lahan pertanian relatif sempit, maka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian juga akan relatif sedikit. Hal inilah yang mendasari bahwa luas lahan pertanian dapat berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Hal ini didukung oleh pendapat Tobing

(2009) bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap curahan waktu kerja, yang berarti semakin luas lahan pertanian maka curahan waktu kerja juga semakin besar.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Peranan pemerintah dalam suatu negara dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi telekomunikasi, transportasi, persediaan air yang merupakan kontribusi utama pengeluaran pemerintah yang efisien untuk merangsang investasi sektor swasta. Hubungan pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan dengan kesempatan kerja dalam hal ini dilihat dari sisi usaha meningkatkan investasi swasta berperan secara efektif. Terkait dengan itu, pengeluaran pemerintah khususnya pengeluaran pembangunan yang mendorong investasi swasta dapat menciptakan lapangan usaha yang nantinya dapat meningkatkan kesempatan kerja (Rudi, 2014).

Hubungan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Nilai Produksi

Hubungan investasi dengan *output* produksi dapat terlihat dari teori yang dikemukakan oleh Sukirno bahwa kegiatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat meningkatkan perekonomian guna memperbesar dan meningkatkan tingkat produksi dalam suatu usaha dan meningkatkan kesempatan kerja. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2001).

Sehingga dari investasi tersebut dapat dijadikan sebagai penanam-penanam modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian atau *output* produksi.

Sedangkan menurut Sukirno (2007) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: a) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja. b) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi. c) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut Harrod-Domar (Mulyadi, 2002), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi terutama investasi swasta yang dapat membantu membuka lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja (Dumairy, 1996).

Hubungan Luas Lahan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Nilai Produksi

Adapun hubungan antara luas lahan dengan *output* produksi dipaparkan dalam teori yang dikemukakan oleh Daniel yang menyatakan bahwa Lahan sebagai sarana produksi merupakan bagian dari faktor

produksi. Luas penguasaan lahan pertanian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usaha tani dan usaha pertanian. Dalam usaha tani misalnya pemilikan atau penguasaan lahan sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas. Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani yang dilakukan (Daniel, 2004).

Disamping hal tersebut di atas, luas lahan dalam sektor pertanian juga dapat mempengaruhi pada tenaga kerja pada sektor tersebut. Hal ini dikarenakan kegiatan dalam usaha tani mensyaratkan adanya lahan pertanian. Semakin luas lahan pertanian maka semakin terbuka kesempatan kerja bagi masyarakat ingin melaksanakan usaha tani. Sebaliknya ketika luas pertanian tidak mencukupi, maka semakin banyak dari angkatan kerja akan beralih sektor lain yang mereka anggap

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Nilai Produksi

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004) yang tujuannya untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka stabilisasi harga, meningkatkan *output*, kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. peningkatan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatkan pendapatan daerah, peningkatan aggregate demand mendorong kenaikan investasi dan pada akhirnya menyebabkan kenaikan produksi dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui *multiplier effect* dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat sehingga membutuhkan faktor produksi dalam hal ini tenaga kerja yang lebih banyak, hal ini kemudian mengaki-

batkan terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar yang diikuti oleh peningkatan PDRB dan pertumbuhan ekonomi.

Referensi

- Arsyad S., 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. IPB Press, Bogor.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2011-2016. *Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2011-2016*. Sulawesi Selatan: Badan Pusat Statistik.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta
- Depnakertrans. 2004. *Penanggulangan Pengangguran di Indonesia*. Majalah Nakertrans Edisi-03 TH. XXIV- Juni.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Fauzul, Abubakar dan Sofyan. 2015. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Tani Sawah di Provinsi Aceh*. Jurnal Ilmu Ekonomi. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Ferguson, C.E, dan Gould, I.P, 1975, *Microeconomic Theory and Application*, Prentice Hall International, Inc, London.
- Hadi, dkk. 2010. *Analisis Dampak Investasi Pertanian Terhadap Kinerja Sektor Pertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementrian Pertanian.
- Hartono, Afifuddin, Rahmanta, M.Si, Ruslan, M.Si. 2016. *Assessment of Plantation Sector Contribution to the Economic Growth in North Sumatra, Indonesia: Social Accounting Matrix Multiplayer Analysis*. International Journal of Business and Management Invention. Volume 5 Issue 2. PP-56-59.
- Junandar, U. 2002. *Analisis Pendapatan dan Pemasaran Industri Kecil*. IPB: Bogor.

- Kuncoro, Haryo. 2002. *“Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja”*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 1, hal. 45-56.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik Di Indonesia: Substansi dan Urgensi, cetakan pertama*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Margaretha Pattiasina Suripatty dan Aflah Mussa. *“Analisis Pendapat Usahatani Kakao di Desa Latu”*. jurnal. Fakultas Pertanian. Universitas Pattimura. 2012
- Mulyadi, Subari. 2002. *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuswantoro, N. 2011. *Pengaruh Investasi, Nilai Produksi dan Jumlah Unit Usaha terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Kabupaten Pati*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Oktaviana. 2011. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Salatiga. Semarang*. Universitas Diponegoro
- Simanjuntak. Payaman J., 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Rezky, Purwka dan Jaya. 2016. *Analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Rompas, dkk. 2015. *Potensi Sektor Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 04 Tahun 2015
- Rosyidi, Suherman. 2000. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Sarwako. 2005. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Yogyakarta: Andi.
- Soekartawi. 1996. *Pembangunan Pertanian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2004. *Ekonomi Pembangunan Proses*, Masalah Dasar Kebijakan Pembangunan.
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sumiana. 2017. *Pengaruh Luas Lahan Dan Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Usahatani Kopi Melalui Produksi Dan Harga Jual Sebagai Variabel Intervening Di Desa Janggurara Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang*. Makassar: UIN Alauddin
- Suparmoko.1996. *Pengantar Ekonometrika Makro*. Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. 2011. *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P and Smith Stephen C. 2003.*Economic Development, Eighth Edition*, United Kingdom: Pearson Education Limited.
- Todaro, P. Michael, 2006. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Edisi Ke delapan, Erlangga. Jakarta.
- Tjictoherijanto, Prijono. 1990. *“Upah Minimal dan Serikat Pekerja”, dalam Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wibowo, M. E. 2014. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Bab VII

Beberapa Faktor Penentu Penyerapan Tenaga Kerja dalam Perspektif Teoretis

*Elsy Sonda Rindu Dian
Madris*

Teori klasik menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa. Alam (tanah) tidak ada artinya kalau tidak ada sumber daya manusia yang pandai mengelolanya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Dalam hal ini teori klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumberdaya manusia yang efektif adalah pemulih pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi (Mulyadi,2008).

Kaum klasik percaya bahwa dalam keseimbangan semua sumberdaya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh (*full-employed*). Dengan demikian pada sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Ketersediaan untuk bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak. Jadi dalam pasar persaingan sempurna mereka mau bekerja pasti akan memperoleh pekerjaan. Pengecualian berlaku bagi mereka yang pilih-pilih pekerjaan, atau tidak mau bekerja dengan tingkat upah yang diatur oleh pasar.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam posisi keseimbangan semua sumberdaya, termasuk sumber daya tenaga kerja, akan dimanfaatkan secara penuh. Jika seandainya terjadi pengangguran, pemerintah tidak perlu melakukan tindakan/kebijaksanaan apapun. Tetapi menurut Keynes dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat pekerja yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Ketika upah turun maka pendapatan sebagian masyarakat akan turun, sehingga menurunkan daya beli, yang pada gilirannya akan mendorong turunnya harga-harga. Ketika harga-harga turun ini akan menyebabkan nilai produktivitas marginal labor turun drastis pula, dan jumlah tenaga kerja yang tertampung jadi semakin kecil, dan pengangguran menjadi semakin luas.

Jumlah penduduk yang makin besar telah membawa akibat jumlah angkatan kerja yang semakin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seharusnya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang sesuai keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa pereko-

nomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru.

Kesempatan kerja mengandung pengertian bahwa besarnya kesediaan usaha produksi untuk mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu saat dari kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja dapat tercipta apabila terjadi permintaan tenaga kerja di pasar kerja sehingga dengan kata lain kesempatan kerja juga menunjukkan permintaan terhadap tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja merupakan suatu usaha untuk mengembangkan sektor-sektor penampungan kesempatan kerja dengan produktivitas rendah. Usaha perluasan kesempatan kerja tidak terlepas dari faktor-faktor seperti, pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, atau kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri.

Dalam Mulyadi (2008), ada dua teori yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan yaitu teori Lewis (1959) dan teori Fei-Ranis (1961). Teori Lewis mengatakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan suatu masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyedia pekerja di sektor lain. Ada dua struktur di dalam perekonomian negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan sektor subsisten terbelakang, dimana sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian tetapi juga termasuk sektor informal seperti pedagang kaki lima.

Pada subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran tenaga kerja dan tingkat upah yang relatif murah. Lebih murah biaya upah pekerja asal pedesaan akan menjadi pendorong bagi pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern perkotaan. Selama berlangsungnya proses

industrialisasi maka kelebihan penawaran tenaga kerja akan terserap. Bersamaan dengan terserapnya kelebihan pekerja di sektor industri modern, maka pada suatu waktu tingkat upah di pedesaan akan meningkat sehingga ini akan mengurangi ketimpangan antara pedesaan dan perkotaan.

Teori Lewis hanya memberikan gambaran tentang peranan pembentukan modal terhadap perkembangan kesempatan kerja dan kenaikan produktivitas di sektor kapitalis, dan akibat dari perubahan-perubahan tersebut kepada perekonomian. Seperti yang ditunjukkan Lewis yang berpendapat bahwa kenaikan produktivitas merupakan keadaan yang menyebabkan proses pembangunan terus-menerus berlangsung. Dengan adanya kenaikan produktivitas maka produk marjinal tenaga kerja di sektor kapitalis dapat dipertahankan agar besarnya tetap lebih dari tingkat upah di sektor tersebut. Keadaan ini dapat memungkinkan para pengusaha tetap dapat mengembangkan kegiatan-kegiatan produktif mereka.

Sedangkan menurut teori Fei-Ranis (1961) mengemukakan bahwa suatu negara berkembang mempunyai ciri-ciri yaitu kelebihan buruh, sumberdaya alamnya belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyak pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Menurut Fei-Ranis ada tiga tahap pembangunan ekonomi dalam kondisi kelebihan buruh. Pertama, penganggur semu (yang tidak menambah *output* pertanian) dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Kedua, tahap dimana pekerja di sektor pertanian menambah *output* tetapi memproduksi lebih kecil dari upah institusional yang mereka peroleh. Ketiga, tahap ditandai awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan *output* lebih besar daripada perolehan upah institusional. Dan dalam hal ini kelebihan pekerja terserap ke sektor jasa dan industri yang meningkat terus menerus sejalan dengan

pertambahan *output*. Analisis Fei-Ranis juga menunjukkan pengaruh dari pertambahan penduduk terhadap proses pembangunan, pengaruh sistem pasar terhadap interaksi di antara sektor pertanian dan industri, dan jangka masa (*life cycle*) dari berlakunya proses pembangunan untuk mencapai negara industri.

Penduduk suatu negara dibagi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada batas umur kerja. Tenaga kerja dibagi kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam umur kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan umum, untuk sementara sedang tak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam umur kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa.

Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja selain jumlah penduduk, seperti pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain (Mala dkk, 2017). Pertumbuhan penduduk akan sangat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatan kerja akan bertambah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja semakin baik, karena itu berarti partisipasi angkatan kerja semakin meningkat. Bila peningkatan angkatan kerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja diiringi dengan menurunnya partisipasi pen-

duduk angkatan kerja, ini pertanda bahwa pemicu tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan. Dengan kata lain mengakibatkan bertambahnya pengangguran (Mulyadi,2008).

Dalam pembangunan nasional, perencanaan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ditekankan pada tiga masalah pokok, yaitu : perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja. Semakin akurat data peramalan tingkat partisipasi angkatan kerja, semakin baik pula perencanaan yang dihasilkan.

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan hubungan antara jumlah pekerja dan tingkat upah sebagai harga dari permintaan tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Pengusaha mempekerjakan seseorang karena membantu produksi barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen. Dengan kata lain pertambahan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha tersebut tergantung dari pertambahan permintaan terhadap barang dan jasa oleh konsumen sehingga permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja juga disebut *derived demand* yaitu permintaan yang terjadi karena adanya permintaan lain seperti permintaan barang dan jasa.

Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari berapa besarnya permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Besar kecilnya elastisitas permintaan tenaga kerja dipengaruhi faktor-faktor yang memungkinkan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lainnya. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan dan elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Semakin kecikemungkinan mensubtitusi modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan tenaga kerja. Semakin besar elastisitas permin-

taan barang hasil produksi, semakin besar elastisitas akan permintaan tenaga kerja dan semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap dalam produksi semakin besar elastisitas permintaan tenaga kerja.

Madris (2021) menyatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan derived demand dari permintaan tenaga kerja. yakni permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan dari *output* yang diproduksi. Dengan kata lain secara fungsional Produk marjinal tenaga kerja merupakan turunan dari *output* yang dihasilkan. Teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer disebutkan bahwa faktor-faktor yang mampu meningkatkan *output* adalah modal manusia, modal fisik, riset dan pengembangan.

Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas di sektor- sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah pendapatan bagi penduduk yang bersangkutan. Kebijakan yang diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja harus dilihat dalam hubungan dengan kebijakan yang menyangkut pemerataan pendapatan dalam masyarakat.

Mutu Sumber Daya Manusia

Mutu sumber daya manusia merupakan suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan dapat diakumulasikan. Biaya (pengorbanan) untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa mendatang. Penggunaan istilah modal manusia menyiratkan suatu perhatian pada pengolahan sumber daya manusia, yang merupakan suatu investasi. Seperti halnya tanah, sejumlah tenaga kerja yang tidak “bermutu” tidak dapat menghasilkan *output* yang banyak. Tenaga kerja yang tidak bermutu bukan saja tidak menyumbang pada peningkatan *output* tetapi mereka juga ikut menikmati *output* yang tidak mereka hasilkan. Hasilnya jelas mengurangi pendapatan perkapita. Maka, tersedianya jumlah tenaga kerja atau penduduk dalam jumlah

besar dan mutu yang rendah akan menyebabkan tersedianya *output* per kapita yang rendah.

Secara umum peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dicapai melalui pendidikan maupun berdasarkan pengalaman. Akan tetapi meningkatkan sumber daya manusia melalui pengalaman dibutuhkan waktu yang relatif lama dibandingkan melalui pendidikan. Sehingga salah satu indikator yang lebih representatif untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah melalui tingkat pendidikan yang pernah dicapai.

Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Karena modal manusia memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi, maka implikasinya pendidikan juga memiliki hubungan yang positif dengan produktivitas. Menurut Buchari (2016) beberapa investor fokus pada kompetensi pekerja sehingga investor lebih tertarik berinvestasi di tempat yang memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Tentunya dengan tingkat pendidikan yang rendah mencerminkan kualitas *human capital* yang belum memiliki kapabilitas maksimal. Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang bekerja khususnya di sektor industri atau non pertanian akan menyebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas *output* yang diproduksi oleh produsen dan secara langsung akan berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut.

Menurut Silaen dan Astrid (2015), tenaga kerja yang terlatih dengan pendidikan yang cukup dapat menjadi modal yang besar bagi pembangunan sebuah daerah melalui sektor industri yang dapat di kembangkan. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja pada calon luaran. Mankiw dalam

Buchari(2016) memiliki teori khusus mengenai tenaga kerja tersebut. Perusahaan manufaktur memproduksi barang dan jasa yang kelak akan dikonsumsi dan investasi dalam modal fisik. Perguruan tinggi, angkatan kerja, dan perusahaan industri manufaktur memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Angkatan kerja yang memiliki pendidikan hingga tahap universitas dan bekerja di industri manufaktur kelak akan memiliki kapabilitas dalam mengembangkan industri manufaktur dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk meningkatkan *output*. *Output* yang meningkat akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Penurunan kesempatan kerja bagi yang tidak berpendidikan mendorong setiap penduduk untuk melindungi posisi atau prospek hidupnya dengan cara menempuh pendidikan tingkat dasar hingga tamat. Dinamika dari proses permintaan-penawaran terhadap kesempatan kerja akhirnya menuju pada suatu situasi dimana kesempatan bekerja untuk mereka yang hanya berpendidikan sekolah dasar menurun. Dan pada gilirannya, hal tersebut akan meningkatkan permintaan terhadap pendidikan yang paling tinggi. Namun, permintaan terhadap pendidikan tingkat dasar juga akan meningkat, karena sebagian orang yang tadinya puas dengan tidak berpendidikan merasa semakin tergeser keluar dari pasaran tenaga kerja (Todaro,2006).

Perbaikan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan, perluasan spesialisasi dan perbaikan organisasi memproduksi merupakan faktor-faktor penting yang akan memperbaiki mutu dan efisiensi faktor-faktor produksi dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi. Tingkat pengetahuan suatu masyarakat merupakan faktor lain yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Menurut ahli ekonomi Klasik John Stuart Mill, tingkat perkembangan pengetahuan pada suatu masa tertentu berfungsi sebagai faktor yang menentukan taraf kemajuan kegiatan industri pada waktu tersebut. Selanjutnya Mill

berpendapat bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan: perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang menghapuskan hambatan-hambatan pembangunan yang diciptakan manusia. Mill menekankan bahwa pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan ekonomi, karena menurutnya faktor tersebut memerankan dua fungsi penting dalam pembangunan ekonomi yaitu meninggikan pengetahuan teknik masyarakat dan meninggikan pengetahuan umumnya. Pendidikan dapat menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan-kebiasaan yang lebih modern atau rasional, dan ini sangat besar peranannya untuk menentukan kemajuan ekonomi suatu masyarakat (Sukirno, 2006).

Investasi Swasta

Investasi diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang (Sukirno, 2008).

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Samuelson dan Nordhaus (1996) bahwa investasi merupakan suatu hal yang penting dalam pembangunan ekonomi karena dibutuhkan sebagai faktor penunjang di dalam peningkatan proses produksi. Investasi mendorong terjadinya akumulasi modal. Penambahan stok bangunan gedung dan peralatan lainnya akan meningkatkan *output* potensial suatu bangsa dan merangsang pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang. Hampir seluruh ahli ekonomi menekankan arti penting penanaman modal (investasi) sebagai salah satu faktor dan penentu utama pertumbuhan ekonomi (Sari, dkk, 2016).

Menurut Harrod-Domar, investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. Investasi juga dapat membawa teknologi baru dan pengetahuan lainnya yang berguna dalam pembangunan di dalam negeri. Investasi memiliki jaringan yang kuat dengan lembaga-lembaga keuangan global, sehingga tidak tergantung pada dana dan perbankan di Indonesia (Silaen dan Astrid 2015).

Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi adalah karena adanya alokasi dana investasi dan resources utama lainnya, termasuk teknologi dan tenaga kerja atau sumber daya manusia dari satu sektor ke sektor lain. Realokasi ini dapat terjadi disebabkan karena adanya perbedaan produktivitas atau pendapatan riil antar sektor, adanya kemiskinan di salah satu sektor ataupun karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan sektor-sektor tertentu, misalnya kebijakan industrialisasi dan kebijakan perdagangan luar negeri yang mengutamakan pembangunan atau pertumbuhan *output* di sektor industri.

Semakin tinggi investasi yang masuk pada sektor-sektor non pertanian maka kesempatan kerja semakin banyak tercipta. Hubungan investasi dengan pertumbuhan sektor industri, investasi merupakan pengeluaran untuk menambah atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal (*capital stocks*) terdiri dari pabrik, mesin, kantor dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Barang modal yang juga meliputi perumahan tempat tinggal dan persediaan adalah komponen-komponen yang akan menambahkan pengeluaran yang merupakan investasi. Sehingga investasi akan mempengaruhi pertumbuhan sektor industri.

Wacana pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, maupun kesejahteraan masyarakat sering dikaitkan dengan investasi sebagai pendorong utamanya. Dalam proses produksi, tambahan investasi menjadi pelipatganda *output* yang membutuhkan tambahan tenaga kerja. Maka setiap negara berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi, terutama investasi swasta. Perkembangan investasi swasta sangat tergantung dari fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah berupa sarana dan prasarana yang menarik minat investor asing maupun dalam negeri (Murbarani,2009).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan belanja pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. Melalui pengeluaran pemerintah dapat memperbesar *output* yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi sumber penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan agregat maka akan mendorong produsen untuk meningkatkan *output* produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan *input* produksi salah satunya adalah tenaga kerja sehingga dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran Pemerintah dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan barang modal dalam bidang pembangunan infrastruktur sosial (kesehatan, pendidikan, dan

fasilitas umum/publik) yang dianggarkan dalam belanja pembangunan atau belanja langsung (Ziyadatur Rofiqoh, dkk. 2018).

Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja karena variabel ini diwujudkan pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara/daerah. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu: modal, tenaga kerja, dan teknologi

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan penambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah (Sitaniapessy,2013). Peranan belanja negara dalam pembangunan ekonomi terletak di dalam peningkatan laju pertumbuhan perekonomian, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, dalam mendorong inisiatif dan usaha swasta (Jhingan,2013).

Dalam Harijono dan I Made (2013), pengeluaran pemerintah merupakan komponen relatif kecil dibanding komponen lain dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi. Walau demikian, pengeluaran pemerintah mempunyai efek sosial politis yang strategis sebagai fungsi alokasi, distribusi, maupun stabilisasi. Selain itu, pengeluaran peme-

rintah pun mempunyai efek multiplier terhadap ekonomi makro riil dalam pergerakan jangka pendek dari *output* dan ketenagakerjaan. Belanja modal pada pemerintah diantaranya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur fisik yang tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Menurut Tambunan dalam Afiat (2115), pengeluaran pemerintah secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi Perubahan Struktur Ekonomi. Menurut Todaro (1991), bahwa Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa.

Meskipun sektor pertanian mampu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia untuk keluar dari krisis, tetapi kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional masih tetap rendah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah, akan semakin tinggi perubahan struktur ekonomi dari sektor Pertanian ke sektor Industri dan sektor Jasa. Sebaliknya, jika semakin rendah pengeluaran pemerintah, akan semakin rendah perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian menuju sektor industri dan sektor jasa.

Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar *output* yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu, juga dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat. Karena adanya kenaikan permintaan agregat sehingga mendorong produsen untuk meningkatkan *output* produksinya. Untuk itu, produsen memerlukan tambahan *input* produksi, salah satunya adalah tenaga kerja, sehingga akan tercipta kesempatan kerja baru. Dengan demi-

kian, kenaikan pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan kerja baru bagi masyarakat.

Hasil Produksi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan perekonomian negara, yang dapat diukur dengan pendapatan nasional atau yang lebih dikenal sebagai produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat serta merata.

Semakin besar *output* atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurut teori yang dikemukakan oleh Keynes dalam Boediono (1998) bahwa tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Apabila *output* yang diproduksi naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan juga naik. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep fungsi produksi, yang menyatakan bahwa menaikkan *output* hanya dapat tercapai apabila *input* (tenaga kerja) ditingkatkan penggunaannya. Permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian akan mempengaruhi tingkat *output* yang harus diproduksi sehingga berdampak pada penggunaan *inputnya* (tenaga kerja). Karena sesuai teori produksi yang menyatakan bahwa permintaan *input* merupakan *derived demand* dari permintaan *output*, yang artinya permintaan akan *input* baru terjadi bila ada permintaan akan *output*.

Semakin besar permintaan agregat yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Permintaan agregat yang ada tidak selalu mencapai tingkat permintaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesem-

patan kerja penuh. Karena itu pengangguran akan selalu terjadi. Untuk mengatasinya, pemerintah harus mempengaruhi permintaan agregat dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa terdapat hubungan antara *output* nasional dan kesempatan kerja. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, maka kesempatan kerja mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, maka kesempatan kerja akan mengalami penurunan.

Syrquin (1985) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pertumbuhan dan perubahan struktural. Pertumbuhan ekonomi mengakibatkan adanya perubahan struktur ekonomi pada suatu daerah ataupun negara. Transformasi ekonomi sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, dimana masing-masing perekonomian mengalami transformasi yang berbeda-beda. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bawuno Elizabeth dkk., (2015) bahwa pertumbuhan ekonomi sesungguhnya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sangat dan selalu diharapkan oleh setiap negara. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi, maka di dalam suatu negara tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang di negara industri dan negara sedang berkembang menunjukkan bahwa sektor industri lebih cepat tumbuh dibandingkan dengan sektor pertanian.

Menurut fungsi produksi bila *input* yang digunakan naik maka *output* yang dihasilkan akan naik, *input* yang digunakan dalam faktor produksi adalah modal fisik dan modal manusia. Produsen selalu me-

miliki tujuan untuk meningkatkan laba dan *output* yang diproduksi. Oleh karena itu ketika *output* yang diproduksi meningkat maka produsen akan berusaha meningkatkan lebih banyak *output* agar meningkatkan laba yang diperoleh dengan cara menyerap tenaga kerja di sektor industri manufaktur (Buchari,2006). Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan kebutuhan *input* tenaga kerja, sehingga akan memperluas penyerapan kesempatan kerja.

Perubahan Struktur Ekonomi

Masalah pembangunan ekonomi dapat dilihat sebagai suatu proses peralihan dari satu tingkat ekonomi bercorak sederhana menuju tingkat ekonomi yang lebih maju yang mencakup beraneka ragam kegiatan. Dalam peralihan (transisi) tersebut, terlaksana suatu transformasi dalam arti adanya perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang berkisar pada landasan kegiatan ekonomi dan melekat pada tata susunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi sebagai transisi yang ditandai oleh suatu transformasi mengandung perubahan yang mendasar pada suatu struktur. Berdasarkan berbagai penelitian empiris, dapat diamati beberapa fenomena yang selalu muncul dalam proses perubahan struktural. Dimana secara umum dapat dikatakan bahwa transformasi lazim ditandai oleh perubahan dan pergeseran dari kegiatan sektor produksi primer (pertanian, pertambangan) ke sektor sekunder (industri manufaktur) dan ke sektor tersier (Louhenapessy, 2014).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Todaro (2003), bahwa pembangunan ekonomi pada dasarnya mempunyai dimensi pokok, yaitu pertumbuh-

an, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi ekonomi dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Agar pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, diharapkan terjadi perubahan atau transformasi struktur ekonomi (Hukom, 2014).

Szirmai (2012) telah melakukan penelitian pada sekitar 67 negara sedang berkembang dan mendapatkan hasil bahwa akibat adanya perubahan struktur ekonomi, sektor-sektor industri telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi bagi negara berkembang. Landesman dan Roman (2019) juga mengatakan bahwa ekonomi global telah mengalami perubahan struktur yang sangat cepat. Proses pembangunan yang sangat mengesankan pada sejumlah negara berkembang telah mendorong pergeseran kuat dalam pangsa perdagangan global.

Dalam Harsono (2013) juga menyatakan bahwa salah satu model pembangunan ekonomi ialah melalui pendekatan perubahan struktural memusatkan perhatiannya pada mekanisme pertumbuhan ekonomi yang akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi, khususnya transformasi sektor pertanian subsisten ke sektor industri. Pendekatan pembangunan ini mempercayai bahwa pertumbuhan pada akhirnya dapat menciptakan pemerataan pembangunan dengan melalui perubahan konsumsi dan investasi serta alokasi penyerapan tenaga kerja.

Perubahan struktur ekonomi jangka panjang di mana pertumbuhan PDB akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, yaitu dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke sektor modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri manufaktur dengan relasi positif antara pertumbuhan *output* dan pertumbuhan produktivitas yang dinamis sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Ada kecenderungan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat

semakin tinggi pendapatan masyarakat perkapita, semakin cepat perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor penentu lain yang mendukung proses tersebut seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, teknologi tersedia.

Teori tentang perubahan struktur ekonomi yaitu dari Hollis Chenery yang berfokus pada perubahan struktur ekonomi di negara berkembang yang mengalami transformasi dari pertanian ke sektor industri sebagai penggerak utama pertumbuhan. Penelitian Chenery menunjukkan peningkatan perkapita telah mengubah pola konsumsi dari makanan dan kebutuhan pokok ke produk manufaktur dan jasa, akumulasi modal secara fisik dan SDM, perkembangan kota dan industri, penurunan laju pertumbuhan penduduk, ukuran keluarga yang kecil, sektor ekonomi yang didominasi oleh sektor non primer terutama industri.

Ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi, atau tidak berhasil melakukan diversifikasi ekonomi (perubahan struktur) ketimbang dengan negara yang miskin SDA. Sebagai contoh, Indonesia yang awalnya sangat mengandalkan kekayaan SDA terutama migas dapat dikatakan relatif terlambat melakukan industrialisasi dibandingkan dengan negara-negara kecil dan miskin SDA di Asia Tenggara dan Timur, seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan (Machmud,2016).

Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Tanggung jawab ideal dari dunia kerja adalah bagaimana dapat menyerap sebesar-besarnya tambahan angkatan kerja yang terjadi setiap tahun, dengan tetap memperhatikan peningkatan produktivitas pekerja secara keseluruhan. Sebab dengan meningkatnya produktivitas, diharapkan upah juga meningkat sekaligus kesejahteraan pekerja dapat diperbaiki.

Referensi

- Afiat, Muhammad Nur. 2015. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Di Propinsi Sulawesi Tenggara*. JEP-Jurnal Ekonomi Pembangunan Fe-Unhalu. Volume Xvi.
- Bawuno, Eunike Elisabeth,Dkk. 2015. *Pengaruh Investasi Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado (Studi Pada Kota Manado Tahun 2003-2012)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 04.
- Buchari, Imam. 2016. *Pengaruh Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur Di Pulau Sumatera Tahun 2012-2015*. EKSIS. Vol XI No 1.
- Harsono, Iwan. 2013. *Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Pamator. Vol 6. No 1.
- Hukom, Alexandra. 2014. *Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan. Vol 7.No 02.
- Jhingan, M.L.2008. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Landesmann,Michael A & Roman Stollinger. 2019. *Structural Change, Trade And Global Production Networks: An Appropriate Industrial Policy For Peripheral And Chatching-Up Economies*. ELSAVIER:Structural Change And Economic Dynamics. Vol.48. 7-23.
- Louhenapessy. Desryj. 2014. *Perhitungan Indeks Perubahan Struktur (Structural Changes Index) Pada Sektor Perekonomian di Kota*

Ambon. Vol 8.No 1.

- Machmud, Amir. 2016. *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta:Salemba Empat
- Mulyadi,S. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta:Rajawali Pers
- Murbarani, Nova. 2009. *Keterkaitan Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Perekonomian Kota Palembang (Input-Output Analisis)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 7, No. 1.
- Samuelson, P, A,Dan Northaus,W,D.1996. *Makro Ekonomi*, Edisi Ke Empatbelas. Jakarta: Erlangga.
- Sari,Nurvita,dkk. 2016. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi*. e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Vol 5. No.1.
- Silaen, Mikha L, Dan Astrid Maria Esther. 2015. *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Sektor Industri Di Provinsi Jawa Barat*. Media Ekonomi .Vol. 23 No. 3.
- Sitaniapessy. Harry. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD*. Jurnal Ekonomia. Vol 9. No 1.
- Squire, Lyn., 1986. *Kebijakan Kesempatan Kerja di Negari-negari Sedang Berkembang: Sebuah Survei Masalah-masalah dan bukti-bukti*. UI Pre. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Szirmai, Adam. 2012. *Industrialisation As An Engine Of Growth In*

Developing Countries, 1950-2005. ELSAVIER: Structural Change and Economic Dynamics. Vol.23 (2012) 406-420.

Todaro. Michael P, Stephen C.S. 2006. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Jakarta:Erlangga.

Ziyadaturrofiqoh. dkk. 2018. *Pengaruh Pdrb, Upah Minimum Provinsi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jambi*. E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan. Vol. 7. No.1.

Bab VIII

Determinan Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi: Sisi Permintaan

*Intan Nur Asih
Munawarah*

Tinjauan Teoretis

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Sukirno, 2008). Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha mencari pekerjaan (Simanjuntak, 1985). Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Subri, 2003)

Badan Pusat Statistik mendefinisikan pengangguran sebagai mereka yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan, seperti mereka yang

belum bekerja yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang sudah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu, sebulan pencarian, jadi mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan dan permohonannya telah dikirim lebih satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai pencari kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu daerah/wilayah biasa didapat dari presentasi membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen (Badan Pusat Statistik, 1990).

Menurut konsep yang digunakan Badan Pusat Statistik dalam SAKERNAS (1998), angkatan kerja yang merupakan penduduk usia kerja (10 tahun atau lebih) punya pekerjaan sementara, tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang diartikan bekerja disini adalah mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu.

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan kepada enam jenis yaitu: (1) Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional dapat pula terjadi karena kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat bukan disekitar tempat tinggal pencari kerja. (2) Pengangguran struktural terjadi karena perubahan dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri de-

ngan keterampilan baru tersebut. (3) pengangguran yang terjadi akibat dari ketidakcukupan pada lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran ini sangat terkait dengan perubahan pada siklus kegiatan ekonomi. (4) Pengangguran tersembunyi dapat terjadi apabila penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi. (5) Pengangguran musiman seringkali muncul pada waktu-waktu tertentu pada satu tahun, biasanya terjadi berkaitan dengan perubahan musim pada suatu wilayah. (6) Pengangguran setengah menganggur, pengangguran ini terjadi sebagai akibat dari adanya peningkatan jumlah penduduk sehingga tenaga kerja yang ada akan berupaya untuk mencari pekerjaan meskipun dengan waktu yang lebih sedikit. (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Mankiw (2000) menyatakan bahwa pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkan waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekuatan upah. Kekuatan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum, daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi.

Teori Pertumbuhan Keynes

John Maynard Keynes (1936). Dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Keynes melihat perekonomian secara keseluruhan (makro). Menurut Keynes dalam kegiatan perekonomian terutama tergantung kepada segi permintaan, yaitu tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat yang wujud tidak selalu mencapai full

employment, untuk mengatasinya pemerintah perlu mempengaruhi pengeluaran agregat (Sukirno, 2000).

Komponen utama pembelanjaan agregat ada 4 yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana: Y = Pendapatan nasional, C = pengeluaran konsumsi rumah tangga, I = investasi yang dilakukan oleh pihak swasta, G = pengeluaran pemerintah, dan NX = ekspor neto (ekspor – impor). Intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dilakukan 3 hal, yaitu melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengawasan langsung. Kebijakan fiskal dilakukan oleh departemen keuangan dengan instrumen APBN, kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dengan mempengaruhi penawaran dan permintaan uang, dan pengawasan langsung melalui peraturan-peraturan. Implikasi pandangan Keynes adalah untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian baik melalui kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) maupun kebijakan fiskal (perpajakan dan belanja pemerintah).

Hukum Okun

Pada tahun 1962, Okun dalam artikelnya menyajikan dua hubungan empiris yang menghubungkan tingkat pengangguran dan *output* riil, yang kemudian dikenal menjadi Hukum Okun. Hingga saat ini, kedua persamaan sederhana yang dikembangkan Okun telah digunakan sebagai aturan praktis sejak saat itu. Kedua hubungan Okun muncul dari pengamatan dimana lebih banyak tenaga kerja biasanya diperlukan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dalam

suatu perekonomian. Lebih banyak tenaga kerja bisa diartikan dalam berbagai bentuk, seperti memiliki karyawan yang bekerja lebih lama atau menyewa lebih banyak pekerja. Untuk menyederhanakan analisis, Okun mengasumsikan bahwa tingkat pengangguran dapat berfungsi sebagai pengganti variabel dari jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam perekonomian.

The difference version (Okun, 1962) hubungan Okun yang pertama mengungkap bagaimana perubahan dalam tingkat pengangguran dari satu seperempat hingga berikutnya berpindah secara triwulanan dalam *output* riil. Hubungan ini disebut *difference version* dari hukum Okun. Disini Okun menemukan bahwa terdapat hubungan yang terjadi dalam waktu yang bersamaan antara pertumbuhan *output* dan perubahan dalam pengangguran yaitu, bagaimana *output* tumbuh bervariasi secara bersamaan dengan perubahan dalam tingkat pengangguran. Parameter b sering disebut sebagai "koefisien Okun".

The gap version (Okun, 1962) pada hubungan okun yang pertama didasarkan pada statistik makroekonomi mudah diakses, sedangkan hubungan kedua Okun mengaitkan tingkat pengangguran dengan kesenjangan antara *output* potensial dan *output* aktual. Dalam *output* potensial, Okun berusaha untuk mengidentifikasi berapa banyak perekonomian akan memproduksi "dalam kondisi *full employment*". Dalam kondisi *full employment*, Okun mempertimbangkan apa yang dia yakini bahwa tingkat pengangguran berada pada level cukup rendah untuk menghasilkan sebanyak mungkin *output* tanpa menghasilkan terlalu banyak tekanan inflasi. Tingkat pengangguran yang tinggi, menurut Okun, biasanya akan dikaitkan dengan sumberdaya yang tidak terpakai. Dalam keadaan seperti itu, yang akan terjadi adalah tingkat *output* aktual berada di bawah kemampuan potensialnya. Tingkat pengangguran yang sangat rendah akan dikaitkan dengan skenario terbalik.

The dynamic version (Okun, 1962). Salah satu dari pengamatan Okun menyatakan bahwa baik *output* masa lalu dan saat ini dapat berdampak pada tingkat pengangguran saat ini. Dalam *difference version* hukum Okun, hal ini diartikan bahwa beberapa variabel yang relevan telah dihilangkan dari sisi kanan dari persamaan. Sebagian didasarkan pada saran dimana banyak dari ekonom lain untuk menggunakan versi dinamis dari Hukum Okun. Bentuk umum untuk *dynamic version* Hukum Okun akan menunjukkan pertumbuhan *output* riil, pertumbuhan *output* riil masa lalu, dan perubahan dalam tingkat pengangguran sebagai variabel di sisi kanan persamaan. Variabel ini akan menjelaskan perubahan tingkat pengangguran yang terjadi saat ini pada sebelah kiri persamaan. *Dynamic version* dari hukum Okun ini memberi ruang beberapa kemiripan dengan *difference version* asli dari hukum Okun. Namun, pada dasarnya tetap berbeda karena tidak hanya menangkap korelasi yang terjadi secara bersamaan antara perubahan tingkat pengangguran dan pertumbuhan *output* riil. Hubungan dinamis tidak ketat terkait waktu terjadinya hubungan antara pertumbuhan *output* dan perubahan tingkat pengangguran. Namun kelemahan dari versi ini adalah bahwa hubungan antar variabel tidak dapat ditafsirkan secara sederhana seperti *difference version* yang asli dari Hukum Okun.

Hubungan Investasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Harrod-Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan (dampak permintaan). Kedua, investasi mampu memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan meningkatkan stok modal (dampak penawaran investasi). Karena itu selama investasi neto tetap berlangsung pendapatan riil dan *output* akan senantiasa meningkat. Se-

hingga apabila kesempatan kerja hendak dipertahankan dalam jangka panjang, maka investasi harus senantiasa diperbesar (Jhingan, 1994)

Sedangkan menurut Keynes bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat pengeluaran seluruh masyarakat. Oleh karena itu jika volume investasi yang diperlukan tidak terpenuhi oleh pemerintah maka akan mengakibatkan agregat akan turun lebih rendah daripada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan menurun secara drastis. Sehingga perubahan antara pekerjaan dan pendapatan sebagian besar tergantung kepada investasi, sedangkan volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Investasi dapat ditingkatkan melalui peningkatan efisiensi marginal dan modal atau penurunan tingkat suku bunga. Kenaikan investasi akan menyebabkan kenaikan pekerjaan, akan tetapi ini bisa saja tidak terjadi jika pada waktu yang tidak sama kecenderungan mengkonsumsi dapat mengakibatkan peningkatan kesempatan kerja tanpa kenaikan investasi (Jhingan, 1994).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam investasi terdapat unsur-unsur penting yang ditekankan yaitu, penambahan modal atau kapital yang bertujuan untuk menambah barang-barang atau alat produksi dalam jangka panjang dengan pertimbangan bahwa dialokasikan pada sektor-sektor yang menguntungkan dan aman dari resiko kerugian.

Pembentukan modal adalah mutlak diperlukan dalam usaha mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, karena sangat dibutuhkan untuk membiayai pembangunan agar produksi (*output*) nasional dapat ditingkatkan maupun untuk perluasan kesempatan kerja. Investasi merupakan dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan diharapkan akan memberikan hasil berupa balas jasa dan modal di masa akan datang. Investasi merupakan variabel yang sangat tidak stabil, yang dalam hal ini selalu berfluktuasi (Gardner dalam Sinardin

Tahir, 2002). Hal ini disebabkan karena investasi tidak saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut lagi Schumpeter (1911) membedakan investasi dalam investasi terpengaruh (*induced investment*) yaitu investasi yang besar kecilnya tergantung atau dipengaruhi oleh perubahan dalam pendapatan nasional, volume penjualan, keuntungan perusahaan, dan lain-lainnya; dan investasi otonom (*outonomous investment*) yaitu investasi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh perubahan-perubahan yang bersifat jangka panjang seperti adanya penemuan baru, perkembangan teknologi dan sebagainya.

Hampir semua ahli ekonomi menekankan arti penting investasi sebagai penentu utama pada pertumbuhan ekonomi. Investasi atau permodalan merupakan persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat dihasilkan maupun direproduksi. Jika persediaan modal tersebut meningkat dalam jangka waktu tertentu maka dapat dikatakan bahwa terjadi pembentukan modal pada waktu tersebut. Akumulasi modal inilah yang serba kekurangan di negara-negara berkembang, sedangkan modal ini memegang peranan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

Menurut Nurkse dalam Jhingan (2010), lingkaran setan kemiskinan di negara terbelakang dapat digunting melalui pembentukan modal. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendapatan di negara terbelakang maka permintaan, produksi, dan investasi menjadi berada pada tingkatan yang rendah. Hal ini menyebabkan kekurangan barang modal yang dapat diatasi melalui pembentukan modal.

Investasi dalam peralatan modal tidak saja meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja. Dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih luas, maka tingkat pendapatan masyarakat bertambah

dan berbagai macam kebutuhan rakyat terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kenaikan laju investasi akan meningkatkan pendapatan nasional. Oleh sebab itu investasi merupakan jalan keluar utama dari masalah yang dihadapi negara terbelakang dan merupakan kunci utama menuju pertumbuhan ekonomi.

Hubungan Investasi dengan Pengangguran

Menurut Sukirno (2004) pengertian investasi yaitu pengeluaran atau pembelanjaan penanaman – penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pengertian lain dari investasi adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi hasil investasi (seperti pendapatan bunga, “royalti”, deviden, pendapatan sewa dan lain-lain), untuk apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus $PDB = C + I + G (X-M)$.

Peran investasi di Provinsi Sulawesi Selatan sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian di daerah karena *multiplier effect* dari investasi akan meningkatkan produktivitas, memacu pertumbuhan dan berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Investasi dapat menjadi pendorong roda perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan ketika semua pihak mendapat manfaat maksimal dari aktivitas tersebut. investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang.

Investasi di sektor perdagangan dan jasa paling menonjol dan menunjukkan peningkatan yang signifikan, terbukti dengan berdiri-

nya beberapa pusat perdagangan yang baru dalam beberapa tahun terakhir ini. Disisi lain, Pemerintah Kota berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya, dan salah satu yang dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat peningkatan kesejahteraan penduduk tersebut adalah adanya peningkatan pendapatan perkapita yang secara signifikan dapat dikatakan meningkat apabila pertumbuhan ekonomi lebih besar dari pertumbuhan penduduk. Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat diperlukan adanya investasi baru untuk membuka usaha baru maupun untuk mengoptimalkan kapasitas produksi, disamping memberikan/membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran.

Hubungan antara investasi dengan pengangguran dapat dilihat berdasarkan teori Harrod Domar dalam Kurniawan (2011). Harrod Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya, semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi "*full employment*". Ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, yang mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu, perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat pula.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan tidak semata-mata menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan me-

rupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan.

Terdapat berbagai instrumen yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Salah satunya diantaranya adalah pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Layaknya pengeluaran masyarakat, maka pengeluaran pemerintah akan memperbesar permintaan agregat melalui *multiplier effect* dan selanjutnya akan meningkatkan produksi atau penawaran agregat, sehingga PDRB akan meningkat. Meningkatnya PDRB merupakan indikasi timbulnya suatu perekonomian yang akan menambah penerimaan.

Implikasi dari pembangunan dalam pendidikan adalah kehidupan manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum yaitu semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Semakin tinggi kualitas hidup/investasi sumberdaya manusia akan berimplikasi juga terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (Astri dkk, 2013)

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari pada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga investment in human capital. Hal ini berarti peningkatan kemampuan masyarakat menjadi suatu tumpuan yang paling efisien dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah.

Asumsi yang digunakan dalam teori human capital adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat berproduktivitas tinggi. Teori human capital dapat diaplikasikan dengan syarat adanya sumber ekonomi tinggi secara efi-

sien dan adanya sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Teori ini percaya bahwa investasi dalam hal pendidikan sebagai investasi dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Investasi dalam hal pendidikan mutlak diperlukan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pengangguran

Menurut teori ekonomi Keynesian dalam Sadono Sukirno (2000), menjelaskan variabel pemerintah dalam hal ini adalah anggaran dijadikan salah satu faktor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor perekonomian lain. *Multiplier effect* tersebut akan semakin besar jika asumsi belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini disebabkan ketika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka akan menstimulasi kegiatan perekonomian di suatu daerah dan menciptakan *multiplier effect* yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut.

Hubungan Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan di bawah sepuluh

persen. Inflasi ringan justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena inflasi mampu memberi semangat pada pengusaha, untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha bersemangat memperluas produksinya, karena dengan kenaikan harga yang terjadi para pengusaha mendapat lebih banyak keuntungan. Selain itu, peningkatan produksi memberi dampak positif lain, yaitu tersedianya lapangan kerja baru. Inflasi akan berdampak negatif jika nilainya melebihi sepuluh persen.

Dengan adanya inflasi maka kenaikan tingkat inflasi menunjukkan adanya suatu pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka waktu panjang maka tingkat inflasi yang tinggi sangat memberikan dampak yang sangat buruk. Dengan tingginya tingkat inflasi hal ini yang menyebabkan barang domestik relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan harga barang impor.

Jika kita melihat bahwa pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Terutama jika terjadi inflasi ringan yaitu inflasi di bawah 10% dengan adanya inflasi ringan ini dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Ini yang membuat semangat para pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya dengan membuka lapangan kerja baru.

Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

Tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap jumlah pengangguran. Inflasi yang tinggi tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang meningkat menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan karena akan meningkatkan biaya produksi. Maka pemilik modal biasanya lebih memilih untuk menggunakan modalnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain dengan membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah, dan bangunan. Oleh karena pemilik modal lebih suka menjalankan kegiatan investasi seperti ini, maka

investasi produksi akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Sebagai akibatnya lebih banyak pengangguran yang tercipta (Sadono Sukirno, 2004)

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2008)

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada *Trade off*) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva Philips dimana terjadi *trade off* antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah (Nopirin, 2000). Pada awalnya, kurva Philips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki hubungan yang erat dengan pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Philips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (*trade off*) antara pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah (Dernburg dan Karya-man Muchtar, 1999)

Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan

maka permintaan akan naik kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan *output*). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka pengangguran berkurang.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan GDP yang dihasilkan suatu negara, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah *Gross National Product* (GNP).

Faktor-faktor yang menyebabkan pengangguran seperti *output* yang dikemukakan oleh Arthur Okun. *Output* dapat diilustrasikan sebagai salah satu indikasi untuk melihat adanya kesempatan kerja. Suatu periode dimana *output* lebih tinggi dari titik potensialnya, maka akan tersedia kesempatan kerja yang lebih banyak. Pada kondisi ini, pengangguran akan dapat ditekan atau bahkan akan menurun. Okun memberikan definisinya melalui Hukum Okun yang mengatakan bahwa untuk setiap 2 persen penurunan GNP secara relatif terhadap GNP potensial, tingkat pengangguran akan naik satu persen.

Arsyad (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Hal ini berarti bahwa pertumbuh-

an ekonomi daerah secara langsung maupun tidak langsung akan menciptakan lapangan kerja.

Secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan peningkatan atau penurunan PDRB yang dihasilkan suatu daerah, karena indikator yang berhubungan dengan jumlah pengangguran adalah PDRB (Alghofari, 2011).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, hubungan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, dimana kegiatan produksi untuk memacu *output* dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan daripada pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Penelitian lain yang menyatakan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah tingkat pengangguran.

Tinjauan Studi Empiris

Adapun yang menjadi acuan atau panduan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini adalah dengan melihat dari penelitian sebelumnya, yakni :

Prasaja (2013) mengemukakan bahwa variabel investasi asing mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap pengangguran, hal ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi akan menurunkan tingkat pengangguran yang dimana investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Investasi atau pembentukan modal ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan stok barang modal. Meningkatnya stok barang modal dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, sebab peningkatan stok barang modal akan meningkatkan kegiatan produksi dan meningkatkan kesempatan kerja. Tingginya kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran.

Penelitian ini oleh Nur Fitri Yanti, dkk. (2017) yang membahas mengenai “Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi Periode 2010-2014”. Salah satu penyebab ketidakmampuan ekonomi adalah status pengangguran yang tinggi. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu negara dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara tersebut. Maka studi ini adalah penelitian deskriptif, lokasi penelitian dilakukan di wilayah Sulawesi yakni, Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat dan Gorontalo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi.

Mutia dkk (2016) meneliti pengaruh investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi, tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Diperoleh koefisien regresi investasi sebesar 2,046 yang artinya setiap adanya kenaikan 1 persen terhadap investasi maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya

pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 2,046 persen dengan asumsi variabel tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah dianggap tetap. Kemudian koefisien estimasi tenaga kerja sebesar 3,5935 artinya setiap kenaikan 1 persen tenaga kerja maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5935 persen dengan asumsi variabel investasi dan pengeluaran pemerintah dianggap konstan. Terakhir koefisien estimasi pengeluaran pemerintah sebesar 0,563 artinya setiap kenaikan 1 persen pengeluaran pemerintah maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,563 persen dengan asumsi variabel investasi dan tenaga kerja dianggap konstan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anis Setiawati dan Ardi Hamzah (2007) dengan judul “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda untuk melakukan analisis jalur terhadap variabel-variabel penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa data kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel eksogen dan endogen. PAD, DAU, DAK, dan belanja investasi merupakan variabel eksogen, pertumbuhan ekonomi merupakan variabel endogen dan eksogen, kemiskinan dan pengangguran merupakan variabel endogen.

Referensi

Agustina, Yetty. 2017. *Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 2, 97 –

199.

- Alghofari, Farid. 2011. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Jurnal Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Amri Amir. 2007. *Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran di Indonesia*. Jurnal Inflasi dan Pengangguran Vol. 1 no. 1, 2007, Jambi.
- Andalana, Arista. 2018. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Penanaman Modal Asing, Tenaga Kerja, dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Indonesia Tahun 1986 – 2016*. Surakarta.
- Arsyad, L. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kedua. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Astri, Meylina, Sri Indah Nikensari, dan Harya Kuncara W. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol 1 No. 1, Unj ISSN: 2302 – 2663.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1990. *Pengertian Pengangguran dan Angkatan Kerja, Keadaan angkatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE UGM
- Coki. A. Syahwier. 2005. *Realitas Makroekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan vol.1 no. 1, 2005. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dernburg, Thomas F dan Muchtar Karyaman. 1999. *Makro Ekonomi, Konsep, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga
- Dharendra Wardhana. 2006. *Pengangguran Struktural Di Indonesia:*

- Keterangan Dari Analisis SVAR Dalam Kerangka Hysteresis.***
 Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia vol.3 no., 2006. Universitas
 Gadjah Mada.
- Gujarati, Damodar. 2000. ***Ekonometrika Dasar.*** Trans. Sumarno Zain.
 Jakarta : Erlangga
- Hermayeni, Sisca. 2014. ***Analisis Ketimpangan Investasi antar Provinsi
 di Pulau Sumatera dan Kalimantan tahun 2005-2013.*** Jom
 FEKON, Vol. 2, No. 1.
- Jingan, ML. 1994. ***Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan.*** Jakarta:
 Rajawali Press
- Kaufman, Bruce E dan Hotchkiss Julie L. 1999. ***The Economics of Labor
 Markets.*** Fifth Edition. The Dryden Press
- Keynes, John M. 1936. ***The General Theory of Employment. Interest and
 Money.*** London: Macmillan.
- Kurniawan, Aditya Barry. 2011. ***Analisis Pengaruh Pertumbuhan
 Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi Terhadap Jumlah
 Pengangguran di Kabupaten Gesik.*** Malang: Jurnal Ilmiah
 Universitas Brawijaya
- Mankiw, Gregory N. 2000. ***Teori Makro Ekonomi.*** Jakarta: Erlangga
- Nopirin. 1990. ***Ekonomi Moneter.*** Yogyakarta: BPFE UGM
- Okun, Arthur M. 1962. ***Potential GNP: Its Measurement and Significance***
 (pp. 98-103). Yale University, Cowles Foundation for Research
 in Economics.
- Nur Fitri Yanti, Haerul Anam, dan Harnida Wahyudi Adda. 2017.
***Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi, dan PDRB Terhadap Tingkat
 Pengangguran di Wilayah Sulawesi Periode 2010-2014.*** eJurnal
 Katalogis, Volume 5 Nomor 4, April 2017 hlm 138-149
- Prasaja, Mukthi Hadi. 2013. ***Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk***

dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011. Economics Development Analysis Journal.

- Prasetyo, Eko. 2011. *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tenaga Kerja, dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 1985 – 2009*. Semarang. Jurnal Universitas Semarang.
- Samuelson, Paul A dan Nordhaus, Willian D. 1996. *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Sari, Mutia, dkk. 2016. *Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Volume 3 Nomor 2, November 2016.
- Sari, Nur Ravika Famala. 2016. *Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Pengangguran Terdidik Di Jawa Timur Tahun 2010-2014*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 14, No. 01.
- Schumpeter, J.A. 1911. *The Theory of Economic Development*. New York: Oxford University Press
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Desember 2007, Vol 4, No.2, hal.211-228
- Simanjuntak, Payaman J. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinardin, Tahir. 2002. *Investasi, PDRB Dan Kesempatan Kerja di Sulawesi Selatan*. Makassar: Skripsi S1 Universitas Hasanuddin

- Soylu, Ozgur Bayram. 2018. *Economic Growth and Unemployment Issue: Panel Data Analysis in Eastern European Countries*. Journal of International Studies, Vol. 11 No. 1: 93-107.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Dua*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M dan Irawan. 1997. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE
- Zaris, Roeslan. 1987. *Perspektif Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta. LPFE UI.

Bab IX

Hubungan Teoritis antara Mutu Sumber Daya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dengan Kemiskinan

*Imran
Sabir*

Pengantar

Kemiskinan menurut World Bank didefinisikan sebagai “*The denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other*”. Dari definisi tersebut diperoleh pengertian bahwa kemiskinan itu merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, halhal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain:(1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan,perumahan, air bersih, pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Sementara itu, BKKBN mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan (*poverty*) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan

baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003).

United Nation Development Program (UNDP) meninjau kemiskinan dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan dan kualitas manusia. Dilihat dari sisi pendapatan, kemiskinan ekstrim (*extreme poverty*) atau kemiskinan absolut adalah kekurangan pendapatan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal kalori yang diperlukan. Dari sisi kualitas manusia, kemiskinan secara umum (*overall poverty*), atau sering disebut sebagai kemiskinan relatif, adalah kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan non-pangan, seperti pakaian, energi, dan tempat bernaung (UNDP, 2000).

Menurut Djohadikusumo (1995) menyatakan bahwa pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Secara ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan yang mempunyai pengertian tentang sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Secara sosial psikologi, kemiskinan dapat dilihat

dari tingkat kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan peningkatan produktivitas.

Menurut Suryawati (2005), hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu: (1) Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja; (2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan; (3) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar; (4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumberdaya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburinya kemiskinan.

Ukuran Kemiskinan

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga ti-

dak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2010), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan perkapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari.

Penyebab Kemiskinan

Todaro (1995) menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, 2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara berlainan, 3) perbedaan kekayaan sumberdaya alam dan kualitas sumberdaya manusianya, 4) perbedaan peranan sektor swasta dan negeri, 5) perbedaan struktur industri, 6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi, politik dan kelembagaan dalam negeri.

Menurut Kuncoro (2004), ada tiga penyebab kemiskinan jika dipandang dari segi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang

menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

Menurut pandangan Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai pembangunan yang pesat yaitu dari segi penawaran modal dan permintaan modal. Dari segi penawaran modal, lingkaran setan kemiskinan dapat dinyatakan bahwa Tingkat pendapatan masyarakat rendah yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitasnya akan tetap rendah yang akan mempengaruhi kemiskinan.

Dari segi permintaan modal, di negara-negara miskin rangsangan untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal ini disebabkan oleh pen-

dapatan masyarakat rendah. Sedangkan pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh produktivitasnya rendah ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu dan mengakibatkan pada masa yang akan datang. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal, sehingga kemiskinan tidak berujung pada pangkalnya.

Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sadono Sukirno, 2000). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekono-

mi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Jika dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Maka menurut sebab terjadinya, pengangguran digolongkan kepada tiga jenis diantaranya (Sadono Sukirno, 2000) (1) Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional tidak bisa dielakkan dari perekonomian yang sedang berubah. Untuk beberapa alasan, jenis-jenis barang yang dikonsumsi perusahaan dan rumah tangga bervariasi sepanjang waktu. Ketika permintaan terhadap barang bergeser, begitu pula permintaan terhadap tenaga kerja yang memproduksi barang-barang tersebut; (2) Pengangguran struktural adalah Pengangguran yang terjadi karena ada problema dalam struktur atau komposisi perekonomian. Perubahan struktur yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan baru tersebut; (3) Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang terjadi karena kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat.

Sedangkan menurut Edwards (1974) dalam Lincolin (1997), bentuk-bentuk pengangguran adalah seperti (1) Pengangguran terbuka (*open unemployment*), adalah mereka yang mampu dan seringkali sangat ingin bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan yang cocok untuk

mereka; (2) Setengah pengangguran (*under unemployment*), adalah mereka yang secara nominal bekerja penuh namun produktivitasnya rendah sehingga pengurangan dalam jam kerjanya tidak mempunyai arti atas produksi secara keseluruhan; (3) Tenaga kerja yang lemah (*impaired*), adalah mereka yang mungkin bekerja penuh tetapi intensitasnya lemah karena kurang gizi atau penyakit; (4) Tenaga kerja yang tidak produktif, adalah mereka yang mampu bekerja secara produktif tetapi tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik.

Indikator pengangguran terbuka yang digunakan oleh BPS adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka umumnya didefinisikan sebagai proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di sebuah wilayah atau negara.

Menurut Tambunan (2001), pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan berbagai macam cara yaitu (1) Jika rumah tangga memiliki batasan likuiditas, yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka bencana pengangguran akan secara langsung mempengaruhi *income poverty rate* dengan *consumption poverty rate*; (2) Jika rumah tangga tidak menghadapi batasan likuiditas, yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini, maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan pekerjaan yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran yang ada.

Tingkat pengangguran di negara-negara berkembang termasuk Indonesia biasanya terlihat rendah dan cenderung menutupi potret yang lebih penting dalam pasar kerja seperti tingkat upah yang rendah

dan keberadaan sektor informal yang jumlahnya sangat besar. Rendahnya tingkat pengangguran di Indonesia utamanya disebabkan karena penduduk yang khususnya berasal dari rumah tangga miskin akan melakukan pekerjaan apa saja untuk memperoleh pendapatan guna mempertahankan hidup yang disebabkan tiadanya jaminan atau kompensasi bagi penganggur. Untuk itu penduduk terpaksa bekerja dalam keadaan apapun baik dalam jam kerja yang lebih rendah dari yang diinginkan, kurang dari jam kerja normal, atau bekerja penuh waktu (*full time*). Oleh karena itu, tingkat setengah pengangguran tampaknya merupakan indikator yang lebih baik bagi pasar kerja di bandingkan tingkat pengangguran dan merupakan indikator pemanfaatan tenaga kerja (*labour utilization*) yang lebih realistis di negara berkembang seperti Indonesia.

Mutu Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau sering juga disebut tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Sumber Daya manusia juga merupakan aset dan berfungsi sebagai modal baik non material atau *non financial* di dalam suatu organisasi bisnis yang dapat diwujudkan potensi nyata secara fisik dan nonfisik dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Untuk memahami pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dibedakan pengertiannya secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun memperoleh pekerjaan. Di samping itu SDM secara makro berarti juga penduduk yang berada dalam usia

produktif, meskipun karena berbagai sebab dan masalah masih terdapat yang belum produktif karena belum memasuki lapangan kerja yang terdapat di masyarakatnya. SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain

Sumber Daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Potensi manusia menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. Karakteristik demografi merupakan aspek kuantitatif sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menggambarkan jumlah dan pertumbuhan penduduk, penyebaran penduduk dan komposisi penduduk.

Kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut mutu sumber daya manusia, kemampuan, baik kemampuan fisik maupun non fisik. Kualitas sumberdaya manusia ini menyangkut dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir dan berketerampilan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan-kemampuan non fisik tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan. Upaya inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia. (Notoatmodjo, 2003).

Pengembangan kualitas sumberdaya manusia sendiri adalah upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan, latihan, kesehatan dan gizi.

Pengertian ini memusatkan pada pemerataan dalam meningkatkan kemampuan manusia dan pada pemanfaatan kemampuan tersebut (Sein, 2009).

Menurut Mulyadi (2003), kebijaksanaan dalam peningkatan kualitas hidup antara lain meliputi : 1). Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa yang akan datang; 2). Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan terutama pada penduduk terpencil; 3). Untuk penduduk miskin, peningkatan kualitas dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepas diri dari kemiskinan; 4). Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana, serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk antara lain melalui transmigrasi dan industri di pedesaan.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumberdaya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tingkat pendidikan dan kesehatan dapat mewakili kualitas tenaga kerja karena dengan pendidikan, seseorang akan bertambah keterampilannya, dan dengan kesehatan seseorang akan lebih kuat dan jernih pemikirannya dalam bekerja. Selain dari pada pendidikan, kesehatan juga turut mempengaruhi kualitas Sumber Daya manusia. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, yaitu angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Jika angka harapan hidup meningkat, berarti menandakan kesehatan semakin membaik, dan pertumbuhan

ekonomi juga semakin bagus karena masyarakat memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk menghasilkan pendapatan.

Gambaran mutu sumber daya manusia dapat diperoleh dengan menggunakan alat ukur berupa indikator komposit objektif yang dikenal dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) yang mencerminkan tingkat pendidikan dan kesehatan. Selain itu, mutu sumber daya manusia juga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup, dan pendapatan penduduk yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat.

Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (*“a process of enlarging people’s choices”*). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

Dalam laporan UNDP (1995), dasar pemikiran konsep pembangunan manusia meliputi aspek-aspek seperti (1) Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; (2) Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata; (3) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan/kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal; (4) Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan

dan pemberdayaan. (5) Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Adapun indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi Indeks Pembangunan Manusia menurut UNDP, di antaranya (1) *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*; (2) *Educational Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean years of schooling*); (3) *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB riil perkapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (intelektualitas). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat tercermin dalam angka harapan hidup serta kemampuan daya beli, sedangkan dampak non-fisik dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat (Sukmaraga, 2011).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan *output* nasional. Adanya perubahan *output* dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) secara paling sederhana dapat diartikan sebagai penambahan *output* atau penambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu, misalkan satu tahun (Prasetyo, 2009). Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu.

Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006). Pembangunan ekonomi juga bisa didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2004).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu: proses, *output* perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Boediono, 1999). Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan *output*, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo Adisasmita, 2013).

PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Menurut badan pusat statistik (BPS), ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu a) pendekatan produksi, menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing nilai produksi bruto tiap-tiap sektor atau sub sektor. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi dengan demikian nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi; b) Pendekatan Pengeluaran, bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa. Nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk produk domestik regional. Pengeluaran akhir adalah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga nirlaba/lembaga yg tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor) di dalam suatu daerah/wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun; c) Pendekatan Pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Yang termasuk dalam surplus di sini adalah bunga, sewa tanah dan keuntungan.

Hubungan Antar Variabel

Pengaruh Mutu Sumberdaya Manusia Terhadap Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut seharusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Criswardani Suryawati, 2005).

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah pendu-

duk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (*human capital*) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. (Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007).

Menurut Tambunan (2001), pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi dimana terjadi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Dalam teori pertumbuhan ekonomi dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kenaikan *output* perkapita dan ada dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu *output* total (*Gross Domestic Product*) di satu sisi, dan jumlah penduduk menganggur (tenaga kerja menganggur) dan penduduk miskin di sisi lainnya akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dalam perekonomian. Pertumbuhan dan kemis-

kinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Kuznet, 1995).

Salah satu cara untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin (Todaro, 2010).

Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Arsyad (1997) menyatakan bahwa ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya part-time selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap di sektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah keatas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.

Dian Octaviani (2001) mengatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh, jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin. Artinya, bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka akan meningkatkan kemiskinan.

Pengaruh Mutu Sumberdaya Manusia Terhadap Pengangguran

Pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri dimana manusia memainkan peranan dalam membentuk kemampuan dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan untuk melakukan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dengan teratasinya jumlah pengangguran dan mendapatkan pendapatan yang tinggi akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi.

Efek dari pengangguran akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, semakin menurun kesejahteraan masyarakat karena pengangguran maka akan meningkatkan rendahnya indeks pembangunan manusia di karenakan tidak dapat memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan untuk kebutuhannya. Sebaliknya, efek dari indeks pembangunan manusia yang rendah akan mempengaruhi tingkat

pengangguran dikarenakan pendidikan, kesehatan dan daya kemampuan daya beli masyarakat menurun. Semakin tinggi tingkat indeks pembangunan manusia maka tingkat pengangguran akan menurun, dan semakin rendah tingkat indeks pembangunan manusia maka tingkat pengangguran semakin tinggi.

Pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar untuk membentuk modal manusia dalam pembangunan ekonomi. Melalui investasi pendidikan, akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang di perhatikan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang akan mendorong peningkatan produktivitas kerja seseorang, yang pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dan terhindar dari kemiskinan.

Tingkat pendidikan seseorang memiliki keterkaitan dengan produktivitas yang akan di dapat seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik juga tinggi. Kecenderungan lain menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, maka semakin panjang usia produktif seorang pekerja karena menyandarkan kapasitas intelektualnya dibandingkan dengan kekuatan fisiknya.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dijelaskan dengan hukum Okun (*Okun's law*), Yang menyatakan adanya pengaruh empiris antara pengangguran dengan *output* dalam siklus bisnis. Hasil studi empirisnya menunjukkan bahwa penambahan 1 (satu) point pengangguran akan mengurangi GDP (*Gross Domestik Product*) sebesar 2 persen. Ini berarti terdapat pengaruh yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran dan juga sebaliknya.

nya pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan pengangguran memperlihatkan ketidakmerataan. Hal ini mengakibatkan konsekuensi distribusional.

Pengangguran berhubungan juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan investasi, sedangkan investasi didapat dari akumulasi tabungan, tabungan adalah sisa dari pendapatan yang tidak dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin besarlah harapan untuk pembukaan kapasitas produksi baru yang tentu saja akan menyerap tenaga kerja baru.

Referensi

- Aimon, Hasdi. 2012. *"Produktivitas Investasi Sumberdaya Manusia, Investasi Fisik, Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia"*. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol.1, No.02. Mei.
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Ketiga, Penerbit BP STIEYKPN, Yogyakarta.
- Boediono. 1999. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4, Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta.
- Deny Tisna A., 2008. *Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004*. Kumpulan Skripsi UNDIP: Semarang.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Fatkhul, Mufid Cholili. 2014. *Analisis Pengaruh Pengangguran, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Study Kasus 33 Provinsi Di*

- Indonesia*). Malang. Universitas Brawijaya.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*.
- John, O. Aiyedogbon.. 2012. *Poverty and youth Unemployment in Nigeria, 1987-2011*. International Journal of Business and Social Science
- Kuncoro, Mudrajat. 2001, *Metode Kuantitatif*, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kuznets, Simon. 1995. *“Economic Growth and Income Inequality”*. American Economic Review.
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*. World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank. Diakses dari: <http://papers.ssrn.com>
- Mulyadi, 2003. *“Ekonomi Sumberdaya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyaningsih Yani. 2008. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia dan Pengurangan Kemiskinan*. Jakarta.
- M. Muh. Nasir, Saichudin dan Maulizar. 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kabupaten Purworejo*. Jurnal Eksekutif. Vol. 5 No. 4, Agustus 2008. Lipi. Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Octaviani, Dian 2001, *Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis Indeks Forrester Greer & Horbecke, Media*

- Ekonomi*, Hal. 100-118, Vol. 7, No. 8.
- Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, 2003, ***Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan, Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Hal. 191 - 324***, Vol. 51, No. 3
- Prastyo, Adit Agus. 2010. ***Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kotat Di Jawa Tengah)***. Skripsi Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi UNDIP. Semarang.
- Rahardjo Adisasmita. 2013. ***Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah***, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sasana, Hadi. (2006). ***Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah***. Jurnal. Universitas Diponegoro.
- Satriani S, 2016. ***Analisis Pengaruh PDRB Perkapita, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1999-2013***. Skripsi Tidak Dipublikasikan Universitas Hasanuddin.
- Sein, M.T, 2009. ***"Sumberdaya Manusia Konsep yang Berubah Sepanjang Sejarah"***, Prisma Voll 11, Jakarta.
- Siregar, hermanto S., Dwi W., 2006, ***dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan penduduk miskin di Indonesia : proses pemerataan dan pemiskinan, Direktur Kajian Ekonomi, Institusi Pertanian Bogor***.
- Sitepu, Rasidin K. dan Bonar M. Sinaga, 2004. ***Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia: Pendekatan Model Computable General***

- Equilibrium***. Universitas Udayana. Bali.
- Sukirno, Sadono, 2000. ***Makro Ekonomi Modern***, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukmaraga, Prima. 2011. ***Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per Kapita, Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin***. Universitas Diponegoro.
- Suparno, Suhasenah. 2000. ***Membangun Kompetensi Belajar***. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Teddy, Christianto, 2013. Volume VII, No. 2, Desember 2013 ISSN : 1978 - 3612. ***Determinan dan karakteristik kemiskinan di provinsi Riau, VII(2)***.
- Todaro, Michael P, 1995. ***Ekonomi Untuk Negara Berkembang; Suatu Pengantar Tentang Prinsip- Prinsip, Masalah dan Kebijakan Pembangunan***, Edisi ke 3, Bumi Aksara Jakarta
- United Nations Development Programme. 1993. ***The Economics of Democracy: Financing Human Development in Indonesia***. www.google.com.
- Wiguna, Van Indra. 2013. ***Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010***. Jurnal Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Wongdesmiwati, 2009. ***Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2004: Analisis Ekonometrika***. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Bab X

Determinan Lama Mencari Kerja Di Sektor Informal dalam Kajian Teoritis dan Studi Empiris

*Sri Marsanda
Fatmawati*

Tenaga kerja adalah semua penduduk dalam usia kerja atau usia produktif (*man power*). Dalam istilah UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia produktif menurut International Labor Organization (ILO) adalah mereka yang memiliki usia (15-64) tahun, sedangkan menurut definisi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia adalah mereka yang memiliki usia 15 tahun ke atas.

Teori ekonomi tenaga kerja menjelaskan bagaimana memanfaatkan tenaga kerja sebaik-baiknya untuk menghasilkan barang dan jasa

guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah seluruh penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas yang mempunyai kegiatan terbanyak bekerja dan mencari pekerjaan. Angkatan kerja atau *labor force* ini terdiri dari : (1) Golongan yang bekerja atau *employed persons*; dan (2) Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

Menurut Payaman J. Simanjuntak (1985) tenaga kerja atau *man power* dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force* terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau golongan penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok bukan angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Pada dasarnya tenaga kerja dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu tenaga kerja berusia 15 tahun dan lebih yang selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja dan mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja yaitu tenaga kerja yang berusia 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain atau penerima pendapatan dan tidak melakukan kegiatan yang dapat dikategorikan bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah

angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Payaman J Simanjuntak, 2005:45)

Pasar Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja mencerminkan besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja dalam masyarakat yaitu jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Sedangkan jumlah orang yang bekerja atau *employed persons* tergantung pada besarnya permintaan atau *demand* dalam masyarakat. Demand tersebut dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui supply dan dengan tenaga kerja dinamakan pasar kerja. Seseorang di pasar kerja berarti dia menawarkan jasa untuk produksi, apakah dia sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Besarnya penempatan atau tingkat *employment* dipengaruhi oleh faktor kekuatan *supply* dan *demand*, sedangkan besarnya *supply* dan *demand* dipengaruhi oleh tingkat upah.

Sektor Formal

Sektor formal adalah lapangan usaha yang secara sah terdaftar dan mendapat izin dari pejabat berwenang. Keegiatannya terhim-pun dalam Instansi Pemerintah, bentuk badan usaha seperti BUMN, BUMS, dan Koperasi.

Menurut Sama'una (1998) ada dualism ekonomi antara sektor formal dan informal muncul, yaitu terkait dengan faktor eksternal dan faktor internal. Dimana yang termasuk dalam faktor eksternal adalah pranata-pranata yang mendukung kegiatan ekonomi formal yang modern dibandingkan sektor informal, kesenjangan tingkat upah antara sektor formal dan sektor informal serta terkait dengan masalah teknis politis yang mana kalangan pelaku politik (birokrasi) kurang mencer-

mati dan mengamati pola modernisasi yang begitu cepat perkembangannya. Sedangkan yang berkaitan dengan sektor informal adalah tingkat produktivitas yang sangat tidak seimbang antara sektor formal dan sektor informal.

Kecenderungan yang terjadi di masyarakat adalah kesempatan kerja yang tercipta tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat khususnya pada sektor formal, karena di sektor ini diperlukannya sumber daya manusia yang memenuhi standar tingkat pendidikan yang telah ditentukan oleh badan usaha atau instansi terkait.

Teori Pengangguran

Bagi negara-negara berkembang, masalah penduduk merupakan masalah penting. Perkembangan penduduk yang cepat dapat merupakan penghambat perkembangan ekonomi, karena penduduk berfungsi sebagai tenaga kerja maka paling tidak akan terdapat kesulitan dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Bagi mereka yang tidak memperoleh pekerjaan berarti mereka itu menganggur dan ini merupakan beban bagi masyarakat dan Negara.

Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan (Mulyadi Subri, 2003). Payaman J. Simanjuntak (1985), pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha mencari pekerjaan.

Biro Pusat Statistik mendefinisikan penganggur sebagai mereka yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum bekerja yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang sudah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapat-

kan pekerjaan (Biro Pusat Statistik, 1990). Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu, sebulan pencarian, jadi mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan dan permohonannya telah dikirim lebih satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai pencari kerja. Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu daerah/wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen.

Pengangguran dapat terjadi disebabkan karena adanya ketidakseimbangan di dalam pasar tenaga kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi pada jumlah tenaga kerja yang diminta atau dengan kata lain, penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerjanya. Secara teori, terjadinya pengangguran disebabkan karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja yang ada di pasar kerja.

Menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999), pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal yaitu (1) Proses Mencari Kerja. Pada proses ini menyediakan penjelasan teoritis yang penting bagi pengangguran. Munculnya angkatan kerja baru akan menimbulkan persaingan yang ketat pada proses mencari kerja. Dalam proses ini terdapat hambatan dalam mencari kerja yaitu disebabkan karena adanya para pekerja yang ingin pindah ke pekerjaan lain, tidak sempurnanya informasi yang diterima para pencari kerja mengenai lapangan kerja yang tersedia, serta informasi yang tidak sempurna pada besarnya tingkat upah yang layak mereka terima dan sebagainya; (2) Kekakuan Upah. Besarnya pengangguran yang terjadi dipengaruhi juga oleh upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Penurunan pada proses produksi dalam perekonomian akan mengakibatkan pergeseran atau penurunan pada permintaan tenaga kerja. Akibatnya akan terjadi penurunan besarnya upah yang ditetapkan. Dengan ada-

nya kekakuan upah, dalam jangka pendek, tingkat upah akan mengalami kenaikan pada tingkat upah semula. Sehingga akan menimbulkan kelebihan penawaran (*excess supply*) pada tenaga kerja sebagai indikasi dari adanya tingkat pengangguran akibat kekakuan upah yang terjadi; dan (3) Efisiensi Upah. Besarnya pengangguran juga dipengaruhi oleh efisiensi pada teori pengupahan. Efisiensi yang terjadi pada fungsi tingkat upah tersebut terjadi karena semakin tinggi perusahaan membayar upah maka akan semakin keras usaha para pekerja untuk bekerja. Hal ini justru akan memberikan konsekuensi yang buruk jika perusahaan memilih membayar lebih pada tenaga kerja yang memiliki efisiensi lebih tinggi maka akan terjadi pengangguran akibat dari persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Pengangguran dapat dibedakan menjadi dua yaitu (1) Pengangguran Terbuka Menurut Esmara (1985) Pengangguran terbuka adalah sebagian dari angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan tetapi aktif mencari kerja. Di Indonesia perkiraan tingkat pengangguran terbuka diperoleh dengan cara membagi jumlah pencari kerja dengan angkatan kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2009), pengangguran terbuka terdiri atas: (a) Penduduk yang sedang mencari pekerjaan yaitu adalah penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan seperti mereka yang: belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, penduduk yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan, dan penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain; (b) Penduduk yang sedang mempersiapkan usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun ti-

dak dibayar; (c) Penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan adalah penduduk yang tidak bisa memperoleh pekerjaan dikarenakan cacat, sakit kronis, sedang dipenjara; dan (d) Penduduk yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja; dan (2) Pengangguran tidak kentara (setengah pengangguran) Menurut ILO dalam Siregar (1982) Pengangguran tidak kentara atau setengah menganggur yaitu perbedaan antara jumlah pekerjaan yang betul-betul dikerjakan seseorang dalam pekerjaannya dengan jumlah pekerjaan yang secara normal mampu dan ingin dikerjakannya. Konsep ini dibagi dalam : (a) Setengah pengangguran kentara yaitu seseorang bekerja tidak tetap di luar keinginannya sendiri atau bekerja dalam waktu yang lebih pendek dari waktu yang biasanya; dan (b) Setengah pengangguran tidak kentara yaitu jika seseorang bekerja secara penuh tetapi pekerjaan itu tidak mencukupi.

Menurut sebab terjadinya pengangguran dapat digolongkan dalam dua jenis Simanjuntak, (1985) yaitu (1) Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk sekedar waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, atau terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Pengangguran friksional dapat pula terjadi karena kurangnya mobilitas pencari kerja dimana lowongan pekerjaan justru terdapat bukan di sekitar tempat tinggal si pencari kerja. Pengangguran friksional juga dapat terjadi karena pencari kerja tidak mengetahui dimana adanya lowongan pekerjaan dan demikian juga pengusaha tidak mengetahui dimana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengangguran friksional merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan walaupun secara teoritis jangka waktu pengangguran tersebut dapat dipersingkat melalui penyediaan informasi pasar kerja yang lebih lengkap; dan (2) Pengangguran Siklikal

adalah pengangguran yang terjadi karena sebagai akibat dari ketidakcukupan pada permintaan agregat untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja. Pengangguran siklikal ini diukur karena tidak adanya kecukupan pada lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran ini sangat terkait dengan perubahan pada siklus kegiatan ekonomi.

Masa pengangguran adalah periode dimana seseorang terus menerus menganggur atau lamanya menganggur rata-rata seorang pekerja. Lama pengangguran tersebut tergantung pada:

1. Organisasi pasar tenaga kerja, berkenaan dengan ada atau tidak adanya lembaga penyalur tenaga kerja dan sebagainya;
2. Keadaan demografis dari angkatan kerja, sebagaimana telah dibahas di atas;
3. Kemampuan dari keinginan para penganggur untuk tetap mencari pekerjaan yang lebih baik;
4. Tersedianya dan bentuk perusahaan (Sandy Darmakusuma, 1998).

Teori Mencari Kerja

Setiap angkatan kerja yang menganggur, berusaha mencari kerja di pasar dimana informasi tidak sempurna. Ketidaktepatan informasi di sini artinya para penganggur tersebut tidak mengetahui secara pasti kualifikasi yang dibutuhkan maupun tingkat upah yang ditawarkan pada lowongan-lowongan kerja yang ada di pasar. Hal ini terjadi karena setiap *employed* menilai pencari kerja secara berbeda, sehingga tawaran yang diberikan pada setiap pencari kerja hanyalah tentang distribusi frekuensi seluruh tawaran pekerjaan yang didistribusikan secara acak (*reservation wage*), dan struktur upah menurut keahlian.

Asumsi-asumsi Teori Mencari Kerja (Moeis J.P) : (1) Pengangguran adalah angkatan kerja yang berusaha mencari kerja di pasar kerja dengan informasi tidak sempurna; (2) Setiap pencari kerja ha-

rus membayar sejumlah biaya tertentu yang tetap dalam suatu produk mencari kerja; (3) Sebagai imbalan dari biaya yang dikeluarkan ini, pencari kerja memperoleh tawaran pekerjaan yang diasumsikan jumlahnya satu periode; (4) Jangka waktu pengambilan keputusan tidak terbatas; (5) Pencari kerja adalah individu yang risk-neutral, mereka akan memaksimalkan *expected net incomenya*; (6) Pencari kerja sebelum memulai proses mencari kerja, harus menentukan batasan dalam penentuan diterima atau tidaknya suatu tawaran pekerjaan. Batasan ini bisa berupa jumlah sampel atau tingkat upah minimum (*reservation wage*); (7) Dengan *reservation wage* sebagai kriteria menerima dan menolak suatu pekerjaan, pencari kerja akan mengakhiri proses kerja pada saat $MC=MR$ dari suatu tawaran pekerjaan. Penentuan *reservation wage* dipengaruhi oleh karakteristik pencari kerja, seperti umur dan tingkat pendidikan. Makin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula *reservation wage* yang ditentukan. Selanjutnya makin tinggi *reservation wage* makin tinggi tawaran yang bersedia diterima oleh individu yang bersangkutan. Akibatnya waktu yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan menjadi lebih lama. Dengan kata lain makin tinggi *reservation wage* semakin kecil kemungkinan untuk memperoleh tawaran pekerjaan sehingga masa mencari kerja (*search period*) menjadi makin panjang. Demikian pula sebaliknya.

Hubungan antara Umur dengan Lama Mencari Kerja

Tingkat pengangguran terbuka untuk kaum muda lebih tinggi daripada orang dewasa karena arus lulusan sekolah dan lulusan perguruan tinggi yang terus-menerus menjalani masa transisi dari pendidikan penuh waktu hingga pekerjaan penuh waktu. (Dhanani, 2004: 5). Bagi kaum muda, memasuki pasar kerja untuk pertama kali merupakan tantangan besar karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup

tentang kesempatan-kesempatan yang ada di pasar kerja, sifat dan lokasi pekerjaan, upah dan kondisi pekerjaan, serta keamanan kerja dan prospek karir (Sziraczki & Reerink, 2004: 31). Menurut Bellante & Jackson (1990: 425), Para tenaga kerja remaja mempunyai sedikit atau tidak ada pengalaman kerja sama sekali, sedangkan pengusaha segan mempekerjakan mereka dengan upah yang mereka anggap terlampaui tinggi.

Menurut Tasci & Tansel (2004: 16-17), orang yang berusia 45 dan lebih memiliki probabilitas rendah untuk keluar dari pengangguran dibandingkan dengan mereka yang berada di kelompok usia 15-19 tahun. Menurut Khan & Yousaf (2013: 6), usia individu yang mencari pekerjaan adalah faktor penting yang mempengaruhi durasi pengangguran. Durasi menganggur meningkat seiring peningkatan usia. Sementara menurut Astuti (2013: 16), pekerja muda cenderung lebih sering menganggur dan dengan masa yang singkat, sedangkan pekerja yang lebih tua jarang menganggur tetapi untuk periode yang lebih panjang. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat umur seseorang berhubungan dengan produktivitas; pekerja muda akan lebih dipilih oleh perusahaan sebab produktivitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan.

Umur merupakan faktor penting dalam pencarian kerja. Tingginya pengangguran terbuka pada kaum muda disebabkan kurangnya pengetahuan tentang dunia kerja. Peningkatan umur menurunkan probabilitas keluar dari pengangguran. Selain itu, durasi menganggur/lama mencari kerja meningkat seiring meningkatnya umur.

Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Lama Mencari Kerja

Menurut UU No.20 Tahun 2003, Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pem-

belajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan secara spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan merupakan hal yang wajib pada masa sekarang ini hal ini ditetapkan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) yang berisi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan (bab 3, pasal 5). Sesuai UU No.20 Tahun 2003, Pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan pendapat Daryono Soebagiyo (2005) bahwa pendidikan memang diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dari segi sosial dan ekonomi, dengan pendidikan yang baik akan mengarah ke pekerjaan yang menarik. Apabila tidak mencerminkan kualitas yang baik maka sektor ini juga akan menyumbangkan proses terjadinya pengangguran. Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik menjadikan suatu masalah yang semakin serius, menurut Mauled Moel-yono, (1997) dalam Sutomo et al (1999), bahwa kemungkinan hal ini disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula aspirasinya untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai dengan keinginannya, sehingga proses untuk mencari kerja lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan tenaga kerja terdidik lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja dan lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai.

Hubungan antara Upah yang diinginkan dengan Lama Mencari Kerja

Lamanya mencari kerja lebih panjang di kalangan tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tak terdidik. Pencari kerja tenaga kerja

terdidik selalu berusaha mencari kerja dengan upah, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang lebih baik. Bila satu keluarga mempunyai pendapatan rumah tangga yang lebih baik, biasanya keluarga tersebut mampu membiayai anaknya menganggur selama satu sampai dua tahun lagi dalam proses mencari pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya pencari kerja tenaga kerja terdidik yang biasanya datang dari keluarga miskin, tidak mampu menganggur lebih lama dan terpaksa menerima pekerjaan apa saja yang tersedia (Simanjuntak,1998).

Menurut Kaufman (1999), upah minimum yang diterima adalah upah terendah yang akan diterima oleh oleh pencari kerja. Seseorang akan menganggur dalam waktu tertentu untuk mencari pekerjaan terbaik (dengan asumsi upah yang paling tinggi). Jika pekerja menetapkan W sebagai upah minimum yang diterima, maka seluruh upah yang ditawarkan di bawah upah tersebut akan ditolak. Penetapan upah minimum yang diterima yang lebih tinggi menyebabkan periode mencari kerja sampai memperoleh pekerjaan akan panjang.

Lama mencari kerja tergantung pada tingkat upah minimum yang diterima relatif pada distribusi frekuensi penawaran upah. Jika seseorang telah menetapkan upah minimum rendah, maka tawaran pekerjaan akan diterimanya lebih cepat atau waktu menganggur akan pendek. Upah minimum yang diterima lebih tinggi akan menyebabkan lama mencari kerja lebih panjang.

Hubungan antara *Non Labor Income* dengan Lama Mencari Kerja

Menurut Mcconnell (1995), pada tingkat pendapatan yang diperoleh dengan tidak bekerja (*non labor income*) yang relatif tinggi menganggur akan merasa bahwa kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa sudah tercukupi, sehingga mereka memilih untuk tidak kerja

dan memiliki waktu luang (*leisure time*) yang banyak menikmati pendapatannya yang diperoleh dari tidak bekerja walaupun mereka dari latar belakang pendidikan yang tinggi.

Partisipasi angkatan kerja untuk mencari pekerjaan akan berkurang apabila terdapat pendapatan diluar bekerja (*non labor income*) seperti pensiun, tunjangan untuk penganggur, pendapatan dari suami/istri dan pendapatan dari akumulasi kekayaan.

Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Lama Mencari Kerja

Dalam pasar kerja tingkat partisipasi laki-laki masih dominan dibanding tingkat partisipasi perempuan. Perempuan biasanya terlibat dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah. Beberapa penyebab rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja antara lain: 1) persepsi terkait peran domestik perempuan; 2) berkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penentuan, atau pen-definisian pekerjaan perempuan; 3) sifat musiman, paruh waktu, dan informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan. (Kemenppa, 2016). Menurut Sziraczki & Reerink (2004), ketaatan kuat pada peran *gender* tradisional akan menghalangi perempuan muda dalam menyiapkan karir kerja dan membatasi mereka mencari pekerjaan. Banyak perempuan muda yang dengan kukuh mendukung peran *gender* tradisional, sering juga karena mereka merasa nyaman dan juga karena penilaian dalam menjalankan peran tersebut.

Menurut Pasay & Indrayanti (2012), laki-laki memiliki peluang partisipasi bekerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki menerima pekerjaan secepat mungkin karena dalam aturan sosial laki-laki diharuskan untuk bertanggung jawab terhadap keluarga, maka laki-laki mengalami durasi pengangguran lebih rendah di-

bandingkan dengan perempuan (Khan & Yousaf, 2013). Menurut Tasci & Tansel (2004), wanita memiliki durasi pengangguran lebih lama daripada pria karena pria yang menganggur menemukan pekerjaan lebih cepat daripada wanita yang menganggur.

Masih kuatnya peran *gender* tradisional membuat ketimpangan tingkat partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Peluang laki-laki dalam pasar kerja lebih besar daripada perempuan. Hal itu mempengaruhi durasi pengangguran/lama mencari kerja antar *gender*. Laki-laki akan lebih cepat dalam mencari dan memperoleh pekerjaan dibandingkan perempuan karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah yang utama bagi keluarga.

Hubungan antara Status Kawin dengan Lama Mencari Kerja

Pria dan wanita yang telah menikah cenderung memiliki masa pengangguran yang lebih panjang dibandingkan pria dan wanita yang belum menikah. Wanita yang telah menikah khususnya, memiliki masa pengangguran yang lebih panjang dibandingkan pria yang telah menikah (CUSCBO, 2007: 13). Menurut Kaufman & Hotckiss (2006: 134), perempuan yang telah menikah dituntut untuk melakukan aktivitas rumah, dan pasar kerja yang tersedia hanya bagi mereka yang berstatus tunggal atau single. Bagi mereka yang sudah kawin, rumah tangga menjadi pertimbangan yang penting dalam memutuskan menerima pekerjaan yang tersedia, yakni apakah pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga atau tidak (Pasay & Indrayanti, 2012: 127). Sementara menurut Astuti (2013: 146), status perkawinan merupakan penghambat pencari kerja untuk memilih pekerjaan apabila pekerjaan tersebut diperoleh jauh dari keluarga atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut kecil sehingga mereka menolak untuk menerima pekerjaan tersebut.

Status perkawinan dapat menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi angkatan kerja. Angkatan kerja yang berstatus kawin akan cenderung lebih lama dalam mencari kerja dibandingkan dengan angkatan kerja yang belum kawin. Mereka yang belum kawin tidak mempunyai tanggung jawab atas rumah tangga sehingga mereka dapat menerima pekerjaan apapun.

Hubungan antara Status Pekerjaan Orang Tua dengan Lama Mencari Kerja

Status pekerjaan orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aspirasi kerja dikarenakan setiap anak sudah bisa mengukur kemampuan finansial yang dimiliki orang tua, sehingga lingkungan tersebut ikut andil mempengaruhi kesempatan seseorang memperoleh pekerjaan tertentu. Terdapat kecenderungan bahwa angkatan kerja yang mencari pekerjaan cenderung mengikuti profesi atau status pekerjaan orang tuanya. Misalnya, orang tuanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ia menginginkan keturunannya juga mencapai status PNS. Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini merupakan capaian yang tidak mudah sehingga butuh waktu yang relatif lama untuk mendapatkannya.

Penelitian Terdahulu

Setiawan (2010) Pengaruh Umur, Pendidikan, Pendapatan, Pengalaman Kerja, dan Jenis Kelamin Terhadap Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel umur, pendidikan, pendapatan, dan pengalaman kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap lama mencari kerja. Sedangkan variabel jenis kelamin memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap lama mencari kerja. Dari kelima va-

riabel yang diteliti, variabel pendapatan merupakan variabel paling dominan dalam mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik di Kota Magelang.

Putra (2012) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan keluarga memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap lama mencari kerja, variabel pengalaman kerja, jenis kelamin, dan jenis sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap lama mencari kerja, variabel tingkat pendidikan, umur, dan status dalam rumah tangga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lama mencari kerja. Secara simultan, variabel pengalaman kerja, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, status dalam rumah tangga, dan jenis sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel lama mencari kerja. Variabel-variabel bebas yaitu pendapatan keluarga, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, umur, jenis kelamin, status dalam rumah tangga, dan jenis sekolah secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi-variabel terikat atau lama mencari kerja sebesar 32,33 persen sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam estimasi model.

Kurniawan dan Handayani (2013) Analisis Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik di Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap lama mencari kerja, variabel umur dan gaji memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap lama mencari kerja, dan terdapat perbedaan lama mencari kerja antara status pekerjaan formal dan status pekerjaan non formal. Dari empat variabel yang digunakan pada penelitian ini, Variabel umur merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik di Kabupaten Purworejo. Dari empat variabel pada penelitian ini variabel status pekerjaan secara individu tidak berpengaruh

terhadap lama mencari kerja. Namun dari empat variabel yang digunakan penelitian ini secara bersama memiliki pengaruh terhadap lama mencari kerja.

Cahyani (2014) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *non labor income* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan, Hal ini dikarenakan juga pada faktanya *non labor income* tidak memiliki pengaruh pada tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan, karena pendapatan yang diperoleh dari orang tua atau keluarga yang besar tidak menjamin tamatan pengangguran terdidik memilih menganggur, pada kenyataannya setiap orang memiliki kebutuhan yang banyak setiap orang yang menjalani sekolah sampai sarjana tujuannya adalah bisa memiliki pekerjaan. Secara simultan upah minimum, *non labor income* dan mutu sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik secara signifikan.

Haq (2018) Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Pekerja Wanita Terdidik di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah yang diharapkan dan variabel umur memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap lama mencari kerja. Sedangkan variabel status sekolah/ perguruan dan variabel status kawin tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap lama mencari kerja. Secara simultan, variabel upah yang diharapkan, umur, status/ perguruan, dan status kawin berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel terikat (Y) yaitu lama mencari kerja pekerja wanita di Kota Makassar.

Hartoko (2018) Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, Jenis Kelamin, Umur, Status Perkawinan dan Daerah Tempat Tinggal Terhadap

Lama Mencari Kerja Tenaga Kerja Terdidik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan status perkawinan berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap lama mencari kerja. Variabel pelatihan, jenis kelamin, dan umur berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap lama mencari kerja. Dan variabel daerah tempat tinggal tidak berpengaruh signifikan terhadap lama mencari kerja. Tingkat pendidikan, pelatihan, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan daerah tempat tinggal secara bersama-sama berpengaruh terhadap lama mencari kerja tenaga kerja terdidik di Indonesia.

Referensi

- Abriyani, Puspaningsih. 2004. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap kepuasan Kerja dan Kinerja Manajer Perusahaan Manufaktur. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Jakarta.
- Amron & Taufiq Imran. 2009. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Produktivitas Tenaga kerja Outlet Telekomunikasi Seluler Kota Makassar*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia.
- Andrianto, Rendy. A. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Pada Home Industri Sepatu Kota Surabaya (Studi Kasus Tenaga Kerja Bagian Produksi Ukm Home Industri Sepatu Ud.Perkasa Surabaya)*. Malang : Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Astuti, M. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Menganggur Bagi Pekerja Di Industri Perkebunan Kelapa Sawit Ogan Komering Ulu*. Jurnal Ilmiah STIE MDP. 2(2): 130-149.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Berita Resmi Statistik 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Badan Pusat Statistika Analisis Perkembangan Statistik. ***Ketenagakerjaan Laporan Sosial Indonesia 2007***. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistika
- Bellante, D. & Jackson, M. (1990). ***Ekonomi Ketenagakerjaan. (Terjemahan Wimandjaja K. Liotohe dan M. Yasin)***. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Depdikbud. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
- Depnakertrans. 2004. ***Penanggulangan Pengangguran di Indonesia***. Majalah Nakertrans Edisi-03 TH. XXIV-Juni
- Dwiangga, Tegar. 2009. ***Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pemilik Usaha dan Tenaga Kerja pada Industri Berskala Kecil di Kota Kediri***. Jurnal Ilmiah. FE. UB
- Effendi, T. N. (1993). ***Sumberdaya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan***. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Gujarati, Damodar N. 2012. ***Ekonometrika Dasar***. Zain. Sumarna, Penerjemah. Jakarta : Erlangga
- Hardianto, 2017. ***Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja pada Tenaga Kerja Terdidik di Kota Bukittinggi***.
- Harieswantini, Retno, Hariadi Subakja & Muksin. 2017. ***Analisis Produktivitas Dan Pendapatan Tenaga Kerja PenyadapKaret Di Kabupaten Jember***. Jember: JSEP Vol. 10 Politeknik Negeri Jember
- Hasan, Iqbal. 2002. ***Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya***. Jakarta: Ghalia
- Herawati, N. 2013. ***Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Pengalaman Kerja, Jenis Kelamin Dan Umur Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Industri Shuttlecock Kota Tegal***. Semarang : Jurnal Ekonomi

Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

- J. Knoer, A.M.P Hardinoto, S.R. 2001. *Psikologi Perkembangan Pengantardalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gajahmada University.
- Kaufman, Bruce E dan Hotchkiss Julie L, 1999. *The Economics of Labor Markets*, Fifth Edition, The Dryden Press.
- Kaufman, B. E. & Hotckiss j. L. (2006). *The Economics of Labor Markets*. Thomson : South Western.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2016). *Statistik Gender Tematik: Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi*. Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Khan, T. & Yousaf, F. (2013). *Unemployment Duration Of First Time Job Seekers: A Case Study Of Bahawalpur*. Asian Journal of Economic Modelling. 1(1): 8-19.
- Kreitner, R. and Kinicki, A. 2004. *Organizational Behavior*. Fifth Edition. McGraw Hill. New York.
- Kusnadi. 2001. *Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal: Pelopor dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kurniawan, Gusti. 2010. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Pada PT. Kalimantan Steel (PT. Kalico) Pontianak*. Jurnal Manajemen Universitas Muhammadiyah Pontianak.
- Laila, Nina Evi Nur & Siti Amanah. 2015. *Strategi Nafkah Perempuan Terhadap Pendapatan Keluarga*. Jurnal Ilmiah. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas

Ekologi Manusia IPB: Bogor

- Mada M. & Ashar K. (2015). *Analisis Variabel yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran Terdidik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan. 15(1): 50-76.
- Mulyadi, Subri. 2003. *Ekonomi Sumberdaya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mulyono, Mauled, 1997. *Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pasay, N.H.A. & Indrayanti, R. (2012). *Pengangguran, Lama Mencari Kerja, dan Reservation wage Tenaga Kerja Terdidik*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia. 12(2): 116-135.
- Purnastuti, L., Wahyuni, D., Mustofa. (2015). *Analisis Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Prosiding, Seminar Nasional, tanggal 9 Mei 2015. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Satria A. 2015. *Analisis Tematik ST 2013 Subsektor Analisis Kesejahteraan Rumah Tangga Usaha Perikanan*. Badan Pusat Statistik. Kota Kendari.
- Seni, Wa. 2015. *Peran Ganda Perempuan pada Masyarakat Pesisir di Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*.
- Setiadi. 2009. *Pengaruh Upah dan Jaminan Sosial terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Di PT Semarang Makmur Semarang*. Thesis. Program pasca sarjana program studi kenotariatan. Universitas Diponegoro: Semarang
- Setiawati, Wiwit. 2006. *Analisis Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Produksi Industri Pengasapan Ikan Di Kota Semarang*. Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

- Soedarmo, Gito. 1998. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Produksi*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Simanjuntak, Payaman J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Stephani, Arrie.2008. *Strategi Nafkah Strategi Nafkah Pedagang Perempuan Di Sektor Informal Perkotaan: Intitut Pertanian Bogor*. <http://www.repository.ipb.ac.id> diakses tanggal 1 Oktober 2018
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (MixedMethods)*. Alfabeta. Jakarta.
- Sukari. 2002. *Peran Perempuan dalam Rumah Tangga Nelayan: Kasus di Desa Branta Pesisir, Tlanakan, Pamekasan Pulau Madura*. Jurnal Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang. Malang.
- Sukirno, Sadono. 2003. *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Supratikno, A. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Kecamatan Ungaran Barat & Kecamatan Bancak)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sziraczki, G. & Reerink, A. (2004). *Transisi Dari Sekolah Menuju Dunia Kerja di Indonesia*. Jakarta: ILO.
- Susilowati. 2008. *Analisis Faktor Risiko Ambang Pendengaran Pada Karyawan di Bagian PQ-1 PT. Tanjung Kreasiparquet Industri Temanggung*. Master thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Tansel, A. & Tasci H. M. (2004). *Determinants of Unemployment Duration for Men and Women in Turkey*. IZA Discussion Paper

No. 1258. Diambil pada tanggal 26 Februari 2018 dari <http://ftp.iza.org/dp1258.pdf>.

Tjiptoherijanto, P. 1996. ***Sumberdaya Manusia dalam Pembangunan Nasional***. Jakarta: Gramedia.

Widodo, Suparno.E. 2015. ***Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Widodo, Johannes dan Suadi. 2006. ***Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut***. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Wirosuhardjo. 1996. ***Pengembangan Sumberdaya Manusia***. Jakarta : Rineke Cipta.

Wulandhari, Catur.2013. ***Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Wanita Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang di Kota Malang)***. Malang: Jurnal ilmiah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya

Bab XI

Kajian Teoritis Faktor Penentu Pengangguran: Analisis Sisi Permintaan

*Ayu Latifah Alfisyahrin Yunus
Amanus Khalifah Fil'ardy Yunus*

Fokus utama dari kajian teoritis ini adalah pembahasan tentang ketidakseimbangan pasar tenaga kerja yang dapat mengakibatkan pengangguran, hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, Kurva Phillips dan *trade off* inflasi pengangguran, hubungan upah, investasi pemerintah dan swasta, serta *human capital* terhadap pengangguran.

Kajian Teoritis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Perkembangan studi Ilmu ekonomi makro mempelajari struktur, kinerja dan perilaku ekonomi secara keseluruhan. Pusat perhatian dari penelitian ilmu ekonomi makro adalah pemahaman terhadap

faktor-faktor penentu dari kecenderungan umum dalam perekonomian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, inflasi, dan transaksi internasional. Kinerja perekonomian yang baik tentu saja dapat menciptakan tingkat pengangguran, dan inflasi yang rendah serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dimana terdapat hubungan yang erat antara kebijakan dan kinerja perekonomian (Snowdon dan Vane, 2005).

Pemikiran Keynes (1936) merupakan tonggak ilmu ekonomi makro modern, meskipun sebelum itu Klasik telah membahas mengenai pengangguran, siklus bisnis, inflasi dan pertumbuhan, namun pembahasannya menggunakan pendekatan mikro, dengan menggunakan mekanisme pasar.

Depresi besar menunjukkan bahwa mekanisme pasar dan asumsi kesempurnaan informasi tidak bisa diandalkan. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam depresi besar, mekanisme pasar gagal dalam mengkoordinasikan perekonomian. Sehingga Keynes (1936) mengatakan perlu adanya pihak ketiga (pemerintah) melakukan koordinasi untuk mengatasi kegagalan tersebut.

Kehadiran teori Keynes terutama berkaitan dengan ide kegagalan pasar, dan pengangguran yang terpaksa (*involuntary unemployment*) mempersulit rekonsiliasi antara kubu Keynes dan Klasik (Snowdon dan Vane, 2005). Teori keseimbangan umum menyatakan bahwa akan terjadi keseimbangan di setiap pasar. Menurut pandangan klasik, apabila terjadi surplus tenaga kerja dalam hal ini pengangguran dapat dicegah dengan mekanisme harga di pasar bebas agar permintaan yang tercipta dapat menyerap semua penawaran.

Pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso,2004). Sehingga jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun pada tingkat keseimbangan yang

menyebabkan biaya produksi akan turun dan permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena produsen mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari penurunan upah.

Hal ini berbeda dengan pemikiran Keynes yang menyatakan bahwa masalah ketidakseimbangan pasar yang dapat menciptakan pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes (1936), hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan

bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar seluruh sektor perekonomian dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro et al., 2005).

Greenwald dan Stiglitz (1987) berpendapat bahwa kedua aliran Klasik dan Keynes dapat disatukan dengan dua cara, yaitu teori mikro diaplikasikan dalam teori mikro (pendekatan *New Classical*), selanjutnya teori mikro diaplikasikan dalam teori makro (pendekatan Keynesian Baru).

Kemudian hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dijelaskan oleh Okun (1962) dalam teorinya yang dikenal dengan *Okun's Law*. Dimana, dalam studinya tentang ekonomi AS, secara empiris membuktikan hubungan terbalik antara tingkat pengangguran dan *output* potensial, tergantung pada partisipasi dalam angkatan kerja, jam kerja dan perubahan dalam produktivitas.

Landasan teoritis dari hubungan yang Okun selidiki didasarkan pada fakta bahwa peningkatan tenaga kerja harus menghasilkan le-

bih banyak barang dan jasa. Arthur Okun menemukan bahwa tingkat pengangguran menurun pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tinggi, sedangkan tingkat pengangguran meningkat pada tahun-tahun ketika tingkat pertumbuhan riil tetap rendah atau bahkan negatif (Soylu, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Andrei (2009) menguji validitas hukum Okun menggunakan versi gab di Rumania. Model mereka mendeteksi hubungan negatif dan signifikan secara statistik antara perubahan pengangguran dan koefisien pertumbuhan PDB riil dan kenaikan sebesar satu persen persentase pengangguran ditemukan untuk mengurangi pertumbuhan PDB riil sebesar 0,49 poin persentase dengan penundaan 2 lag.

Kaitan Teoritis Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Hart (1980) berpendapat bahwa pada negara maju upah dapat menjadi alat seleksi untuk memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dimana upah yang tinggi dapat mendorong produktivitas yang tinggi serta dapat menjadi mekanisme insentif bagi pekerja. Namun hal ini dibantah oleh Malcomson (1981) yang berpendapat bahwa pekerja akan menuntut upah berdasarkan tingkat produktivitasnya dan upah yang dibayarkan oleh produsen berdasarkan tingkat produktivitas sebenarnya yang dimana dapat berada di atas ataupun di bawah tingkat upah minimum.

Kemudian Brown (1988) menyatakan bahwa upah yang tinggi akan menyebabkan turunnya jumlah pekerja dan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Upah yang tinggi kemudian dapat mengindikasikan biaya produksi yang tinggi pula. sehingga perusahaan akan mengurangi kapasitas produksinya dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya Wood (1994) berpendapat bahwa tenaga kerja yang berketerampilan rendah di negara maju dapat dirugikan dengan adanya hubungan perdagangan dengan negara berkembang yang dapat mengurangi upah pekerja berketerampilan rendah di Amerika Serikat dan Eropa. Sama halnya dengan pendapat Krugman (1994) yang juga berfokus pada pergeseran permintaan relatif untuk pekerja dengan keterampilan berbeda. Di Amerika Serikat perubahan teknologi telah diserap oleh ketidaksetaraan upah yang lebih besar. Sementara di Eropa, preferensi untuk dispersi upah yang lebih rendah menyebabkan upah sebagian besar tenaga kerja meningkat yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan pengangguran (Bertola dan Ichino, 1995).

Mankiw (2008) menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran adalah upah. Penetapan tingkat upah oleh pemerintah daerah akan berdampak terhadap tinggi rendahnya tingkat pengangguran yang terjadi suatu di daerah. Peningkatan nilai upah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kebijakan upah minimum dapat mengakibatkan penurunan jumlah orang yang bekerja di suatu wilayah (Kaufman dan Hotchkiss, 1999)

Wicaksono (2002) mengatakan bahwa secara teoritis, pada pasar sempurna, pengangguran dapat diartikan dengan *leisure*, karenanya pengangguran yang terjadi bersifat *voluntary*. Sementara penetapan tingkat upah minimum oleh pemerintah dapat menyebabkan pengangguran *involuntary*. Di Indonesia terdapat peraturan penetapan upah minimum, secara keseluruhan pasar tenaga kerja bersifat fleksibel, yang artinya penentuan upah dapat dilakukan secara individual maupun melalui serikat pekerja dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh UMR.

Pengangguran terjadi bukan karena lapangan pekerjaan tidak tersedia, tetapi informasi dari lapangan pekerjaan tersebut yang minim sehingga sulit untuk mencari pekerjaan dengan upah yang sesuai wa-

laupun sebenarnya pemahaman tentang upah yang sesuai adalah relatif dengan kebutuhan yang ada (Oetomo et al., 2006). Kemudian, rendah atau tidak sesuainya tingkat upah yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta tanggungannya merupakan permasalahan yang langsung menyentuh para pekerja (Mansur et al., 2014). Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah maka pekerja dapat menolak mendapatkan upah tersebut yang akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran.

Teori kekakuan upah (*wage rigidity*) dijelaskan oleh Salvatore (2007). Menurut Salvatore teori yang signifikan untuk menjelaskan keadaan perekonomian di suatu daerah khususnya di Indonesia adalah teori kekakuan upah (*wage rigidity*), yaitu gagalnya upah melakukan penyesuaian agar penawaran dan permintaan tenaga kerja sama. Jika kebijakan upah minimum diterapkan di atas tingkat keseimbangannya maka terjadi kekakuan upah, dimana upah tidak akan bergerak menuju ke titik keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja karena adanya batas oleh upah minimum. Sektor usaha akan mengurangi jumlah pekerja sehingga timbul pengangguran (Sarimuda dan Soekarnoto, 2014).

Berbeda dengan teori kekakuan upah, penelitian yang dilakukan oleh Poyoh et al. (2017) yang melihat hubungan upah dan pengangguran di Sulawesi Utara bersifat negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh tingkat kenaikan upah berada di bawah titik keseimbangan pasar yang menyebabkan para penganggur segera mencari pekerjaan. Kemudian *Efficiency Wage Theory* menyatakan bahwa tingkat upah yang tinggi dapat mendorong para pekerja untuk giat bekerja dan meningkatkan produktivitasnya. Sehingga dengan pendapatan yang tinggi maka pekerja akan membeli makanan yang lebih bergizi untuk menambah energinya yang akan menambah tingkat produktivitasnya (Sumarsono, 2009).

Kemudian menurut Mankiw (2008) terdapat dua alasan terjadinya pengangguran, pertama karena dibutuhkan waktu untuk mencocokkan antara para pekerja dengan pekerjaan yang dapat menciptakan pengangguran friksional. Kedua ialah kekakuan upah yang dimana ketika gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaanya yang menciptakan pengangguran struktural. Sehingga dari kedua penyebab tersebut dapat diperoleh dua jenis pengangguran berdasarkan penyebab terbentuknya.

Kaitan Teoritis Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Todaro (2013) menyatakan bahwa sumber daya yang akan digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan konsumsi dimasa yang akan datang disebut investasi. Sehingga investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelian barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian, dimana investasi dapat disebut juga sebagai penanaman modal atau pembentukan modal.

Menurut Ismei (2015), nilai investasi dapat menjadi salah satu faktor penentu laju pada pertumbuhan ekonomi dan selain dapat mendorong kenaikan *output* secara signifikan, investasi juga akan meningkatkan permintaan input yaitu tenaga kerja. Sehingga dengan adanya investasi dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan mempengaruhi penyediaan kesempatan kerja.

Davidson (1998) sebagai tokoh dari pemikiran *Post Keynesian*, berpendapat bahwa *involuntary unemployment* dapat dijelaskan dari ketidakcukupan *effective demand*, ketidakstabilan nilai tukar, dan mobilitas internasional dari keuangan yang menciptakan ketidakpastian da-

pat melemahkan kepercayaan produsen dalam menciptakan investasi yang dapat mengurangi pengangguran.

Peningkatan investasi pada suatu perusahaan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja karena dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan dapat meningkatkan jumlah *output* yang akan dihasilkan, sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Ismei et al, 2015).

Froyen (1993) mendefinisikan pengeluaran pemerintah sebagai total pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional misalnya pembelian persenjataan, pembangunan jalan, bendungan, dan gaji pegawai negeri. Pengeluaran pemerintah merupakan penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, sehingga juga merupakan penentu GDP.

Ada beberapa macam pengeluaran pemerintah yang dapat memberikan kontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang tinggi akan meningkatkan kesempatan kerja, investasi dan profitabilitas yang akan mempengaruhi permintaan agregat. Pengaruh terhadap permintaan agregat inilah yang nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga akan mengurangi tingkat pengangguran dengan terbukanya lapangan kerja yang baru (Diamond, 1989).

Harrod Domar berpendapat bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi (Todaro, 2013). Dengan asumsi "*full employment*", maka semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula. Ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, dimana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja (Putra, 2018). Dengan begitu, perekonomian dapat menyerap seluruh

kelebihan tenaga-tenaga kerja, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja yang dalam hal ini adalah pengangguran.

Landasan Teoritis Kurva Philips serta Hubungan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Philips (1958) yang membahas mengenai ada *trade off* antara inflasi dan pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya permintaan maka untuk memenuhinya, produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan *output*). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.

Selanjutnya, pemikiran Keynesian lain menyatakan bahwa kenaikan tingkat harga yang tidak terduga, atau tingkat inflasi yang lebih tinggi, akan mengurangi upah riil dan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Artinya, tingkat pengangguran akan menurun. Hal ini sejalan dengan kurva Phillips yang menunjukkan adanya *trade-off* antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi (Mouhammed, 2011).

Kemudian Keynes (1936) menjelaskan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dimana keistimewaan teori ini adalah di dalam jangka- pendek (*short-run*) kurva penawaran agregat (AS) adalah positif. Kurva AS positif adalah harga naik dan *output* juga naik. Selanjutnya hubungan yang selanjutnya secara hipotesisnya kepada hubungan jangka panjang (*long-run relationship*) antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan dimana inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun. Keadaan ini membenarkan pembuktian secara

empiris dari beberapa penelitian yang berhubungan dengan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bahwa inflasi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun.

Sementara Mundell (1963) salah satu yang pertama menerangkan mekanisme yang berhubungan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terpisah dari permintaan yang berlebihan (*excess demand*) terhadap komoditi. Mundell menegaskan bahwa inflasi atau ekspektasi inflasi mengurangi harta seseorang atau inflasi atau ekspektasi inflasi mengurangi bunga uang tersebut (pada saat dibelanjakan). Dengan demikian orang beralih menyimpan uang ke dalam bentuk aset yang mengandung bunga (*interest bearing assets*). Banyaknya simpanan menambah banyaknya akumulasi kapital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Kaitan Teoritis Human Capital Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

Human capital menurut Becker adalah manusia bukan hanya sekedar sumber daya namun merupakan modal yang menghasilkan pengembalian dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Kemudian Davenport menyatakan bahwa *human capital* sebagai seluruh usaha yang dibawa tenaga kerja untuk diinvestasikan dalam pekerjaan mereka yang termasuk juga di dalamnya kemampuan, tingkah laku, semangat dan waktu (Atmanti, 2005). Sehingga human capital merupakan nilai dan atau kualitas dari seseorang atau tenaga kerja yang menentukan seberapa potensial orang atau tenaga kerja tersebut bisa berproduksi dalam perekonomian terutama menghasilkan barang dan jasa (Suaidah dan Cahyono, 2013).

Pendidikan termasuk kedalam salah satu investasi pada bidang sumber daya manusia, yang dimana investasi dalam bentuk pendidikan dinamakan dengan *Human Capital* (teori modal manusia). Pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kesempatan kerja yang ada, karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin tinggi pula produktivitasnya. Sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dapat mengurangi jumlah pengangguran (Sari, 2013).

Investasi pendidikan merupakan kegiatan yang dapat dinilai sebagai stok manusia, dimana nilai stok manusia setelah mengikuti pendidikan dengan berbagai jenis dan bentuk pendidikan diharapkan dapat meningkatkan nilai yang dapat berupa peningkatan penghasilan individu, peningkatan produktivitas kerja, dan peningkatan nilai rasional (*social benefit*) individu dibandingkan dengan sebelum mengesap pendidikan (Idris, 2007).

Kemudian studi tentang investasi sumber daya manusia telah dilakukan oleh Schultz (1961) berpendapat bahwa investasi sumberdaya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia menjadi lebih produktif dan merupakan salah satu cara untuk keluar dari perbudakan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia ini akan menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan sehingga akan tercipta peningkatan kesempatan kerja yang akan dapat mengurangi pengangguran. Kemudian salah satu kegiatan yang dapat memperbaiki sumber daya manusia adalah pendidikan formal.

Ranis (2004) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan dampak dari pengembangan modal manusia. Sedangkan perbaikan dari modal manusia itu sendiri tidak terlepas dari perbaikan kerja ekonomi. Dengan kata lain, antara kinerja ekonomi dan dampaknya terhadap pembangunan manusia maupun sebaliknya mempunyai kaitan yang cukup kuat.

Pembangunan manusia yang berhasil akan memberikan manfaat yang positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersediannya tenaga kerja yang berkualitas, sehingga terdapat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia melalui pendidikan (Ramirez et al., 1998).

Beberapa Hasil Penelitian dan Studi Empiris Sebelumnya

Terdapat beberapa hasil penelitian dan studi empiris yang pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengangguran. Putra (2018) dalam penelitiannya yaitu pengaruh inflasi dan investasi terhadap pengangguran di provinsi Jawa Timur tahun 1992-2011. Variabel yang digunakan adalah Inflasi Investasi Pengangguran Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh secara positif signifikan terhadap pengangguran. Berarti semakin tingginya inflasi, pengangguran meningkat. Investasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran. Berarti semakin tinggi investasi, pengangguran akan menurun serta Inflasi dan Investasi secara simultan berpengaruh terhadap pengangguran. Berarti semakin tinggi laju Inflasi, investasi akan meningkat dan pengangguran akan menurun.

Soylu et al. (2018) dalam penelitiannya mengenai isu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dengan menggunakan analisis panel data di Negara Eropa Timur. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dengan metode *Panel Unit Root*, *Pooled Panel OLS* dan *Panel Johansen Cointegration tests*. Hasil yang diperoleh yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengangguran stasioner pada tingkat pertama, pengangguran dipengaruhi secara negatif oleh pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain kenaikan 1% dalam GDP

akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0.08% karena koefisien Okun untuk Negara-negara Eropa Timur dan ada kointegrasi antara variabel makroekonomi yang penting ini.

Mardiana et al. (2017) dalam penelitiannya mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. Variabel yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang infrastruktur, dan pengangguran terbuka tingkat kemiskinan dengan metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi tingkat pengangguran, Pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan. Pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh langsung dan signifikan. Pengeluaran anggaran bidang infrastruktur berpengaruh langsung dan tidak signifikan. Dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, Pengeluaran anggaran bidang pendidikan berpengaruh langsung dan tidak signifikan. Pengeluaran anggaran bidang kesehatan berpengaruh langsung dan signifikan. Pengeluaran anggaran bidang infrastruktur berpengaruh langsung dan tidak signifikan. Pengangguran Terbuka berpengaruh langsung dan tidak signifikan.

Wijayanti dan Karmini (2014) dalam penelitiannya pengaruh tingkat inflasi, laju pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi Bali. Metode analisis yang dipakai adalah dengan metode asosiatif dan teknik analisis regresi data dengan metode *Ordinary Least Square*. Kemudian hasil yang diperoleh ialah tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali, sedangkan hasil uji parsial diperoleh bahwa tingkat inflasi dan upah minimum memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan dengan tingkat pengangguran terbuka di

Provinsi Bali, sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Bali.

Suaidah dan Cahyono (2013) dalam penelitiannya mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di kabupaten Jombang dan menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.561188 menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh 56,11% terhadap tingkat pengangguran, sedangkan sisanya 43,89% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Alghofari (2011) dalam penelitiannya mengenai analisis tingkat pengangguran di Indonesia tahun 1980-2007 menggunakan variabel Jumlah Penduduk, Upah, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Pengangguran dengan metode Descriptive Statistical approach. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah penduduk, upah, dan pertumbuhan ekonomi berhubungan positif dan kecenderungan yang kuat terhadap pengangguran. Sedangkan Inflasi memiliki hubungan positif dan lemah terhadap pengangguran.

Referensi

- Alghofari, Farid. 2010. *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1980-2007*. Diponegoro University Institutional Repository.
- Andrei, Dumitrescu Bogdan; Dedu Vasile; Enciu Adrian. 2009. *The Correlation between Unemployment and Real GDP Growth. A Study Case on Romania*. Annals of Faculty of Economics, University of Oradea, Faculty of Economics, Vol. 2 No. 1: 317-322.

- Anwar, Aminuddin. 2017. *Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Jawa*. Jurnal *Economia*, Vol. 13 No. 1:79-94.
- Ardiansyah, Herman. 2017. *Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), Vol 5 No. 3.
- Atmanti, Dwi Hastarini. 2005. *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. Jurnal *Dinamika Pembangunan (JDP)* Vol. 2 No. 1: 30-39.
- Bertola, Giuseppe; Andrea Ichino. 1995. *Wage Inequality and Unemployment: United States vs. Europe*. NBER *Macroeconomics Annual* Vol. 10: 13-54.
- Brown, C. 1988. *Minimum Wage Laws: Are They Overrated?* *Journal of Economic Perspective* 2: 133-146.
- Davidson, P. 1998. *Post Keynesian Employment Analysis and the Macroeconomics of OECD Unemployment*. *The Economic Journal*, Vol. 108 No. 448: 817-831.
- Dermawanti, Abdul Hoyyi; Agus Rusgiyono. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Kabupaten Batang Tahun 2013 dengan Analisis Jalur*. Jurnal *Gaussian*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2015, Hal. 247–256.
- Diamond, J., (1989), "*Government Expenditure and Economic Growth: An Empirical*", IMF Working Paper, No. 89/45, Washington, DC.
- Froyen, R. T., (1993), "*Macroeconomics: Theories and Policies*", University of North Carolina at Chapel Hill.
- Gilarso, T. (2004) *Pengantar ilmu ekonomi Mako*. Yogyakarta: Kansius.
- Greenwald, Bruce C.; Joseph E. Stiglitz 1987. *Imperfect information*,

- credit markets and unemployment.*** European Economic Review, Elsevier, vol. 31 No. (1-2): 444-456.
- Gujarati, D., (1984), ***Basic Econometric.*** International Student Edition, Singapore: McGraw-Hill International Book Company.
- Hardini, Mimi; Yoyok Soesatyo (2017). ***Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sidoarjo.*** Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Vol 5, No 1.
- Hart, O. D. 1980. ***A model of imperfect competition with Keynesian features.*** University of Cambridge Economic Theory Discussion Paper, No. 29.
- Idris; Ramel Yanuarta. 2007. ***Bahan Ajar: Ekonomi Sumber Daya Manusia.*** FE UNP.
- Ismei, Afriliyanti; Andri Wijanarko; Henny Oktavianti, (2015). ***Analisis Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lamongan Tahun 2009-2013.*** Media Trend Vol. 10 No. 1: 95-113.
- Kaufman, Bruce E and Julie L Hotchkiss. 1999. ***The Economic Labor Markets.*** USA: Georgia State University.
- Keynes, John M. (1936). ***The General Theory of Employment. Interest and Money.*** London: Macmillan.
- Krugman, P. (1994). ***Europe jobless, America penniless.*** Foreign Policy (Fall).
- Lipsey, G. Richard, dkk. 1997. ***Pengantar Makro Ekonomi.*** Jilid Dua. Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Malcomson, James M. 1981. ***Unemployment and The Efficiency Wage Hypothesis.*** The Economic Journal, Vol. 91 No. 364: 848-866.
- Mankiw, N. Gregory. 2008. ***Teori Makro Ekonomi.*** Jakarta: Erlangga.

- Mansur, Nirmala; Daisy Engka; Steeva Tumangkeng. 2014. ***Analisis Upah Terhadap Pengangguran di Kota Manado Tahun 2003-2012***. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.14 No. 2: 14-28.
- Mardiana, Theresia Militina, dan Anis Rachma Utary. 2017. ***Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Serta Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Serta Tingkat Kemiskinan***. INOVASI, Vol. 13 No. 1: 50-60.
- Mouhammed, Adil H. 2011. ***Important Theories of Unemployment and Public Policies***. Journal of Applied Business and Economics, Vol. 12 No. 5: 100-110.
- Mundell, Robert. 1963. ***Inflation and Real Inflation***. Journal of Political Economy.
- Oetomo, Leonardo Silalahi; Engelbertha E. 2006. ***Analisis Pengaruh Upah Terhadap pengangguran di DKI jakarta Tahun 1991-2008***. Tesis Fakultas Ekonomi Unik Atma Jaya.
- Okun, Arthur M. 1963. ***Potential GNP: Its Measurement and Significance*** (pp. 98-103). Yale University, Cowles Foundation for Research in Economics.
- Osuala, A.E.; Osuala, K.I.; Onyeike, S.C. 2013. ***Impact of Inflation on Economic Growth in Nigeria - A Causality Test***” Jorind, Vol. 11 No. 1:206-216.
- Philips, A. W. 1958. ***The Relationship between Unemployment and Rate of Change of Money Wages in the United Kingdom 1861-1957***. *Economica* Vol. 25: 283-299.
- Poyoh, Arfan; Gene H. M. Kapantow; Juliana R. Mandei. 2017. ***Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Provinsi Sulawesi Utara***. Agri-Sosio Ekonomi Unsrat, Vol. 13 No. 1A: 55 – 66.

- Putra, Wahyu Aditama. 2018. ***Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 1992-2011***. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan (JIET), Vol. 3 No. 1.
- Ramirez, A; Gustav Ranis; Frances Stewart. 1998. ***Economic Growth and Human Capital***. World Development, Vol. 28 No. 2: 197-219.
- Ranis, Gustav. 2004. ***Human Development and Economic Growth. Economic Growth Center***. Yale University. Center Discussion Paper No.887.
- Rosmeli. 2015. ***Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia***. Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 10 No. 2: 362-369.
- Salvatore, Dominick. 2007. ***Teori Mikroekonomi***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sari, Anggun Kembar. 2013. ***Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Sumatera Barat***. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 1 No 2.
- Sarimuda, Tengko; Soekarnoto. 2014. ***Pengaruh PDRB, UMK, Inflasi, dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kab/ Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 – 2011***. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 2: 106-119.
- Schultz, Theodore W. 1961. ***Investment in Human Capital***. American Economic Review, Vo. 36 No. 3.
- Snowdown, Brian dan Howard R. Vane. 2005. ***Modern Macroeconomics: Its Origins, Development, and Current States***. UK: Edward Elgar.
- Soesastro, Hadi, dkk. 2005. ***Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir: Proses Pemulihan***

- Ekonomi**. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Soylu, Özgür Bayram. 2018. *Economic Growth and Unemployment Issue: Panel Data Analysis in Eastern European Countries*. Journal of International Studies, Vol. 11 No. 1: 93-107.
- Suaidah, Imarotus; Hendry Cahyono. 2013. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Jombang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE), Vol. 1 No. 3.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Sumarsono, S. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaihu, Akhmad. 2012. *Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10 No. 1.
- Todaro, Michael P.; Stephen C. Smith. 2013. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 Ed. 11*. Jakarta: Erlangga.
- Wicaksono, Teguh Yudo. 2002. *Tingkat Upah, Inflasi dan Pengangguran: Aplikasi Model Lucas-Rapping terhadap Pasar Tenaga kerja Indonesia Tahun 1960-2001*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol 3 No 1: 15-30.
- Wijayanti, Ni Nyoman Setya Ari; Ni Luh Karmini. 2014. *Pengaruh Tingkat Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali*. E-Jurnal EP Unud, Vol. 3 No. 10: 460-466.
- Wood, A. 1994. *North-South Trade, Employment, and Inequality: Changing Fortunes in a Skill-Driven World*. Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press.

Yanti, Nur Fitri, dkk. 2017. *Analisis Pengaruh Inflasi, Investasi dan PDRB Terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sulawesi Periode 2010-2014*. Jurnal Katalogis, Vol. 5 No. 4: 138-149

Bab XII

Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja: Kajian Teoretis dan Studi Empiris

*Wafiqah Ulya
Hamrullah*

Penyerapan Tenaga Kerja

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok peralatan gedung, tenaga kerja, mesin dan modal yang secara garis besar dapat dikategorikan menjadi input manusia dan non manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Selain itu, secara yuridis tenaga kerja dilihat sebagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemampuan ini menyatu dengan orangnya serta tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Sekaligus ini merupakan hak dan salah satu sumber penghidupan serta harga dirinya yang paling utama dan mutlak. Karenanya tenaga kerja ini diidentikkan dengan manusia. Oleh karenanya dalam perundang-undangan tenaga kerja menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mulyadi (2003) juga memberikan definisi tenaga kerja sebagai penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun.

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi secara berkala dari waktu ke waktu dapat mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang meningkat mengakibatkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan demikian hal ini akan menyebabkan kemampuan produksi suatu daerah menjadi meningkat. Namun disisi lain, besarnya jumlah angka penduduk yang ada di suatu wilayah juga akan menyebabkan pembangunan ekonomi menjadi terhambat apabila kenaikan yang terjadi tidak seimbang antara kenaikan jumlah penduduk dengan kenaikan kesempatan kerja yang tersedia, maka hal tersebut akan memicu semakin meningkatnya jumlah pengangguran.

Permintaan tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerja dalam suatu perkembangan ekonomi dapat dilihat dari kesempatan kerja (orang yang telah bekerja dari setiap sektor atau kebutuhan tenaga kerja merupakan jumlah kesempatan kerja yang tersedia di dalam sistem ekonomi yang dinyatakan dalam jumlah satuan orang yang bekerja pada masing-masing sektor untuk melakukan kegiatan produksi. Dalam arti yang lebih luas, kebutuhan ini tidak saja menyangkut jumlahnya, tetapi juga kualitasnya (pendidikan dan keahlian). Karena mereka yang bekerja tidak seluruhnya memiliki jam kerja normal (*full employment*), maka kebutuhan tenaga kerja dalam analisa-analisa tertentu juga dinyatakan dalam satuan ekivalen pekerja penuh (*full-time worker equipment*). Normatif yang digunakan untuk satu ekivalen pekerja penuh adalah 35 jam kerja per minggu, ada yang menggunakan 40 jam kerja per minggu, karena tiap-tiap sektor biasanya memiliki jumlah jam kerja yang berbeda, dan akan lebih baik lagi bila digunakan normatif yang juga berbeda antar sektor (Simanjuntak, 1998).

Permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) artinya jika permintaan terhadap suatu barang meningkat maka pengusaha akan menambah tenaga kerja untuk produksinya. Tenaga kerja yang diminta karena adanya perubahan ekonomi sehingga permintaan pun terus berubah. Pemakaian tenaga kerja juga tergantung pada perusahaan atau industri yang bersangkutan, jika perusahaan cenderung padat karya maka pemakaian atau penggunaan tenaga kerja meningkat namun jika perusahaan cenderung padat modal penggunaan tenaga kerja relatif kecil karena adanya pemakaian mesin sebagai salah satu faktor produksi. Biasanya perusahaan atau industri yang menghendaki keuntungan yang maksimal dapat memilih jumlah terbaik untuk tenaga kerja akan memunculkan kesempatan kerja yang tinggi dan ini berarti tidak akan lagi terjadi penduduk yang tidak bekerja (Sumarsono, 2009).

Dipasar tenaga kerja apabila terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja atau jumlah pengangguran meningkat dan jumlah pencari kerja bertambah, maka tingkat upah akan turun. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau penawaran tenaga kerja menurun maka tingkat upah akan meningkat (Lipsey,2000).

Dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan (Mankiw, 2003).

Todaro (2000), berpendapat bahwa jumlah dari pertumbuhan penduduk dan jumlah dari pertumbuhan angkatan kerja merupakan beberapa faktor positif yang dapat mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Artana Yasa dan Arka (2015), berpendapat bahwa tenaga kerja yang berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menguasai teknologi dapat menumbuhkan iklim yang positif dan baik bagi pertumbuhan ekonomi. Besarnya jumlah dari tenaga kerja yang tersedia akan mampu meningkatkan tenaga kerja produktif yang tersedia, sedangkan dengan semakin besarnya pertumbuhan ekonomi maka mampu memperbesar ukuran daripada pasar domestiknya. Ini akan terjadi apabila tenaga kerja produktif tersebut mampu diserap secara optimal dalam lapangan kerja yang tersedia, namun hal ini akan menjadi sebuah masalah seandainya nanti pertumbuhan dari tenaga kerja jauh lebih besar melebihi kesempatan kerja yang tersedia, hal ini akan mendorong semakin meningkatnya pengangguran BPS (2010).

Pengangguran dapat dikatakan sebagai suatu keadaan di mana individu atau seseorang yang digolongkan sebagai angkatan kerja yang ingin memperoleh pekerjaan tetapi belum mendapatkannya (Sukirno,

2001). Akibat yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah pengangguran adalah terhambatnya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsi, tabungan dan juga investasi.

Dengan demikian salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Menurut Samuelson (1996) bahwa suatu fungsi produksi suatu barang atau jasa tertentu (q) adalah $q = f(K, L)$ dimana K merupakan modal dan L adalah tenaga kerja yang memperlihatkan jumlah maksimal suatu barang/jasa yang dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi alternatif antara K dan L maka apabila salah satu masukan ditambah satu unit tambahan dan masukan lainnya dianggap tetap akan menyebabkan tambahan keluaran yang dapat diproduksi. Tambahan keluaran yang diproduksi inilah yang disebut dengan produk fisik marginal (*Marginal Physical Product*). Selanjutnya dikatakan bahwa apabila jumlah tenaga kerja ditambah terus menerus sedang faktor produksi lain dipertahankan konstan, maka pada awalnya akan menunjukkan peningkatan produktivitas namun pada suatu tingkat tertentu akan memperlihatkan penurunan produktivitasnya serta setelah mencapai tingkat keluaran maksimal setiap penambahan tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran.

Menurut (Haryani, 2002) Faktor-faktor produksi baik sumber daya manusia maupun yang non-sumber daya manusia seperti modal tidak dapat dipisahkan dalam menghasilkan barang atau jasa. Pada suatu industri, dengan asumsi faktor-faktor produksi yang lain konstan, maka semakin besar modal yang ditanamkan akan semakin besar permintaan tenaga kerja. Fungsi produksi memperlihatkan hubungan yang terjadi antara berbagai input faktor produksi dan *output* perusahaan. Dengan teknologi tertentu, semakin banyak input pekerja dan modal yang digunakan, semakin besar *output* yang dihasilkan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan *output* yang semakin lama semakin besar dan untuk mengetahuinya harus membandingkan dengan tingkat pendapatan nasional dari tahun ke tahun.

Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011). Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan nasional riil atau produk domestik bruto dalam jangka panjang yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlulah dihitung pendapatan nasional riil, yaitu Produk Nasional Bruto riil atau Produk Domestik Bruto riil. Dalam perhitungan pendapatan nasional di beberapa negara telah dilakukan perhitungan pendapatan nasional dan komponen-komponennya menurut harga konstan, yaitu pada harga-harga barang yang berlaku di tahun dasar yang dipilih.

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2003) pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi, maksudnya untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, yang dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (BPS, 2003).

Dalam Mankiw (2012), PDB mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah belanja untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. Alasan PDB dapat mengukur pendapatan total dan pengeluaran secara bersama adalah kedua hal ini pada dasarnya sama saja. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan total harus sama dengan pengeluaran total. Untuk memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya langka, para ekonom sering tertarik untuk mempelajari komposisi PDB dari berbagai jenis pembelanjaan. Untuk melakukannya, PDB (yang dilambangkan dengan Y) dibagi menjadi empat komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G) dan ekspor neto (NX): $Y = C + I + G + NX$.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertumbuhannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat akan menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Pada keadaan ini pendapatan pekerja hanya mencapai tingkat cukup hidup (*subsistence*). Menurut para ahli-ahli ekonomi klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Dalam uraian mengenai teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk produk marginal adalah lebih tinggi daripada tingkat pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya (Sukirno, 2011).

Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber barang mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan

mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi akan memerlukan investasi baru.

Segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*stationary state*”. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Teori Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap (Arsyad, 1999).

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya

untuk menggantikan barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan *output total* (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) *output total* sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan *output total* sesuai dengan rasio modal-*output* tersebut.

Teori Pertumbuhan David Ricardo

Garis besar pertumbuhan ekonomi David Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith yaitu bahwa proses pertumbuhan masih pada perpaduan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan *output*. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Teori Ricardo ini diungkapkan pertama kali dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1917). Salah satu ciri perekonomian Ricardo yaitu bahwa akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk melakukan investasi.

Menurut David Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja yaitu bisa memperlambat bekerjanya the law of diminishing returns yang akhirnya akan memperlambat penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo. Proses ini adalah proses tarik-menarik antara dua kekuatan dinamis yaitu *the law of diminishing returns* dan

kemajuan teknologi yang akhirnya dimenangkan oleh the law of diminishing returns (Arsyad,1992).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Robert Solow

Teori Pertumbuhan menurut Robert Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat *output* dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Model pertumbuhan ekonomi Solow dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, dan bagaimana pengaruhnya terhadap *output* barang/jasa di suatu negara secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, tingkat tabungan dalam perekonomian merupakan ukuran persediaan modal pada tingkat produksinya. Semakin tinggi tingkat tabungan semakin tinggi juga persediaan modal dan tingkat keluarannya. Dalam kondisi mapan, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita ditentukan oleh tingkat kemajuan teknologi secara eksogen. Kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan dengan mantap. Hal ini disebut sebagai *balance growth* (Solow, 1957)

Investasi

Investasi biasanya disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal yang merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Menurut Sukirno (2000), investasi didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-

-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa yang akan datang. Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti penambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan *output* tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Menurut Dornbusch dan Fischer (dalam Muhammad, 2014), investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya berimplikasi terhadap kesempatan kerja yang terjadi di suatu wilayah. Ketika investasi masuk ke suatu daerah maka akan meningkatkan permodalan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan usaha baru sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Menurut Todaro (2000) persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertama, akumulasi modal. Dalam hal ini termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. kedua, perkembangan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja dan keahliannya. Ketiga, kemajuan teknologi. Akumulasi modal akan berhasil apabila beberapa bagian atau proporsi pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) dan pendapatan di kemudian hari. Untuk membangun itu seyogyanya mengalihkan sumber-sumber dari arus konsumsi dan kemudian mengirimkannya untuk investasi dalam bentuk "*capital formation*". Investasi di bidang pengembangan sumber-daya manusia akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia,

sehingga menjadi tenaga ahli yang terampil yang dapat memperlancar kegiatan produktif.

Deliarnov (2005) penggolongan investasi berdasarkan sumbernya menjadi dua yaitu: investasi yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) dimana sumber ini berasal dari tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah, dan tabungan paksa serta investasi yang bersumber dari luar negeri (PMA) dimana sumber ini dapat berupa bantuan luar negeri dan penanaman modal asing.

Investasi yang mampu mendorong pertumbuhan tidak hanya berasal dari tabungan domestik. Investasi dari luar negeri juga dapat mempengaruhi GDP dan GNP dengan cara yang berbeda. Investasi asing merupakan salah satu cara yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah negara untuk tumbuh dan sekaligus mempelajari teknologi terkini yang telah dikembangkan dan digunakan di negara-negara kaya (Mankiw, 2003).

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi 2 yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

1. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Investasi Asing merupakan investasi yang dilaksanakan oleh pemilik-pemilik modal asing di dalam negeri kita untuk mendapatkan suatu keuntungan dari usaha yang dilaksanakan itu. Investasi asing ini dapat berupa investasi langsung (*foreign direct investment*) atau investasi portofolio yaitu melalui pembelian saham perusahaan di dalam negeri (Indonesia). Keuntungan dari adanya investasi asing bagi kita ialah akan

berupa diolahnya sumber daya alam kita, meningkatnya lapangan kerja dan terjadinya nilai tambah (added value), meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi.

Bagi pemilik modal asing, keuntungan mereka berupa aliran dividen dari hasil usaha itu dari negeri di mana modal itu ditanamkan ke negara dari mana modal itu berasal.

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, baik asing maupun dalam negeri akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi (Hadi, 2003).

Tinjauan Teoretis

Bagian ini akan menjelaskan tentang teori dan hubungan antara variabel independen (investasi sektor primer, investasi sektor sekunder dan investasi tersier) terhadap variabel dependen (pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan).

Hubungan Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Peran investasi sangat penting bagi perekonomian terutama bagi negara yang sedang berkembang. Dengan adanya tambahan investasi akan memunculkan kegiatan produksi. Semakin tingginya kegiatan produksi maka akan membutuhkan tambahan pekerja, semakin banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan artinya semakin tinggi pula penyerapan tenaga kerja.

Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan nasional dan peningkatan kesempatan kerja. Menurut Suparmoko (1994), investasi sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan. Besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya permintaan tenaga kerja. Secara teoritis, semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja.

Menurut Jhingan (2012), kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan, dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang kemudian menyebabkan kenaikan pada pendapatan dan pekerjaan. Tingkat investasi berkorelasi positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, tingkat investasi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas produksi, yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru, sehingga tingkat pengangguran bisa direduksi, pendapatan masyarakat meningkat, dan akhirnya akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Apabila dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja, investasi memiliki pengaruh yang tidak sedikit. Hal ini disampaikan oleh Tambunan (2001) menyatakan bahwa Investasi sangat erat kaitannya dengan

penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya investasi akan mendorong munculnya proses produksi (*output*), dimana *output* tersebut dihasilkan oleh beberapa tenaga kerja. Dengan demikian terciptalah kesempatan kerja baru yang akan menyerap tenaga kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan menambah tabungan yang dimiliki masyarakat, yang kemudian akan mendorong peningkatan investasi disebabkan oleh bunga bank yang cukup rendah sehingga banyak investor menginvestasikan modalnya ke sektor ekonomi.

Ketika investasi naik maka kesempatan kerja juga akan meningkat dan peluang kesempatan kerja akan terbuka lebar karena semakin banyak investor yang menanamkan investasi maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia dan mampu menambah penggunaan tenaga kerja secara lebih besar (Dimas, 2009).

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000). Adanya investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja yang pada gilirannya akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009).

Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama akan memberikan dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaannya, baik dengan menambah materialnya, tenaga kerjanya

dan faktor-faktor produksi lainnya. Dengan adanya investasi yang menunjukkan peningkatan maka penyerapan tenaga kerja juga akan

ikut meningkat, sehingga berdampak pada pengurangan pengangguran. Investasi harus terus bertambah karena investasi merupakan tambahan modal untuk menjalankan suatu perekonomian.

Hubungan Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Teori Harrod-Domar mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara kegiatan investasi terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam teori ini, kegiatan investasi dianggap sebagai salah satu faktor penting dan memiliki dua peran sekaligus untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Pertama, investasi memiliki hubungan positif dengan pendapatan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Kedua, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Dari kedua hal di atas, artinya investasi dapat mempengaruhi permintaan dan juga mempengaruhi penawaran. Dalam jangka waktu yang panjang, investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif tetapi juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi.

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (BKPM, dalam Adithya: 2007). Investasi dalam negeri juga merupakan komponen penting dalam pendapatan nasional selain konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Investasi pada hakikatnya yaitu langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, maka pemerintah berupaya

menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003).

Investasi menurut Samuelson, P.A & Nordhaus, W.D (2001) mempunyai dua fungsi dalam perekonomian secara makro, yakni sebagai komponen pembelajaran dalam jumlah besar sebagai akumulasi modal untuk meningkatkan persediaan peralatan, *output* potensial dan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Banyak para ekonom mengatakan investasi sebagai kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2012). Adanya investasi akan membawa dampak positif bagi negara ataupun daerah. Hal ini dikarenakan investasi akan menciptakan pertumbuhan *output* nasional, pendapatan dan penyerapan tenaga kerja yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Menurut (Tang et al, 2008), investasi asing dapat menggantikan peran investasi domestik dalam waktu jangka panjang. Berbeda dengan pendapat (Tawiri , 2010) yang mengatakan, Penanaman Modal Dalam Negeri juga termasuk salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebutuhan investasi sangat penting guna melaksanakan pembangunan ekonomi dan mengatasi segala kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal (Kurniawan, 2005).

Investasi berarti menempatkan sejumlah modal tertentu untuk tujuan produksi dan pengeluaran yang digunakan untuk mempertahankan barang-barang modal. Kaum klasik berpendapat bahwa investasi merupakan suatu pengeluaran yang akan menambah kapasitas produksi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi (Dornbusch dan Fisher, 1984)

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meninggikan tingkat spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Sebagai akibat dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi bertambah tinggi. Perkembangan spesialisasi dan pembagian pekerjaan diantara tenaga kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan meninggikan tingkat produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi.

David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan melimpahnya jumlah tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja ini mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami stagnan (*stationary state*). Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political and Taxation* (1817).

Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dibahas oleh seorang ekonom bernama Arthur Okun dan hal ini dikenal dengan Hukum Okun. Menurut Arthur Okun : “tingkat pengangguran yang minimal (4 persen per tahun) akan tercapai bila seluruh kapasitas produksi terpakai (kesempatan kerja penuh atau full employment). Konsekuensi pemikiran Okun adalah pentingnya menjaga perekonomian agar berada dalam keadaan kesempatan kerja penuh. Seandainya ada

hubungan fungsional antara tingkat *output* (Q) dan kesempatan kerja (N), dimana hubungan fungsionalnya dilambangkan dengan c, maka :

$$N = q(Q) = \\ \partial N / \partial Q = c$$

Dari persamaan 2.1 di atas dapat diketahui bahwa untuk menambah kesempatan kerja, *output* harus bertambah sebab setiap unit pertumbuhan *output* akan menambah kesempatan kerja sebanyak c unit. Makin besar nilai c, maka jumlah kesempatan kerja yang tersedia akibat bertambahnya 1 unit *output* akan makin besar. Besar kecilnya nilai sangat tergantung pada teknik produksi (tingkat teknologi) yang digunakan dan tingkat efisiensi. Teknik produksi yang padat karya cenderung memperbesar nilai c, sebaiknya dengan teknik produksi yang padat modal (Rahardja & Manurung, 2008).

Todaro (2003) juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar.

Beberapa Hasil Kajian Empiris

Mudiarcana dan Marhaeni (2018) meneliti analisis pengaruh investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan runtun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bah-

wa investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali secara langsung berpengaruh positif dan signifikan. Investasi, pengeluaran pemerintah dan penyerapan tenaga kerja secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Penelitian yang mirip dilakukan oleh Kamar (2017) meneliti analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang pada tahun 2009-2015. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan data *time series*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tangerang. Sehingga semakin tinggi investasi maka akan meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja.

Kevin (2018) meneliti pengaruh investasi sektor primer, investasi sektor sekunder dan investasi sektor tersier terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi sektor primer, investasi sektor sekunder dan investasi sektor tersier terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi panel dengan data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi sektor primer tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, investasi sektor sekunder berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja dan investasi sektor tersier berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Semakin tinggi realisasi investasi, maka semakin tinggi pula kesempatan kerja di Indonesia. Namun, sebaliknya semakin menurun realisasi investasi maka akan diikuti oleh penurunan kesempatan kerja di Indonesia.

Haris (2017) meneliti pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Provinsi Jawa Tengah tahun 2004-2008. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, apabila investasi meningkat maka peluang penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat.

Referensi

- Abd. Rauf, Rustam dkk. 2010. *Pengaruh Investasi Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Hasil Pertanian Di Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Agroland
- Alhiriani. 2013. *Pengaruh Investasi dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur di Sulawesi Selatan. Makassar*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2004-2019. *Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Provinsi Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2004-2020. *Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka*. Sulawesi Selatan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2011-2019. *Keadaan Angkatan Kerja Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan
- Deliarnov. 2002. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta. UI-Press

- Dornbusch, Rudige dkk. 2015. *Makroekonomi*. Mc Graw Hill.
- Fitri Aprilia. Permadani. 2014. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektor Primer, Sekunder, Tersier dan Tingkat Upah Terhadap Penyediaan Lowongan Kerja Tamatan SMK Di Provinsi Jawa Tengah*
- Gregory Mankiw. N. 2009. *Makroekonomi*. Jakarta. Erlangga
- H. Manulang. Sendjun. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta
- Izhartati. 2017. *Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Kamar, Karnawi. 2017. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang Pada Tahun 2009-2015*. Jurnal Bisnis & Manajemen Vol.17 STIE Insan Pembangunan
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Prasojo, P. (2009). *Analisa Pengaruh Investasi PMA dan PMDN, Kesempatan Kerja serta Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2006*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Romdhoni, AbdulHaris. 2017. *Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah Tahun 2009-2013*. Surakarta. STIE-AAS Surakarta.
- Safina. Lailan dan Sri Endang Rahayu. 2011. *Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Swasta Terhadap Penciptaan Kerja Kesempatan Kerja di Sumatera Utara*. Jurnal Manajemen & Bisnis Vol. 11 No. 01

- Samsiah, Nur. 2016. *Pengaruh Investasi, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Di Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar. FEB UIN Alauddin Makassar
- Setio Harijono, Gatot. 2012. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2006-2010*. Bali. Jurnal Universitas Udayana.
- S. Mulyadi. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsono. Sonny. 2009. *Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Sukirno. Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Sutrisna. Adi dan I Nengah Kartika. 2016. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Pendidikan*. E-Jurnal Ep Unud Vol.5 No.9
- Soetrisno. 1992. *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia (Suatu Studi)*. Yogyakarta. Andi Offset Yogyakarta
- Solow, R. M. (1957). *Technical change and the aggregate production function*. The review of Economics and Statistics.
- Tawiri, N. (2010). *Domestic investment as a drive of economic growth in Libya*. In International Conference on Applied Economics, ICOAE.
- Tri Saputra, Kevin. 2018. *Pengaruh Investasi Sektor Primer, Investasi Sektor Sekunder dan Investasi Sektor Tersier Terhadap Kesempatan Kerja Di Indonesia*. Padang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Bab XIII

Sektor Basis dan Elastisitas Kesempatan Kerja Sektoral

*Reski Fitri Paradise
Sabir*

Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi para ahli ekonom menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan setiap orang dalam perekonomian. Berapa besar perubahan pertumbuhan perekonomian suatu negara diukur dalam kurun waktu pertahun. Apakah pertumbuhannya meningkat atau malah semakin menurun yang disebabkan oleh berbagai faktor-faktor seperti perubahan tenaga kerja, modal, investasi dan sumber daya alam yang tersedia di suatu negara.

Sebagai tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah hasil produk barang dan jasa orang-orang

dan perusahaan. Dinamakan bruto karena memasuki komponen penyusutan. Dinamakan domestik karena batasannya adalah suatu wilayah atau negara, sehingga di dalamnya termasuk hasil-hasil barang dan jasa perusahaan serta yang dihitung adalah produksi barang dan jasa.

Menurut Kuncoro (2011), pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan (Tarigan, 2008), yaitu Pendekatan Produksi: Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antar masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara yaitu bahan baku dari luar yang dipakai dalam proses produksi. Pendekatan Pendapatan: Pendekatan ini menghitung nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima faktor produksi, yaitu upah, gaji, dan surplus usaha, penyusutan, pajak tidak langsung neto pada sektor pemerintah dan usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha meliputi bunga yang dibayarkan neto, sewa tanah, dan keuntungan. Pendekatan Pengeluaran: Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor neto.

Menurut Adisasmita (2011), indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi adalah: Pertama, PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. Kedua, PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang, artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah *output* yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya dan yang ketiga, batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

Selanjutnya, teori pembangunan neo-klasik menggambarkan bahwa pembangunan suatu negara diutamakan dari segi ekonomi yaitu tingginya tingkat sumber ekonomi akan memicu pertumbuhan ekonomi. Tolak ukur dari pembangunan ekonomi sendiri adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB), Kesempatan Kerja, Kestabilan Perekonomian, Dan Pemerataan Distribusi Pendapatan, Dan Neraca Pembayaran Luar Negeri. Harapan demi terwujudnya pembangunan ekonomi adalah bukan hanya peningkatan jumlah produksi (kuantitatif) tetapi juga kualitas dari barang produksi yang dihasilkan. Dalam penelitian ini pertumbuhan berkualitas yang dimaksud ialah sejauh apa sektor-sektor yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dapat memenuhi kebutuhan di wilayahnya maupun diluar wilayahnya serta elastis dalam menyerap tenaga kerjanya. Apabila sektor-sektor yang ada sudah

mampu memenuhi kriteria menandakan sektor-sektor tersebut sudah dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik.

Teori ini menitikberatkan pada kenaikan *Gross National Product* (GNP), dimana apabila GNP suatu negara meningkat maka secara otomatis akan menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang melanda negara berkembang. Akan tetapi, permasalahan yang dialami oleh negara berkembang tidak hanya soal kemiskinan, melainkan masih ada permasalahan lain yang juga membutuhkan solusi. Penerapan konsep teori neo-klasik secara kaku akan berdampak pada campur tangan pemerintah dan negara yang semakin kecil dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah baru turut campur bila situasi yang terjadi masyarakat sudah sulit dikendalikan. Hal lain yang dapat terjadi adalah kegiatan perekonomian di kalangan masyarakat dapat dimonopoli oleh perusahaan swasta dimana tujuan utama dari perusahaan swasta adalah mencari keuntungan, bukan mensejahterakan masyarakat. Demi menyelesaikan persoalan pembangunan di negara berkembang, diperlukan strategi-strategi khusus.

Teori Basis Ekonomi

Menurut Glasson (1990), konsep dasar ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis memiliki peran penggerak utama (*prime mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah semakin maju pertumbuhan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasaran bersifat lokal. Inti dari teori ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut.

Pengertian sektor basis pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan baik itu perbandingan berskala internasional, nasional maupun regional. Dalam kaitannya dengan lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dengan lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor basis apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau domestik. Faktor penentu (determinan) pertumbuhan ekonomi dikaitkan secara langsung kepada permintaan akan barang dari daerah lain di luar batas masyarakat ekonomi regional. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan material (bahan) untuk komoditas ekspor, akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Adisasmita (2005), teori ekonomi basis memusatkan pada kegiatan-kegiatan basis atau ekspor, tetapi tidak melihat pentingnya impor. Suatu peningkatan dalam kesempatan kerja dan pendapatan basi mempunyai suatu efek pengganda yang sangat terbatas terhadap kegiatan bukan basis. Yang sangat penting dalam hal ini, bahwa suatu perekonomian dapat bertambah tidak hanya dengan peningkatan ekspor dari industri basis tetapi juga dengan mengganti barang-barang impor dari industri basis dengan barang-barang hasil produksi wilayah yang bersangkutan. Selanjutnya dikemukakan bahwa bertambahnya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan bertambah arus pendapatan kedalam wilayah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kegiatan volume bukan basis. Sebaliknya berkurangnya kegiatan mengekspor barang-barang dan jasa-jasa menyebabkan berkurangnya pendapatan yang masuk kedalam wilayah yang bersangkutan.

Menurut Arsyad (1999), dasar pemikiran teknik ini adalah teori economic base yang intinya adalah karena sektor basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan ke luar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut, menambah permintaan terhadap barang dan jasa didalamnya, serta menaikkan volume kegiatan non basis. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis atau lokal. Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam produksi lokal merupakan investasi yang didorong sebagai akibat dari industri basis. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah tersebut, dan turunya permintaan terhadap produk dari kegiatan non basis. Dengan demikian kegiatan atau sektor basis mempunyai peranan sebagai penggerak utama dimana setiap perubahan mempunyai efek terhadap perekonomian. Oleh karena itu, industri basis merupakan industri yang harus dikembangkan di suatu daerah.

Menurut Tarigan (2005), landasan utama dalam model ekonomi basis yakni persoalan *multiplier* (dampak pengganda) yang merupakan landasan dari model *input-output* dan pengklasifikasian sektor (apakah tergolong sektor basis atau tidak basis) yang dikenal dengan analisis *Location Quotient*. Dengan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ) dimana, LQ membandingkan antara pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor *i* pada tingkat wilayah terhadap pendapatan (tenaga kerja) total wilayah dengan pangsa relatif pendapatan (tenaga kerja) sektor *i* pada tingkat nasional terhadap pendapatan (tenaga kerja) nasional.

Logika dasar LQ menganggap bahwa industri basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya, adanya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi (*consumption*, C) dan investasi (*investment*, I) di daerah tersebut. Hal tersebut selanjutnya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap industri basis, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri non basis (lokal). Kenaikan permintaan (*demand*) ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan dan juga industri lain. Teknik LQ mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Kelemahan dari metode LQ adalah bahwa kriteria ini bersifat statis karena hanya memberikan gambaran pada satu titik waktu. Artinya bahwa sektor basis (unggulan) tahun ini belum tentu akan menjadi unggulan pada masa yang akan datang, sebaliknya sektor yang belum menjadi basis pada saat ini mungkin akan unggul pada masa yang akan datang.

Tumbuh atau tidaknya suatu wilayah dan cepat atau tidaknya wilayah itu tumbuh ditentukan oleh bagaimana kinerja wilayah itu sebagai eksportir ke daerah lain dan atau ke luar negeri. Oleh karena itu muncul suatu strategi pembangunan daerah yang menekankan tentang arti pentingnya bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional agar mengurangi hambatan-hambatan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang didirikan di daerah tersebut.

Tenaga Kerja

Menurut Sagir (1994), tenaga kerja sebagai semua orang yang bersedia untuk bekerja. Pengertian tenaga kerja tersebut meliputi mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri ataupun keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang bersedia bekerja dan mampu untuk bekerja namun tidak ada kesempatan kerja sehingga terpaksa menganggur. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Sumarsono (2009), tenaga kerja atau manpower terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Angkatan kerja terdiri dari dua golongan, yaitu: 1). golongan yang bekerja, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh upah, atau memperoleh pendapatan atau keuntungan, baik mereka yang bekerja penuh maupun tidak bekerja penuh; 2). golongan yang menganggur, yaitu mereka yang tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan menurut waktu tertentu atau mereka yang sudah pernah bekerja tetapi sudah menganggur dan mencari pekerjaan. Golongan yang termasuk bukan angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (maksudnya Ibu-Ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung dan jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat yang mendapat sumbangan). Kedua golongan dalam kelompok angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai

potential labor force. Kenyataan juga menunjukkan bahwa tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian mereka masih bersekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain sebagai penerima pendapatan. Dengan kata lain, semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan yang mengurus rumah tangga, semakin kecil penyediaan tenaga kerja. Jumlah yang siap kerja dan yang belum bersedia untuk bekerja, dipengaruhi oleh kondisi masing-masing keluarga, kondisi ekonomi dan sosial secara umum, dan kondisi pasar kerja itu sendiri. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja di Indonesia adalah penduduk yang telah berusia 15 tahun ke atas yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kesempatan Kerja

Menurut Esmara (1986), kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja. Sedangkan Menurut Sagir (1994), pengertian kesempatan kerja sebagai lapangan usaha atau kesempatan kerja yang sudah tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan.

Menurut Arfida (2003), kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing masing. Kesempatan kerja merupakan lapangan kerja yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Jadi kesem-

patan kerja termasuk lapangan yang belum diduduki. Dengan kata lain kesempatan kerja menggambarkan banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi. Kesempatan kerja ini menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia memadai dan seimbang dengan jumlah tenaga kerja tersedia.

Perluasan kesempatan kerja sangat penting bukan saja untuk mengurangi pengangguran atau peningkatan kemajuan perekonomian nasional secara umum, tetapi juga merupakan salah satu usaha membenahi dan mempertahankan ketahanan nasional Indonesia. Kesempatan kerja yang merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Simanjutak (1990), kesempatan kerja juga berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi, dan memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. Semakin meningkatnya pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini berarti semakin besar pula permintaan akan tenaga kerja. Sebaliknya semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan kesempatan kerja. Tersedianya lapangan/kesempatan kerja baru untuk mengatasi peningkatan penawaran tenaga kerja merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya investasi langsung (*direct investment*) pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti konstruksi, infrastruktur maupun industri pengolahan. Sementara pada sektor jasa, misalnya melalui perdagangan maupun pariwisata.

Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selanjutnya menurut Rahardja dan Manurung (2008), elastisitas atau analisis sensitivitas adalah analisis pengaruh satu variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu berapa persen satu variabel terikat akan berubah, bila satu variabel bebas berubah sebesar satu persen. Angka elastisitas (koefisien elastisitas) adalah bilangan yang menunjukkan berapa persen satu variabel terikat akan berubah, sebagai reaksi karena satu variabel bebas berubah satu persen. Sedangkan elastisitas penyerapan tenaga kerja dalam penelitian ini artinya persentase perubahan jumlah penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat sehubungan dengan perubahan PDRB sebanyak 1 persen.

Jika tingkat upah naik maka jumlah orang yang dipekerjakan menurun begitu juga sebaliknya. Penduduk akan terserap pada berbagai sektor, namun pada dasarnya setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja pada masing-masing sektor yang mendorong terjadinya perubahan sektoral yang berpengaruh pula pada jumlah penyerapan tenaga kerja. Menurut Sagir (1994), perbedaan laju pertumbuhan penduduk regional dan kesempatan kerja dapat menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berikut adalah faktor-faktor besar kecilnya elastisitas tenaga kerja yaitu: Substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain, contohnya modal, elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi, elastisitas penawaran dari faktor-faktor produksi pelengkap.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan kurun waktu tertentu, misalnya selama lima tahun atau periode tertentu tetapi dapat pula secara tahunan. Pengertian pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses merupakan gambaran tentang bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, tekanannya adalah pada perubahan atau perkembangan, sedangkan pengertian pertumbuhan ekonomi pada sisi *output* harus dilihat dari dua sisi yaitu *output* total (PDB/PDRB) dan jumlah penduduk, karena *output* per kapita adalah *output* total dibagi dengan jumlah penduduk.

Menurut Boediono (1992), meningkatkan *output* sebagai konsekuensi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan keterampilan pekerja, penerapan sistem pembagian kerja yang tepat berdasarkan keterampilan pekerja dan penggunaan mesin-mesin yang dapat memudahkan dan mempercepat serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan dalam penggunaan tenaga kerja menandakan adanya kesempatan kerja sebagai akibat dari peningkatan *output* tersebut. Selanjutnya Simanjuntak (1990), mengatakan hubungan antara pertumbuhan *output* dengan peningkatan jumlah kesempatan kerja dapat digambarkan lewat hubungan antara pasar barang (*output*) dengan pasar tenaga kerja, dimana melalui mekanisme pasar terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran. Di pasar tenaga kerja, rumah tangga menawarkan jasanya dan mendapatkan harga (gaji). Apabila permintaan konsumsi rumah tangga di pasar barang meningkat, maka produksi dari sisi penawaran pasar barang meningkat dan terjadilah pertumbuhan *output*. Apabila di semua pasar terjadi

peningkatan *output*, maka secara agregat terjadi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan mendorong adanya pertumbuhan kesempatan kerja. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan kesempatan kerja. Tenaga kerja yang berkualitas mempunyai keterampilan dan kemampuan yang semakin tinggi juga, sehingga mendorong adanya peningkatan dalam upah tenaga kerja. Tenaga kerja yang berkualitas dan mempunyai kemampuan serta keterampilan yang tinggi ini telah mendorong peningkatan produktivitas yang akhirnya mendorong peningkatan *output*. Oleh karena itu, walaupun sisi penawaran lebih besar daripada sisi permintaan namun upah selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hubungan Kesempatan Kerja dengan Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja

Lapangan kerja terbesar yang dimiliki Indonesia adalah berada di sektor informal. Hal ini disebabkan karena sektor informal mudah dimasuki oleh para pekerja karena tidak banyak memerlukan modal, kepandaian, dan keterampilan. Penciptaan kesempatan kerja adalah langkah yang tepat, mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaan tenaga kerja. Kelebihan tenaga kerja ini biasanya merupakan tenaga kerja tidak ahli sehingga perlu kiranya perlakuan investasi pada proyek-proyek padat karya, bukan pada perkembangan pada sektor kapitalis dengan ciri utama pada modal sehingga hasil dari pemilihan strategi yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Menurut Sumarsono (2009), elastisitas merupakan ukuran derajat kepekaan jumlah permintaan akan sesuatu terhadap penambahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Permintaan akan sesuatu itu bisa berupa barang, tenaga kerja, produksi dan lain-lain. Besarnya permintaan akan barang, tenaga kerja, produksi ini dipengaruhi oleh suatu

faktor tertentu, misalnya harga, produksi, upah, modal dan lain-lain. Adanya usaha-usaha pembangunan ekonomi nasional biasanya pada beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda sebagian terdapat mengalami pertumbuhan pesat dan sebagian mengalami pertumbuhan yang lambat sehingga kemampuan tiap sektor berbeda-beda dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan laju pertumbuhan tersebut menyebabkan perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja di masing-masing sektor secara berangsur-angsur terjadi perubahan sektoral, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Perbedaan pendapatan nasional dan kesempatan kerja tersebut juga menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor untuk penyerapan tenaga kerja. Elastisitas kesempatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Elastisitas penyerapan tenaga kerja bisa terserap dengan adanya kenaikan atau pertumbuhan dalam produksi. Ini berarti elastisitas dapat dihitung dengan menggunakan laju pertumbuhan produksi, berarti untuk mencari elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah dengan laju penyerapan tenaga kerja dan laju kenaikan produksi. Dengan demikian semakin besar laju kenaikan produksi dan semakin besar laju elastisitas penyerapan tenaga kerja maka laju penyerapan tenaga kerja pun akan semakin besar.

Hasil Penelitian dan Studi Empiris

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan penelitian ini, adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Iqbal Qamarullah (2016) menuliskan tentang Analisis Sektor Unggulan dan Elastisitas Tenaga Kerja Di Kabupaten Banyuwangi.

Metode analisis data yang digunakan adalah LQ (*Location Quotient*), *Shift Share Esteban Marquillas* dan Elastisitas Tenaga Kerja. Variabel digunakan yaitu sebanyak 4 variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sektor ekonomi yang unggulan atau basis di Kabupaten Banyuwangi adalah: sektor Pertanian; Pertambangan dan Galian, dan; Keuangan, Persewaan dan Perusahaan Jasa.; sektor ekonomi yang memiliki keunggulan di Kabupaten Banyuwangi jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi di Jawa Timur adalah sektor Pertanian; Industri Pengolahan; Bangunan, dan; Jasa-jasa; Elastisitas penyerapan tenaga kerja pada sektor ekonomi di Kabupaten Banyuwangi periode tahun 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014 termasuk dalam kategori inelasticity. Sedangkan pada periode tahun 2006 dan 2011 termasuk dalam kategori elasticity.

Gita Irina Arief (2009) menulis tentang Identifikasi dan Peran Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi DKI Jakarta. Pada penelitian ini, untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan digunakan analisis *Location Quotient*, analisis PDRB DKI Jakarta, dan analisis kesempatan kerja. Sedangkan untuk melihat kinerja sektor ekonomi unggulan digunakan analisis *Shift Share*. Indikator ekonomi yang digunakan adalah tenaga kerja yang bekerja pada sembilan sektor ekonomi utama di DKI Jakarta pada tahun 2003-2007 dengan menggunakan software *Microsoft Excel*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2003-2007, sektor yang menjadi sektor ekonomi unggulan di Provinsi DKI Jakarta adalah sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, dan sektor Jasa-Jasa, dimana sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Selama tahun 2003-2007, kelima sektor unggulan yang ada di DKI Jakarta rata-rata menyerap te-

naga kerja sekitar 95 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Pada tahun 2003-2007, sektor-sektor di DKI Jakarta memiliki pertumbuhan positif dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki laju pertumbuhan kesempatan kerja tercepat adalah sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Sedangkan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan adalah sektor yang laju pertumbuhannya paling lambat. Dilihat dari daya saing, sektor Pertanian dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan adalah sektor yang berdaya saing baik pada tahun 2003-2007. Sedangkan sektor-sektor ekonominya kurang memiliki daya saing. sektor Pertanian, sektor Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, dan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan termasuk sektor yang progresif.

Darman (2016) menulis tentang Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sulawesi Tenggara. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Location Quotient* (LQ). Didasarkan hasil nilai LQ untuk tahun 2004-2013 yang ditinjau dari segi peranan sektor-sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa terdapat 3 sektor ekonomi yang dapat diunggulkan ($LQ > 1$) yaitu : sektor Pertanian, Pengangkutan dan Jasa-Jasa serta dari hasil nilai LQ untuk tahun 2004-2013 yang ditinjau dari segi perbandingan porsi lapangan kerja per sektor maka penyerapan tenaga kerja yang lebih besar di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu di sektor Pertanian.

asriadi (2014) menulis tentang Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kolaka Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 - 2012. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Shift Share*.

Hasil analisis *Location Quotient* menunjukkan sektor pertanian merupakan sektor basis di Kabupaten Kolaka Utara. hal ini mengindikasikan bahwa wilayah ini telah mampu memenuhi sendiri kebutuhannya disektor tersebut dan dimungkinkan untuk mengekspor keluar daerah barang dan jasa pada sektor ini. Hasil analisis *Shift Share* menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor kompetitif yang memiliki pertumbuhan cepat dan daya saing tinggi yaitu sektor Pertambangan, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas Dan Air Bersih, sektor Konstruksi/Bangunan, dan sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran. Sementara untuk komoditi unggulan Kabupaten Kolaka Utara menempatkan komoditi kakao, cengkeh dan nilam dari subsektor perkebunan sebagai komoditas unggulan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Yuga Mahara Soib, Siti Qomariyah, dan Fivien Muslihatin Ningsih (2015) menulis tentang Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jember. Model analisis adalah Model Analisis Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja dan SWOT.

Hasil analisis elastisitas pekerjaan di sektor ekonomi di Kabupaten Jember pada 2009-2010, 2010- 2011, dan 2012-2013 memiliki tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah <1 (Inelastik) berarti nilai pertumbuhan PDRB naik 1 akan menyebabkan jumlah yang dapat diserap akan meningkat kurang dari 1 dan jika penurunan nilai GDP 1 akan menurunkan jumlah pekerja yang akan diserap kurang dari 1, sedangkan pada periode 2011-2012 memiliki tingkat elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah >1 (elastis) berarti nilai Pertumbuhan GDP naik 1 akan menyebabkan jumlah tenaga kerja yang bisa diserap meningkat lebih dari 1 dan sebaliknya jika terjadi

penurunan nilai PDB 1 akan menurunkan jumlah pekerja yang akan diserap jatuh lebih dari 1. Analisis SWOT dalam hal ini yang dimaksudkan Strengths) potensi sumber daya alam yang mendukung dan melimpahnya sumber daya manusia. *Weakness* (W) penyempitan dan berkurangnya lahan pertanian. *Opportunities* (O) adanya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat, dan perkembangan IPTEK yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. *Strategy* (SO) memaksimalkan sektor-sektor potensial dalam menyerap tenaga kerja. *Threat* (T) adanya konversi lahan, investor terikat dengan peraturan daerah yang menyebabkan masa investasi terbatas oleh waktu yang dirasa cukup singkat. Dari hasil analisis SWOT pengembangan sektoral ekonomi wilayah di Kabupaten Jember dapat dilakukan dengan strategi sebagai berikut: a. Mengoptimalkan sumber daya dan ketersediaan lahan; b. memaksimalkan peningkatan kerjasama dengan investor; c. Mengoptimalkan peraturan perencanaan dan pembuatan kebijakan pemerintah lokal. Serta adapun saran yang yang diberikan ialah a. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan di sektor Pertanian, sehingga sektor pertanian yang ada tetap dapat memberikan kontribusi yang baik untuk PDRB dan kontribusi dalam menyerap tenaga kerja; b. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diharapkan dapat lebih mengevaluasi dan mempercepat proses perizinan dan amdal untuk kegiatan di sektor Pertambangan sehingga investor yang ada tetap menginvestasikan modalnya dan kegiatan pertambangan yang ada diharapkan akan menyerap tenaga kerja yang lebih baik; c. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Jember diharapkan dapat lebih meningkatkan dan mengembangkan Industri Pengolahan, sehingga industri yang ada tetap berkembang dan dapat memberikan peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja; d. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Jember diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja dari sektor Listrik Gas dan Air Bersih, diharapkan peningkatan kinerja

akan meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Referensi

- Glasson. (1977). *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: Terjemahan Paul Sitohang Lembaga Penerbit FEUI.
- A, T. (2008). *Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Mendailing Natal Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia.
- Abdussamad, Azhar Syarifah Lies Fuaidah dan M Nasir. (2003). *Analisis Sektor Basis dan Non Basis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.
- Adisasmita. (2008). *Pengembangan Wilayah (konsep dan Teori)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Admatja, A. S. (1999). *Inflasi di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 1, No. 1.
- Amalia, N., Aimon, H., & Syofyan, E. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Kredit Pada Bank Umum di Sumatera Barat*. Jurnal Kajian Ekonomi, Vol 4, No 7.
- Ameur, I., & Mhiri, S. (2013). *Explanatory Factors of Bank Performance*. International Journal of Economics, Finance and Management.
- Anwar, A. I. (2001). *Kajian Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan*

Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sulawesi Selatan.
Kerjasama FE-Unhas dengan Bank Indonesia.

Arfida. (2003). ***Ekonomi Sumber Daya Manusia.*** Jakarta: Ghalia Indonesia.

Arief, G. I. (2009). ***Identifikasi dan Peran Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi DKI Jakarta.***

Arifin, Z. (2008). ***Metodologi Penelitian Pendidikan.*** Surabaya: Lentera Cendekia.

Arsyad. (1999). ***Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.*** Yogyakarta: BPFE.

Arsyad, L. (1999). ***Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.*** Yogyakarta: BPFE.

arsyad, L. (2005:108). ***Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua.*** Yogyakarta: BPFE.

Arsyad, L. (2010). ***Ekonomi Pembangunan.*** Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Arsyad, Lincolin. (1999). ***Ekonomi Pembangunan.*** Yogyakarta: Edisi Keempat STIE YKPN.

Azis, I. (1994). ***Ilmu Ekonomi Regional Dan Beberapa Aplikasinya Di Indonesia.*** Jakarta: FEUI.

Badan Pusat Statistik. (2017). ***<http://www.bps.go.id>. Sulawesi Selatan:***
Diakses Pada 16 Oktober 2018.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. (2015).

Bank Indonesia. (2018). ***Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Periode Februari 2018.*** Laporan Perekonomian, Jakarta.

Barat, B. P. (2017).

- Barat, B. P. (2017). *Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka*. Mamuju.
- Bastian, & Suhardjono. (2006). *Akuntansi Perbankan*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Beck, T., Buyukkarabacak, B., Rioja, F., & Valev, N. (2012). *Who Gets the Credit? And Does it Matter? Household vs. Firm Lending Across Countries*. *Journal of Macroeconomics* .
- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Balai Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Boediono. (2001). *Ekonomi Makro Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Budisantoso, T., & Triandaru, S. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Case, K., & Ray, C. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi, Edisi Kedelapan, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Darman. (2016). *Analisis Sektor Unggulan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Barat*.
- Demirguc-Kunt, A., & Levine, R. (2008). *Finance, Financial Sector Policies and Long-Run Growth*. Washington DC: Commission on Growth and Development, World Bank.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djohanputro, B., & Kountor, R. (2007). *Non Performance Loan (NPL) Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- Djojohadikusumo, S. (1987). *Perdagangan dan Industri dalam pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Dr. Mohammad Abdul Mukhyi. (2007). *Analisis Peranan Subsektor Pertanian Dan Sektor Unggulan Terhadap Pembangunan kawasan Ekonomi*. Provinsi Jawa Barat.

- Ebtian, Rico. (2011). *Analisis Sektor dan Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Serdang*. Medan: Pasca Sarjana USU.
- Endi, R. (2015). *Analisis Sektor Unggulan dan Pengembangan Wilayah di Kota Bandar Lampung 2000-2012*. Bandar Lampung.
- Endi, R., Suparta, W., & Muhammad Husaini. (2015). *Analisis Sektor Unggulan dan Pengembangan Wilayah di Kota Bandar Lampung 2000-2012*. Bandar Lampung.
- Esmara. (1986). *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Fachrurrazy. (2009). *Tesis Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Glasson. (1997). *Pengantar Perencanaan Regional Terjemahan Paul Sitohang*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Glasson. (1997). *Pengantar Perencanaan Regional Terjemahan Paul Sitohang*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Glasson, J. (1977). *Pengantar Perencanaan Regional. Jakarta: Terjemahan Paul Sitohang*. Lembaga Penerbit FE UI.
- Glasson, J. (1990). *Pengantar Perencanaan Regional*. LPFEUI.
- Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2012). *Determinan Kebijakan Hutang (Dalam Agency Teory dan Pecking Order Teory)*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. ISSN : 1779-4878.
- Harisman, Beni. (2007). *Analisis Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor-sektor Unggulan di Provinsi Lampung periode 1993-2003*.
- Hasibuan, M. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Hasriadi. (2014). *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Kolaka Utara*.
- Hayashi, M. (2002). *The Role of Subcontracting in SME Development in Indonesia: Micro-Level Evidence From the Metal Working and Machinery Industry*.
- Irawan, & M.A, D. S. (1979). *Ekonomi Pembangunan (ed)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ismail, M. (2011). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Jhingan. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Jhingan. (2004). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Jhingan. (2008). *Ekonomi pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: D. Guritno [penerjemah]. PT Raja Grafindo Persada.
- Kamaluddin, R. (1987). *Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: LPFE-UI.
- Karl, & Fair. (2001). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Bina Grafika.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Keynes, J. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Cambridge: Published by Harcourt. Fellow of the King's College.
- Kuncoro, & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi) Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. (2011). *Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi untuk*

Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Limbong, Daud Lebok. (1997). *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Tanah Toraja Tahun 1997-2006*. Universitas Hasanuddin Makassar: LP3S.
- Lipsey, R. G. (1990). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmoedin, A. (2001). *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Masithah, & Munawaroh, S. (2014). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga Kredit, Non Performing Loan dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Bank Pemerintah di Kalimantan Selatan*. Jurnal Spread: Vol.4, No.1.
- Mawardi, I. (1997). *Daya saing Indonesia Timur Indonesia dan Pengembangan Ekonomi Terpadu*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- McTaggart, D., Findlay, C., & Parkin, M. (2003). *Economics*. Australia: Pearson Education.
- Mewoh, R. L., Rotinsulu, T. O., & George, M. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Modal Kerja pada Bank Umum di Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 17, No. 01.
- Mishkin, S. F. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mudrajad, K. (2010). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Muljono, T. P. (2001). *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Nadira, S. (2012). *Analisis Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Periode 2004-2009*.

- Nopirin. (2000). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta: BPFE.
- Nopirin. (2010). *Ekonomi Moneter*. Buku I, Edisi ke-4, Cetakan Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE.
- Oggy P.P, I. G., & Surya, D. (2015). *Pengaruh DPK, BI Rate dan NPL Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja pada BPR di Provinsi Bali Tahun 2009-2014*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 4, No. 5.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah*. Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK.
- Paturuhu, J. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil*. Jurnal SOSO 2, Vol. 5, No.1.
- Pohan, A. (2008). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- Prasetyo, P. E. (2008). *The Quality Of Growth*. JEJAK, Vol. 1, No.1.
- Pratama, B. A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum di Indonesia Periode tahun 2005-2009)*. Jurnal Bisnis Strategi, Vol. 19, No. 2.
- Qomarullah, I. (2016). *Analisis Sektor Unggulan dan Elastisitas Tenaga Kerja di Kabupaten Banyuwangi*.
- Rachbini, Didik J. (2001). *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rachmat, Hendayana. (2003). *Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam penentuan Komoditas Unggulan Nasional*. Yogyakarta: Informatika Pertanian Volume 12.

- Raharja, P., & Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Ricardshon. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Richardson. (2001). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta: Paul Sitohang Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Richardson, H. W. (2001). *Dasar-dasar Ilmu Regional (terjemahan Paul Sitohang)*. Jakarta: FE UI.
- Rivai, V. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, S. (2006). *Banking Asset and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sadono, S. (2010). *Teori Pengantar Makroekonomi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sagir. (1994). *Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Samuelson, P., & Nordhaus, W. D. (1997). *Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Simanjuntak, P. (1990). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*.
- Simanjuntak, P. (2011). *Manajemen Evaluasi Kinerja*. Edisi 3. Jakarta: Fakultas UI.
- Sinungan, M. (2003). *Produktivitas Apa dan Bagaimana*. Bandung: Bumi Aksara.
- Sirojuzilam. (2008). *Disparitas Ekonomi Dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur*. Provinsi Sumatera Utara: Pustaka Bangsa Press.
- Sjafrizal. (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional*

Wilayah Indonesia Bagian Barat. Yogyakarta: LP3ES.

- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media, Cetakan Pertama.
- Soepono. (1993). *Analisis Shift Share : Perkembangan dan Penerapan Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, volume 8 nomor 1*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Soib, Y. M., Komariyah, S., & Muslihatinningsih, F. (2015). *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Sektor-Sektor Ekonomi di Kabupaten Jember*. Jember: Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).
- Statistik, B. P. (2017).
- Sudarsono. (1988). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta.
- Suharsono, S. (1995). *Kesempatan Kerja dan Tenaga Kerja*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suharsono, S. (1995). *Kesempatan Kerja dan Tenaga Kerja*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sukirno, S. (1985). *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: LPFE - Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPEF_UI Bima Grafika.
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo .
- Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Supangkat. (2002). *Analisis Penentuan Sektor Prioritas Dalam Peningkatan Pembangunan daerah Kabupaten Asahan*. Medan: Tesis Program Pascasarjana USU.
- Suseno, & Piter, A. (2003). *Sistem Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.
- Tabrani. (2008). *Analisis Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Mendailing Natal Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia, 10(1) 1-6.
- Tambunan. (2001). *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, dan Smith. (2014). *Pembangunan Ekonomi, 12 ed*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tumenggung. (1996). *Gagasan dan Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi Terpadu (kawasan Timur Indonesia)*. Jakarta: Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Dirjen Cipta Karya Departemen PU.

EKONOMI KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF TEORETIS DAN STUDI EMPIRIS

Ekonomi kependudukan adalah ilmu yang menganalisis dinamika penduduk dengan menggunakan teori, pendekatan dan alat analisis ekonomi. Dinamika penduduk mencakup perubahan jumlah, struktur umur, dan persebaran penduduk yang diakibatkan oleh aspek fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk. Kemudian aspek fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk diakibatkan oleh faktor ekonomi. Jadi merupakan hubungan tak berujung, mirip lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*, milik Nurkse). Jadi dalam pengertian ini, ekonomi kependudukan mengkaji tentang bagaimana dampak perekonomian terhadap dinamika penduduk, dan bagaimana dampak dinamika penduduk terhadap perekonomian. Prinsip ekonomi kependudukan mengkaji tentang posisi penduduk dalam pembangunan ekonomi. Baik penduduk sebagai produsen (faktor produksi), maupun penduduk sebagai konsumen.

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi, oleh karena itu tenaga kerja sangat penting dalam kegiatan ekonomi maupun dalam perekonomian suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ekonomi ketenagakerjaan membahas tentang permintaan, dan atau penawaran tenaga kerja, termasuk pasar tenaga kerja, yang bermuara pada penyerapan tenaga kerja dan pengangguran.

Buku ini, di satu sisi memaparkan tentang keterkaitan antara penduduk dengan pembangunan ekonomi, dampak dan implikasi perkembangan kependudukan di Wilayah Bagian Tengah Indonesia dari aspek ekonomi kependudukan. Kemudian dari aspek ekonomi ketenagakerjaan, buku ini banyak memaparkan aspek ketenagakerjaan, terutama pada aspek permintaan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, persoalan pengangguran, dan lama mencari kerja, sampai pada migrasi internasional. Buku ini berisikan 13 bab, masing-masing bab dipaparkan dalam perspektif teoretis dan studi empiris dari beberapa penulis yang ada.



Gedung UPT Unhas Press
Kampus Unhas Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10
e-mail: unhaspress@gmail.com
Laman: unhaspress.unhas.ac.id
Makassar

